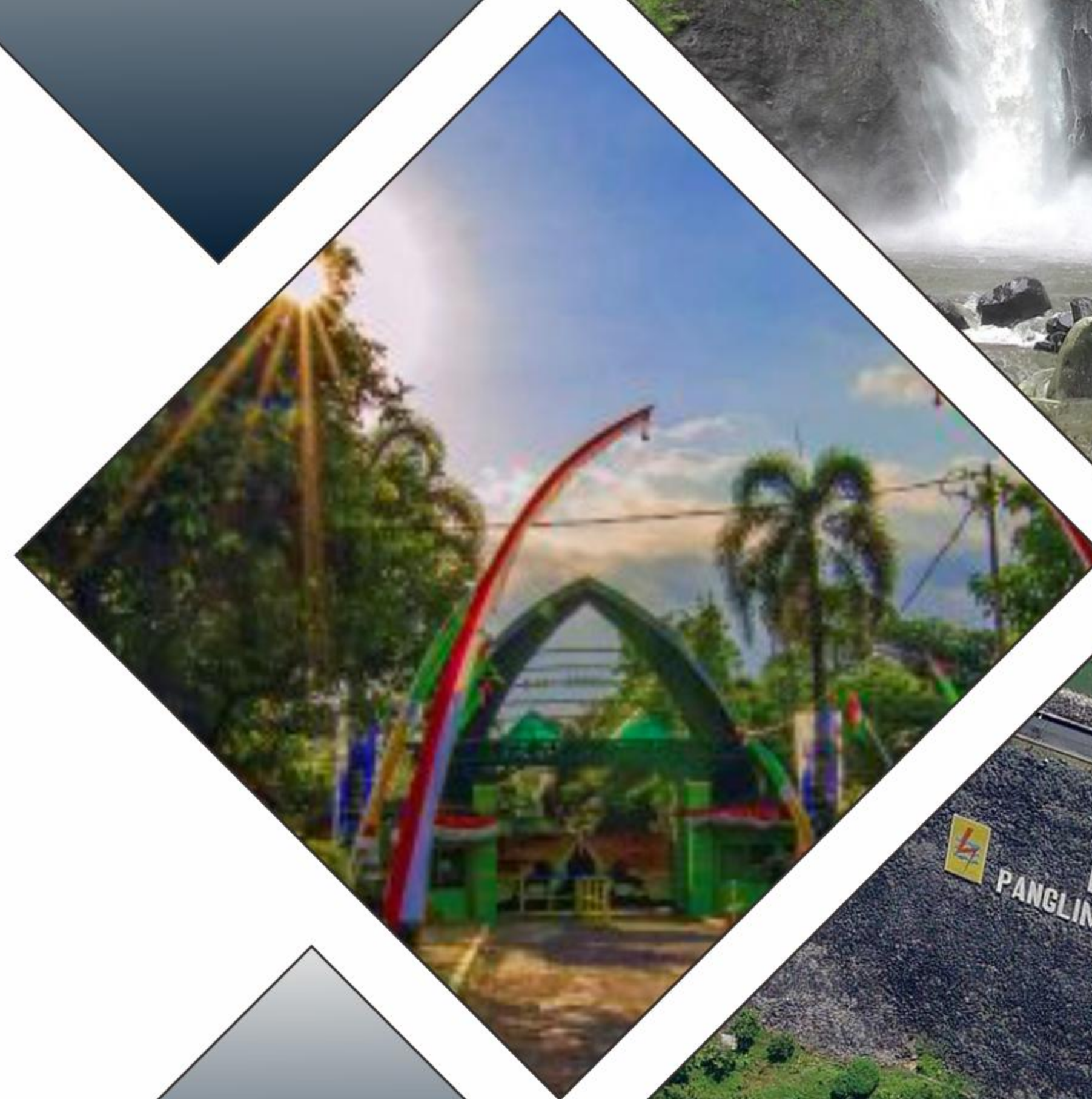


Peraturan Bupati Banjarnegara
Nomor 14 Tahun 2022
Tentang
Rencana Pembangunan Daerah
Tahun 2023-2026



**RENCANA
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
2023-2026**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022**



RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

TAHUN
2023-2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2022



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 14 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan tujuan dan sasaran dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi dan misi Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah untuk kurun waktu 4 (empat) tahun mendatang;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Bupati Berakhir pada Tahun 2022, Bupati yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tahun 2023-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2023-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Daperlitbang	

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RPD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut Renstra PD Tahun 2023-2026 adalah Dokumen Perencanaan PD untuk periode 4 (empat) tahun.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) Tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPD.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

19. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
20. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*) dan dampak (*impact*).
21. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
22. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
23. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
24. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
25. Hari adalah hari kerja.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sebagai landasan yang akan digunakan oleh Penjabat Bupati sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

Pasal 3

- (1) RPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan penjabaran dari visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2005-2025 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang disertai dengan kerangka pendanaan pembangunan dan program perangkat daerah serta kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) RPD didasarkan pada visi misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahap keempat dan isu strategis aktual daerah.

Pasal 4

RPD menjadi pedoman :

- a. penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD; dan
- b. instrumen evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Pasal 5

RPD wajib dilaksanakan oleh Penjabat Bupati dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	<i>[Signature]</i>

BAB III SISTEMATIKA RPD

Pasal 6

Dokumen RPD terdiri atas sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM
- BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS
- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
- BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
- BAB IX : PENUTUP

Pasal 7

Dokumen RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPD

Pasal 8


Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026 dan Renstra PD Tahun 2023-2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kepala Baperlitbang bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPD Tahun 2023-2026; dan
- b. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra PD Tahun 2023-2026.

BAB V PERUBAHAN RPD

Pasal 9

- (1) RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan perubahan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksiting
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan RPD Tahun 2023-2026 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

RPD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

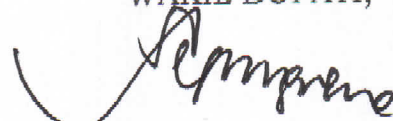
Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-5-2022

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

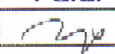

SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 17-5-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,


INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 14

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

DAFTAR ISI

	DAFTAR TABEL	iii
	DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-3
	1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
	1.4. Hubungan Antar Dokumen	I-8
	1.5. Sistematika Penyusunan	I-10
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
	2.1. Aspek Geografis dan Demografis	II-1
	2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-1
	2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah	II-7
	2.1.3 Wilayah Rawan Bencana	II-9
	2.1.4 Kondisi Demografis	II-9
	2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-13
	2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-13
	2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial	II-22
	2.3. Aspek Pelayanan Umum	II-31
	2.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-31
	2.3.1 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	II-45
	2.3.2 Urusan Pilihan	II-66
	2.3.3 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	II-74
	2.4. Aspek Daya Saing Daerah	II-82
BAB III	GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
	3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017-2021	III-1
	3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD	III-1
	3.1.2 Neraca Daerah	III-18
	3.2. Kemandirian Keuangan Daerah	III-23
BAB IV	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
	4.1. Permasalahan Pembangunan	IV-1
	4.1.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-1

	4.1.2	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	IV-4
	4.1.3	Urusan Pemerintahan Pilihan	IV-8
	4.1.4	Pendukung Urusan Pemerintahan	IV-10
	4.2.	Isu Strategis	IV-10
BAB V		TUJUAN DAN SASARAN	V-1
	5.1	Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025	V-1
	5.2	Misi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025	V-3
	5.3	Tahapan dan Skala Prioritas Periode Keempat (2020-2024) RPJPD Tahun 2005-2025	V-6
	5.4	Tujuan dan Sasaran	V-11
BAB VI		STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM	
	6.1	Strategi Pembangunan Daerah	VI-1
	6.2	Arah Kebijakan Pembangunan Daerah	VI-3
	6.3	Program Prioritas	VI-10
BAB VII		KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH	VII-1
	7.1	Kerangka Pendanaan Pembangunan	VII-1
	7.2	Program Perangkat Daerah	VII-4
BAB VIII		KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	VIII-1
BAB IX		PENUTUP	IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Wilayah Administratif diperinci tiap Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-2
Tabel 2.2.	Perkembangan Hari Hujan dan Curah Hujan Tahun 2017-2021	II-5
Tabel 2.3.	Penggunaan Lahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021	II-6
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-10
Tabel 2.5.	Penduduk Kabupaten Banjarnegara menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021	II-11
Tabel 2.6.	Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan Tahun 2021	II-12
Tabel 2.7.	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan)	II-14
Tabel 2.8.	Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan)	II-15
Tabel 2.9.	Rata-rata Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Berlaku(Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara	II-17
Tabel 2.10.	Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)	II-18
Tabel 2.11.	Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021	II-18
Tabel 2.12.	Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten se-eks Karesidenan Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021	II-22
Tabel 2.13.	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022	II-23
Tabel 2.13.	Keterangan Indikator Pencapaian	II-31

Tabel 2.14.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-32
Tabel 2.15.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-35
Tabel 2.16.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Pekerjaan Umum Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-39
Tabel 2.17.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-40
Tabel 2.18.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-42
Tabel 2.19.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-44
Tabel 2.20.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-46
Tabel 2.21.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-47
Tabel 2.22.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-49
Tabel 2.23.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-50
Tabel 2.24.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-51
Tabel 2.25.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-52
Tabel 2.26.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-54
Tabel 2.27.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-56

Tabel 2.28.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-57
Tabel 2.29.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-58
Tabel 2.30.	Data Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat	II-59
Tabel 2.31.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-60
Tabel 2.32.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-61
Tabel 2.33.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-62
Tabel 2.34.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-63
Tabel 2.35.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-64
Tabel 2.36.	Capaian Kinerja Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-65
Tabel 2.37.	Capaian Kinerja Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-66
Tabel 2.38.	Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-67
Tabel 2.39.	Data Obyek Wisata di Kabupaten Banjarnegara	II-68
Tabel 2.40.	Data Sarana Dan Prasarana Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara	II-68
Tabel 2.41.	Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pertanian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-69
Tabel 2.42.	Capaian Kinerja Urusan Pilihan Perdagangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-71
Tabel 2.43.	Data Jumlah Pasar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-72
Tabel 2.44.	Capaian Kinerja Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-73
Tabel 2.45.	Capaian Kinerja Urusan Pilihan Ketransmigrasian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-74

Tabel 2.46.	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-75
Tabel 2.47.	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Pengawasan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-77
Tabel 2.48.	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Perencanaan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-79
Tabel 2.49.	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Keuangan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-81
Tabel 2.50.	Capaian Kinerja Urusan Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-82
Tabel 2.51.	Capaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021	II-82
Tabel 3.1.	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021	III-8
Tabel 3.2.	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021	III-11
Tabel 3.3.	Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021	III-16
Tabel 3.4.	Neraca Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021	III-19
Tabel 3.5.	Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021	III-23
Tabel 4.1	Perumusan Isu Strategis	IV-15
Tabel 5.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjarnegara	V-14
Tabel 6.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Prioritas	VI-13
Tabel 6.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Prioritas	VI-13
Tabel 7.1	Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah 2023-2026	VII-5
Tabel 7.2	Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022-2026	VII-6

Tabel 7.3	Tabel Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara	VII-11
Tabel 8.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara	VIII-1
Tabel 8.2	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara	VIII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1.	Peta Kabupaten Banjarnegara	II-1
Gambar 2.2.	Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021	II-7
Gambar 2.3.	Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-16
Gambar 2.4.	Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjarnegara dengan Jawa Tengah Tahun 2017-2021	II-19
Gambar 2.5.	Posisi Relatif Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-20
Gambar 2.6.	Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Banjarnegara dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-21
Gambar 2.7.	Perbandingan Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021	II-21
Gambar 2.8.	Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-24
Gambar 2.9.	Posisi Relatif Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-25
Gambar 2.10.	Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-26
Gambar 2.11.	Posisi Relatif pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-27
Gambar 2.12.	Angka Melek Huruf Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-27

Gambar 2.13.	Angka Partisipasi Kasar (%) Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-28
Gambar 2.14.	Angka Partisipasi Murni (%) Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-29
Gambar 2.15.	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran Hidup) Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-30
Gambar 2.16.	Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran Hidup) Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021	II-31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses perencanaan merupakan tindakan pengambilan keputusan di depan, mengenai apa, bagaimana, bilamana dan siapa yang berkaitan dengan sesuatu kegiatan dalam mencapai tujuannya. Dalam upaya mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, pemerintah harus menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam salah satu amanatnya adalah melaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada Tahun 2024. Menindaklanjuti amanat tersebut, kemudian diterbitkanlah Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, yang menginstruksikan agar Kabupaten/Kota menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023–2026 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten/Kota. Menurut Inmendagri tersebut, maka penyusunan RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan

memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan mengacu pada regulasi yang berlaku. Secara umum, RPD Kabupaten Banjarnegara menjadikan RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 menjadi acuan penyusunan. Selanjutnya RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

RPD Kabupaten Banjarnegara disusun dengan mengacu pada ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Sesuai ketentuan, penyusunan RPD Kabupaten Banjarnegara terdiri dari beberapa tahapan yaitu:

1. Baperlitbang menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dengan memperhatikan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
2. Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara menyusun Rancangan Renstra PD Tahun 2023-2026 sesuai Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026;
3. Baperlitbang melakukan forum konsultasi publik untuk menyerap saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah, termasuk DPRD, yang dituangkan dalam Berita Acara Forum Konsultasi Publik serta ditandatangani oleh perwakilan dari pemangku kepentingan yang hadir;
4. Penyelenggaraan forum konsultasi publik dilaksanakan sesuai dengan kondisi daerah dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas dan efisiensi;

5. Berita Acara Forum Konsultasi Publik menjadi bahan bagi penyempurnaan Rancangan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dan Rancangan Renstra PD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 sebelum diajukan untuk dilakukan fasilitasi;
6. Sebelum ditetapkan menjadi Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dilakukan fasilitasi oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
23. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
24. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 286);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

33. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arahan sekaligus menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan baik bagi Kepala Daerah beserta jajarannya, masyarakat maupun dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan Kabupaten Banjarnegara yang berkesinambungan selama periode tersebut.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026;
2. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD, serta sebagai acuan Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah.
3. Menjadi instrumen akuntabilitas dalam mewujudkan *good governance*.

1.4. Hubungan Antar Dokumen

RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, serta mengacu pada regulasi yang berlaku. Dalam penyusunannya, RPD diselaraskan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan dokumen terkait lainnya.

A. Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan penyelarasan target indikator makro dan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Selain itu, pengembangan isu-isu strategis daerah juga disusun dengan melakukan penelaahan terhadap isu-isu strategis nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 maupun kebijakan strategis nasional lainnya.

B. Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi

Pengembangan isu-isu strategis daerah tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Selain itu, untuk menjaga keselarasan perencanaan pembangunan, RPD Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan arah pengembangan wilayah dan juga dukungan Kabupaten Banjarnegara atas target-target dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

C. Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 merupakan penjabaran periode keempat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 yang memiliki visi **Banjarnegara Maju Berbasis Pertanian**. Dalam tahap keempat ini pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

D. Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 akan menjadi pedoman didalam menyusun rencana kerja tahunan di dalam periode

tersebut dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RKPD berpedoman pada RPD terkait dengan penyelarasan sasaran, strategi, kebijakan, beserta program prioritas perangkat Daerah. Selanjutnya RKPD menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah.

E. Rencana Pembangunan Daerah dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah

RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2023-2026. Renstra PD merupakan penjabaran RPD yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah Perangkat Daerah yang berfungsi untuk menentukan tujuan dan sasaran beserta indikasi program serta kegiatan Perangkat Daerah dalam rangka mendukung pencapaian RPD berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

1.5. Sistematika Penyusunan

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026, disusun berdasarkan amanat yang diatur melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

berisi latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hubungan RPD dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika penyusunan.

BAB 2 GAMBARAN UMUM

berisi gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografis dan demografis, aspek pelayanan umum, aspek kesejahteraan masyarakat, dan aspek daya saing daerah

BAB 3 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

berisi analisis kinerja keuangan historis dan kebijakan pengelolaan keuangan serta kerangka pendanaan daerah selama periode RPD Tahun 2023-2026

BAB 4 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

berisi penjelasan mengenai permasalahan pembangunan yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun isu-isu strategis Kabupaten Banjarnegara selama periode RPD Tahun 2023-2026

BAB 5 TUJUAN DAN SASARAN

berisi penjelasan tentang tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023-2026

BAB 6 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

berisi penjelasan mengenai langkah-langkah untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, serta program pembangunan daerah sebagai instrumen strategi selama periode RPD Tahun 2023-2026

BAB 7 KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

memuat indikator program pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara pada periode RPD Tahun 2023-2026 beserta kebutuhan pendanaan indikatif.

BAB 8 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

memuat berbagai indikator kinerja daerah Kabupaten Banjarnegara serta target yang harus dicapai selama periode RPD Tahun 2023-2026

BAB 9 PENUTUP

berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah setelah periode RPD berakhir.

BAB II

GAMBARAN UMUM

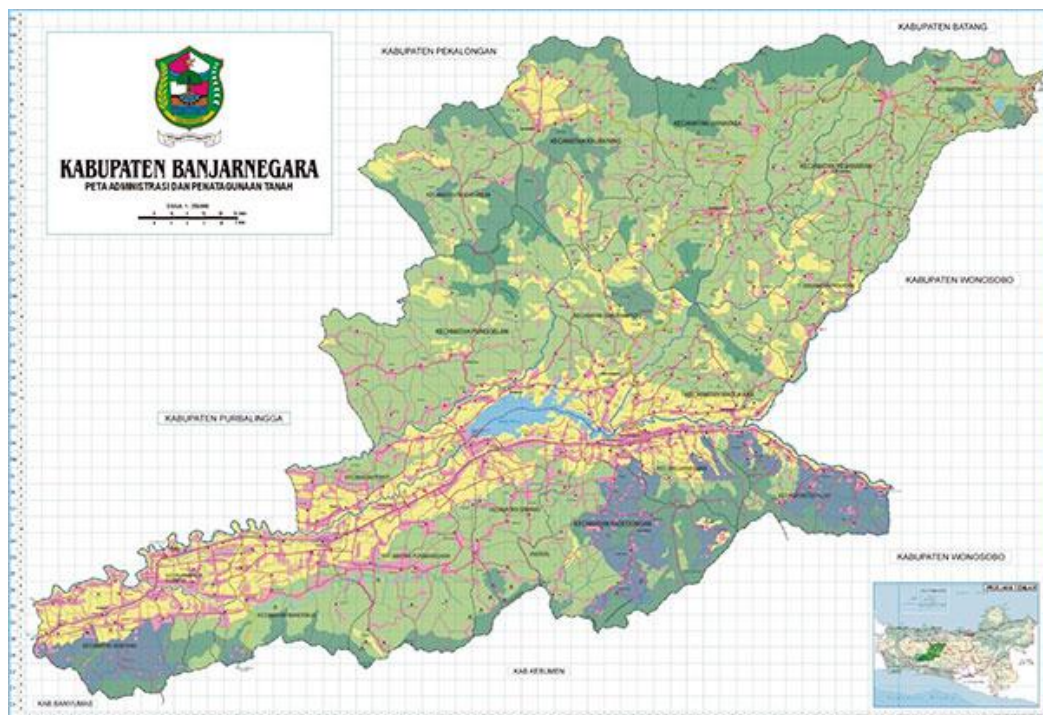
2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak, luas, dan batas wilayah

Kabupaten Banjarnegara secara geografis terletak di antara $7^{\circ}12'-7^{\circ}31'$ Lintang Selatan dan $109^{\circ}45'50''$ Bujur Timur. Kabupaten Banjarnegara memiliki luas wilayah 106.970,997 ha atau 3,29% dari luas seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta Ha). Batas-batas wilayah Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang
- ❖ Sebelah timur : Kabupaten Wonosobo
- ❖ Sebelah selatan : Kabupaten Kebumen
- ❖ Sebelah barat : Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga.



Gambar 2.1. Peta Kabupaten Banjarnegara

Tabel 2.1. Wilayah Administratif Diperinci Tiap Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah		Luas Wilayah	
	Desa	Kelurahan	Ha	%
Susukan	15	-	5.265,67	4,923
Purwareja Klampok	8	-	2.186,67	2,044
Mandiraja	16	-	5.261,58	4,919
Purwanegara	13	-	7.386,53	6,905
Bawang	18	-	5.520,64	5,161
Banjarnegara	4	9	2.624,20	2,453
Pagedongan	9	-	8.055,24	7,530
Sigaluh	14	1	3.955,95	3,698
Madukara	18	2	4.820,15	4,506
Banjarmangu	17	-	4.635,61	4,334
Wanadadi	11	-	2.827,41	2,643
Rakit	11	-	3.244,62	3,033
Punggelan	17	-	10.284,01	9,614
Karangkobar	13	-	3.906,94	3,652
Pagentan	16	-	4.618,98	4,318
Pejawaran	17	-	5.224,97	4,884
Batur	8	-	4.717,10	4,410
Wanayasa	17	-	8.201,13	7,667
Kalibening	16	-	8.377,56	7,832
Pandanarum	8	-	5.856,05	5,474
Total	266	12	106.971,00	100,00

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2021

Kabupaten Banjarnegara memiliki 20 Kecamatan yang terdiri dari 266 desa, 12 kelurahan serta terbagi dalam 970 dusun, 1.316 Rukun Warga (RW) dan 5.451 Rukun Tetangga (RT). Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara yang memiliki daerah terluas di Kabupaten Banjarnegara yaitu Kecamatan Punggelan sebesar 10.284,01 ha, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas 2.186,67 ha.

2. Kondisi topografi

Wilayah Kabupaten Banjarnegara terletak pada jalur pegunungan di bagian tengah Jawa Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke timur. Ditinjau dari ketinggiannya Kabupaten Banjarnegara secara umum terbagi menjadi empat kategori ketinggian lahan sebagai berikut:

- a. Ketinggian kurang dari 100 m dari permukaan laut sebesar 9,82%, terdapat di daerah Susukan dan Purwareja Klampok.

- b. Ketinggian 100-500 m dari permukaan laut sebesar 37,04%, terdapat di daerah Mandiraja, Rakit, Punggelan, Wanadadi, Banjarmangu, Purwanegara, Bawang, Banjarnegara, dan Madukara.
- c. Ketinggian antara 500-1.000 m dari permukaan laut sebesar 28,74%, terdapat di daerah Pagedongan, Sigaluh, dan Pagentan.
- d. Ketinggian lebih besar dari 1.000 m dari permukaan laut sebesar 24,40%, terdapat di daerah Karangobar, Pejawaran, Batur, Wanayasa, Kalibening, dan Pandanarum.

Kondisi topografi Kabupaten Banjarnegara ditinjau dari kemiringan wilayah Kabupaten Banjarnegara dikelompokkan dalam tiga kelas yaitu:

- a. Kelas lereng 1 (kemiringan 0-15%): 24,61% dari luas Kabupaten Banjarnegara, terdapat di daerah Susukan, Purwareja Klampok, Mandiraja, Purwanegara, Pagedongan, Bawang, dan Rakit.
- b. Kelas lereng 2 (kemiringan di atas 15-40%): 45,04% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu daerah Madukara, Banjarmangu, Wanadadi, Punggelan, Karangobar, Pagentan, Wanayasa, dan Kalibening.
- c. Kelas lereng 3 (Kemiringan lebih dari 40%): 30,35% dari luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yaitu Susukan, Banjarnegara, Sigaluh, Banjarmangu, Pejawaran, dan Batur.

3. Kondisi geologi

Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geologi (jenis tanah, struktur, dan gerakan tanah) yang sangat berpengaruh dalam kondisi lingkungan fisik di Kabupaten Banjarnegara. Berdasarkan kondisi geologi, wilayah Kabupaten Banjarnegara dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tanah alluvial: terdapat di Kecamatan Batur, Karangobar, Purwareja Klampok, dan Wanadadi.
- b. Tanah latosol: terdapat di Kecamatan Susukan, Purwareja Klampok, Purwanegara, Wanadadi, Rakit, Bawang, Sigaluh,

Madukara, Banjarnegara, Wanayasa, Pejawaran, dan Pagentan.

- c. Tanah andosol: terdapat di Kecamatan Kalibening, Wanayasa, Pejawaran, dan Batur.
 - d. Tanah grumol: terdapat di Kecamatan Purwanegara, Mandiraja, Kalibening, Karangobar, Pagentan, dan Banjarnegara.
 - e. Tanah organosol: terdapat di Kecamatan Batur.
 - f. Tanah litosol: terdapat di Kecamatan Banjarnegara dan Punggelan.
 - g. Formasi endapan: Banjarnegara termasuk wilayah jalur fisiografi pegunungan Serayu Selatan. Adapun stratigrafi daerah terdiri dari batuan yang tertua yaitu batuan molion yang terdiri dari sekis kristalin, sabak, serpil hitam, filit, kwarsit, dan batu gamping.
 - h. Formasi batuan:
 - Batuan grewake dan lempung hitam tersingkap di daerah Kalitengah sampai Merden
 - Batuan metasedimen tersingkap di daerah Kalitengah hingga daerah Kebutuhan Duwur.
 - i. Batuan filit dan sekis singkapannya banyak ditemukan di lereng selatan pegunungan Serayu Selatan.
4. Kondisi hidrologi
- Wilayah kabupaten Banjarnegara termasuk dalam wilayah aliran Sungai Serayu, Pekacangan, Gintung, Merawu, dan Sungai Tulis dengan anak-anak sungainya. Sifat sungai tersebut umumnya adalah preial (mengalir sepanjang tahun) dan merupakan bagian DAS (Daerah Aliran Sungai) Serayu. Berikut merupakan jumlah mata air dan sungai yang mengalir di daerah resapan Kabupaten Banjarnegara:
- a. Kecamatan Rakit: memiliki 42 mata air yang dialiri oleh Sungai Serayu dan Pekacangan.
 - b. Kecamatan Punggelan: memiliki 6 mata air yang dialiri oleh Sungai Pekacangan, Kedawung, Pandanaran, Wujil, Cacaban, dan Gintung.

- c. Kecamatan Wanadadi: memiliki 4 mata air yang dialiri oleh Sungai Serayu dan Pekacangan.
 - d. Banjarmangu: memiliki 9 mata air yang dialiri Pekacangan, Serayu, Merawu, Kandangwangi, dan Lumajang.
 - e. Madukara: memiliki 20 mata air yang dialiri Serayu, Merawu, Langkrang, dan Bangbang.
 - f. Pagentan: memiliki 9 mata air yang dialiri Merawu, Bojong, dan Jawar.
 - g. Pejawaran: memiliki 13 mata air yang dialiri oleh sungai Bojong, Penaraban, Putih, dan Dalak.
5. Kondisi klimatologi

Wilayah Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis, musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun. Bulan basah umumnya lebih banyak dari bulan kering. Curah hujan tertinggi pada tahun 2021 terjadi di Kecamatan Wanadadi sebanyak 5.473 mm per tahun dengan jumlah hari hujan 224 hari, sedangkan curah hujan terendah terjadi di Kecamatan Kalibening sebesar 745 mm per tahun dengan hari hujan 43 hari.

Tabel 2.2. Perkembangan Hari Hujan dan Curah Hujan Tahun 2017-2021

Bulan	2017		2018		2019		2020		2021	
	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan	Hari Hujan	Curah Hujan
Januari	24	596	22	494	19	279	22	406		
Februari	19	433	21	370	14	232	19	120		
Maret	13	256	20	280	19	312	20	523		
April	18	508	19	396	21	428	24	465		
Mei	11	238	17	320	14	226	12	156		
Juni	3	59	16	275	10	216	4	52		
Juli	0.5	2	14	281	14	206	14	1		
Agustus	0,11	0,5	4	17	5	63	5	0,75		
September	0,11	1	4	20	2	5	2	0,5		
Oktober	10	223	9	199	7	111	7	1		
November	21	659	17	288	23	647	23	20		
Desember	27	632	21	529	25	694	26	22		
Jumlah	147	3.607	184	3.469	159	3.419	178	1.767		
Rata-rata	12	301	15	289	13	285	15	147		

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2017-2021 (diolah)

6. Penggunaan lahan

Luas wilayah Kabupaten Banjarnegara tercatat 106.970,997 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah (3,25 juta ha). Penggunaan lahan menurut

jenisnya di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2021 dibagi menjadi 3 yaitu lahan sawah, bukan lahan sawah, dan lahan bukan pertanian. Lahan sawah di Kabupaten Banjarnegara mempunyai luas 14.269 ha atau 13,34% dari wilayah keseluruhan Kabupaten Banjarnegara dan lahan bukan sawah sebesar 72.789 ha atau 68,05% dari total luas Kabupaten, sedangkan lahan bukan pertanian sebesar 19.913 ha atau 18,62%. Perincian penggunaan lahan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Penggunaan Lahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

Penggunaan Lahan	Tahun				
	2017	2018	2019	2020	2021
I. Lahan Sawah	14.128	14.128	14.054	14.049	
a. Lahan Irigasi	11.135	11.135	11.046	11.101	
b. Lahan Tadah Hujan	2.939	2.939	2.942	2.883	
c. Lahan Pasang Surut	54	54	66	65	
d. Lebak/Polder, Lainnya	73.765	73.765	74.508	72.140	
II. Bukan Lahan Sawah	44.538	44.538	45.899	42.820	
a. Tegal/Kebun	3.194	3.194	2.799	3.089	
b. Perkebunan(Negara/ Swasta)	7.401	7.401	6.609	7.363	
c. Hutan Rakyat	18.621	18.621	19.189	18.857	
d. Kolam/Tebat/Empang	11	11	11	11	
e. Lainnya	19.079	19.079	18.410	20.783	
f. Lahan Yang Tidak Diusahakan	106.971	106.972	106.972	106.972	
III. Lahan Bukan Pertanian	19.079	19.079	18.410	20.783	
Jumlah (I+II+III)	106.971	106.972	106.972	106.972	

Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2021

Lahan Sawah terdiri dari lahan irigasi, lahan tadah hujan, dan lahan pasang surut. Luas penggunaan lahan terbesar di lahan sawah yaitu lahan irigasi dengan luas 11.021 ha. Sedangkan bukan lahan sawah terdiri dari tegal/kebun, perkebunan (negara/swasta), hutan rakyat, kolam/tebat/empang, lainnya, dan lahan yang tidak diusahakan. Luas bukan lahan sawah terbesar yaitu tegal/kebun dengan luas 45.488 ha. Lahan bukan pertanian terdiri dari bangunan/pekarangan, hutan negara, rawa-rawa tidak ditanami padi, dan lainnya.

Persentase penggunaan lahan di Kabupaten Banjarnegara disajikan sebagai berikut:



Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2021

Gambar 2.2. Persentase Penggunaan Lahan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Banjarnegara Tahun 2011-2031, potensi wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, dan permukiman. Potensi kawasan hutan produksi terbatas di Kabupaten Banjarnegara lebih kurang 15.368 hektar, sedangkan hutan produksi tetap seluas kurang lebih 14.989 hektar. Kawasan hutan rakyat meliputi: Kecamatan Banjarmangu, Banjarnegara, Batur, Bawang, Kalibening, Karangkobor, Madukara, Mandiraja, Pagedongan, Pagentan, Pandanarum, Pejawaran, Punggelan, Purwanegara, Purwareja Klampok, Rakit, Sigaluh, Susukan, Wanadadi, dan Wanayasa.

Potensi pengembangan tanaman Hortikultura kurang lebih 56.573 hektar tersebar di seluruh kecamatan, meliputi Banjarmangu, Banjarnegara, Batur, Bawang, Kalibening, Karangkobor, Madukara, Mandiraja, Pegedongan, Pagentan, Pandanarum, Pejawaran, Punggelan, Purwanegara, Purwareja Klampok, Rakit, Sigaluh, Susukan, Wanadadi, dan Wanayasa.

Potensi kawasan untuk pertambangan di Kabupaten Banjarnegara untuk kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara terdiri dari mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara. Mineral logam terdapat di Kecamatan Banjarmangu, Pegentan, Karangkobor, Batur, Pejawaran,

Wanayasa, Kalibening, Pandanarum, Punggelan, Sigaluh, Pagedongan, Bawang, Purwanegara, dan Susukan. Mineral bukan logam di Kabupaten Banjarnegara terdapat pula di seluruh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Banjarnegara. Batuan di Kabupaten Banjarnegara terdiri atas batuan trass (Kecamatan Karangobar, Sigaluh, Wanayasa, Punggelan, Pagentan, dan Pejawaran), batuan marmer (Kecamatan Bawang, Pagedongan, Purwanegara, dan Banjarnegara), batu lempeng (Kecamatan Pejawaran), batu granit (Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Banjarmangu, Karangobar, Pagentan, dan Sigaluh), batu gemping (Kecamatan Bawang, Banjarnegara, Punggelan, Wanayasa, dan Pejawaran), lempung (Kecamatan Mandiraja, Banjarnegara, Banjarmangu, Punggelan, Wanayasa, Karangobar, Kalibening, Pagentan, dan Pejawaran), batu tulis (Kecamatan Purwanegara), andesit (Kecamatan Sigaluh, Banjarmangu, Kalibening, Karangobar, dan Pagentan), diorite (Kecamatan Bawang, Banjarmangu, Wanayasa, Pagentan, dan Karangobar), Pasir dan Batu meliputi Sepanjang Sungai serayu, sepanjang Sungai Merawu, sepanjang Sungai Pekacangan, sepanjang Sungai Brukah, sepanjang Sungai Sapi, sepanjang Sungai Bombong, sepanjang Sungai Tulis, dan sepanjang Sungai Bermali. Kawasan peruntukan Batubara terletak di Kecamatan Karangobar.

Potensi Kawasan peruntukan industri terdiri atas industri besar, industri menengah dan industri kecil. Industri besar dan menengah yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berlokasi di Kecamatan Susukan dengan luas kurang lebih 77,5 hektar. Industri kecil terdapat di seluruh wilayah yang tersebar di Kabupaten Banjarnegara.

Potensi kawasan pariwisata di Kabupaten Banjarnegara meliputi kawasan wisata alam, kawasan pariwisata budaya, dan kawasan wisata buatan. Kawasan pariwisata alam terletak di kawasan dataran tinggi Dieng, kawasan wisata arung jeram Sungai Serayu, kawasan wisata Gunung Lawe, kawasan wisata alam Curug Pitu, kawasan wisata Curug Sikopel, kawasan wisata Gunung Mandala, kawasan wisata pemandian air panas, dan kawasan wisata hutan pinus di Kecamatan Pagedongan. Kawasan pariwisata

budaya terletak di kawasan Candi Dieng, kawasan wisata sentra seni kerajinan Klampok, dan kawasan wisata sentra batik di Kecamatan Susukan. Kawasan pariwisata buatan terletak di kawasan wisata Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas (TRMS), kawasan wisata Waduk Panglima Besar Jenderal Sudirman, dan kawasan agrowisata hortikultura.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Jenis bencana alam di Kabupaten Banjarnegara yang rawan terjadi yaitu longsor, gas beracun, kekeringan, dan banjir. Daerah-daerah rawan bencana dapat dipetakan sebagai berikut:

1. Kawasan rawan longsor. Mayoritas wilayah di Kabupaten Banjarnegara merupakan kawasan/daerah rawan bencana longsor. Dari 20 kecamatan, yang daerahnya tidak termasuk kategori rawan longsor, yaitu Kecamatan Rakit, Wanadadi, Purwareja Klampok, dan Banjarnegara.
2. Kawasan rawan gas beracun meliputi:
 - a). Kecamatan Batur
 - b). Kecamatan Wanayasa
 - c). Kecamatan Pejawaran.
3. Kawasan rawan kekeringan meliputi:
 - a). Kecamatan Susukan
 - b). Kecamatan Mandiraja
 - c). Kecamatan Purwanegara
 - d). Kecamatan Bawang
 - e). Kecamatan Punggelan
 - f). Kecamatan Pagedongan
 - g). Kecamatan Madukara.
4. Kawasan termasuk rawan banjir meliputi:
 - a). Kecamatan Kalibening
 - b). Kecamatan Pejawaran
 - c). Kecamatan Susukan
 - d). Kecamatan Purwareja Klampok.

2.1.4. Kondisi Demografis

1. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk di wilayah Kabupaten Banjarnegara tahun 2021 sebanyak 1.040.008 jiwa, yang berarti mengalami

kenaikan sebesar 22.241 jiwa atau sebesar 2.24% persen dari jumlah penduduk akhir tahun 2020 sebanyak 1.017.767 jiwa. Tabel berikut ini menyajikan jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Banjarnegara:

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Penduduk			Sex Rasio %
	Pria	Wanita	Total	
SUSUKAN	32.510	31.939	64.449	6,2%
PURWAREJA KLAMPOK	24.330	24.041	48.371	4,65%
MANDIRAJA	40.620	39.793	80.413	7,73%
PURWANEGARA	42.253	41.601	83.854	8,06%
BAWANG	32.833	31.934	64.767	6,23%
BANJARNEGARA	35.284	34.873	70.157	6,75%
SIGALUH	16.361	16.047	32.408	3,12%
MADUKARA	23.717	22.789	46.506	4,47%
BANJARMANGU	23.928	22.711	46.639	4,48%
WANADADI	17.501	17.128	34.629	3,33%
RAKIT	27.933	27.294	55.227	5,31%
PUNGCELAN	45.948	43.816	89.764	8,63%
KARANGKOBAR	16.592	15.497	32.089	3,09%
PAGENTAN	20.065	19.052	39.117	3,76%
PEJAWARAN	23.305	21.710	45.015	4,33%
BATUR	21.478	20.146	41.624	4%
WANADADI	26.363	24.568	50.931	4,9%
KALIBENING	24.242	23.163	47.405	4,56%
PANDANARUM	11.911	11.364	23.275	2,24%
PAGEDONGAN	22.269	21.099	43.368	4,17%
Jumlah 2021	529.443	510.565	1.040.008	0.00

Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara

Penduduk di Kabupaten Banjarnegara menurut umur, strukturnya terlihat lebih unik. Jumlah penduduk paling tinggi berada pada kelompok umur 10-14 tahun yaitu sebesar 84.397 jiwa. Di sisi lain, terjaganya postur jumlah penduduk pada tiap

kelompok umur dapat menjadi indikasi keberhasilan program pengendalian jumlah penduduk melalui Keluarga Berencana (KB) yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah peserta KB aktif.

Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara berdasarkan rentang usia dan jenis kelamin disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5. Penduduk Kabupaten Banjarnegara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2021

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Pria	Wanita	Jumlah
0 – 4	37,030	34,994	72,024
5 – 9	43,332	40,725	84,057
10 – 14	43,349	41,048	84,397
15 – 19	36,607	35,266	71,873
20 – 24	41,135	39,549	80,684
25 – 29	43,005	40,413	83,418
30 – 34	39,571	37,035	76,606
35 – 39	43,077	40,955	84,032
40 – 44	39,542	37,670	77,212
45 – 49	35,161	35,514	70,675
50 – 54	31,928	32,434	64,362
55 – 59	28,490	29,484	57,974
60 – 64	23,910	23,942	47,852
65 – 69	18,293	16,860	35,153
70 – 74	11,448	11,120	22,568
75 +	13,565	13,556	27,121
Jumlah 2021	529,443	510,565	1,040.008

Sumber : Dindukcapil Kab. Banjarnegara

Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Banjarnegara sebesar 41,75% yang berarti bahwa struktur kependudukan di Kabupaten Banjarnegara mengarah pada proporsi penduduk usia produktif yang lebih besar. Kondisi ini menuju pada pencapaian bonus demografi, yaitu percepatan

pertumbuhan ekonomi akibat berubahnya struktur umur penduduk yang ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*) penduduk non-usia kerja kepada penduduk usia kerja. Perubahan struktur ini memungkinkan bonus demografi tercipta karena meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*), tabungan (*saving*), dan kualitas sumber daya manusia (*human capital*). Kondisi tersebut menguntungkan dalam menggerakkan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara. Untuk mencapai hal tersebut, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan keahlian tenaga kerja diharapkan perlu diupayakan agar tenaga kerja produktif mampu menghadapi persaingan kerja yang kian kompetitif.

2. Kepadatan penduduk

Kecamatan Banjarnegara, Purwareja Klampok, dan Rakit adalah kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi, masing-masing dengan jumlah kepadatan penduduk 2.610 jiwa per km², 2.154 jiwa per km² dan 1.647 jiwa per km². Sementara itu kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya rendah adalah Kecamatan Pandanarum dan Pagedongan, yakni sebesar 394 per km² dan 519 per km². Secara umum tingkat kepadatan penduduk sebesar 937 jiwa/km², yang berarti bahwa setiap 1 km² luas wilayah Kabupaten Banjarnegara, dihuni oleh sekitar 937 orang. Berikut ditampilkan jumlah dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan pada tahun 2016.

Tabel 2.6. Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2021

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
SUSUKAN	52.66	64,449	1,224
PURWAREJA KLAMPOK	21.87	48,371	2,212
MANDIRAJA	52.62	80,413	1,528
PURWANEGARA	73.87	83,854	1,135
BAWANG	55.21	64,767	1,173
BANJARNEGARA	26.24	70,157	2,674
SIGALUH	39.56	32,408	819
MADUKARA	48.20	46,506	965
BANJARMANGU	46.36	46,639	1,006
WANADADI	28.27	34,629	1,225
RAKIT	32.45	55,227	1,702

Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
PUNGCELAN	102.84	89,764	873
KARANGKOBAR	39.07	32,089	821
PAGENTAN	46.19	39,117	847
PEJAWARAN	52.25	45,015	862
BATUR	47.17	41,624	882
WANAYASA	82.01	50,931	621
KALIBENING	83.78	47,405	566
PANDANARUM	58.56	23,275	397
PAGEDONGAN	80.55	43,368	538
Jumlah	1.069.73	1,040,008	972

Sumber : Dindukcapil Kab. Banjarnegara

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Berdasarkan lapangan usaha, PDRB Kabupaten Banjarnegara terbagi atas 17 sektor usaha, dimana sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi perekonomian di Kabupaten Banjarnegara. Kontribusi lapangan usaha terbesar sektor usaha terhadap struktur PDRB (atas dasar harga berlaku) di Kabupaten Banjarnegara yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 31,54%, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor sebesar 14,96%, disusul industri pengolahan 14,38%. Sedangkan sektor usaha dengan kontribusi terkecil dalam pembentukan struktur PDRB (atas dasar harga berlaku) adalah sektor pengadaan listrik dan gas sebesar 0,03%, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 0,04%, dan sektor jasa perusahaan sebesar 0,37%.

PDRB Kabupaten Banjarnegara, baik atas dasar harga konstan dan atas dasar harga berlaku selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan)

Kategori	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.972.652,45	29,08	4.118.607,41	28,53	4.264.176,29	27,97	4.389.953,93	29,18		
B	Pertambangan dan Penggalian	741.872,35	5,43	765.986,89	5,31	790.944,77	5,19	793.909,86	5,28		
C	Industri Pengolahan	1.847.971,20	13,53	1.966.571,95	13,62	2.104.761,28	13,80	2.068.493,89	13,75		
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.850,17	0,04	5.108,55	0,04	5.433,41	0,04	5.550,55	0,04		
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.523,78	0,05	6.835,96	0,05	7.133,53	0,05	7.292,20	0,05		
F	Konstruksi	954.457,45	6,99	1.012.812,31	7,01	1.066.573,51	7,00	1.064.512,98	7,08		
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.291.386,59	16,77	2.430.271,16	16,83	2.579.708,91	16,92	2.455.384,83	16,32		
H	Transportasi dan Pergudangan	586.261,70	4,29	626.653,63	4,34	670.732,58	4,40	477.709,93	3,18		
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	286.187,09	2,09	311.433,82	2,16	339.823,97	2,23	318.745,54	2,12		
J	Informasi dan Komunikasi	515.851,36	3,80	578.668,73	4,00	642.841,16	4,22	716.460,88	4,76		
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	391.798,94	2,87	406.491,83	2,82	420.078,32	2,76	429.239,83	2,85		
L	Real Estate	245.190,71	1,79	258.798,65	1,79	271.345,51	1,78	270.173,76	1,80		
M,N	Jasa Perusahaan	52.725,04	0,39	57.507,70	0,40	63.507,12	0,42	59.105,08	0,39		
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	479.847,80	3,51	491.854,99	3,41	504.081,74	3,31	496.673,30	3,30		
P	Jasa Pendidikan	774.645,35	5,67	838.809,95	5,81	902.906,52	5,92	897.457,01	5,96		
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	179.629,26	1,31	196.374,75	1,36	210.084,54	1,38	223.923,88	1,49		
R,S,T,U	Jasa lainnya	331.415,41	2,43	365.361,46	2,53	402.732,50	2,64	371.297,54	2,47		
Produk Domestik Regional Bruto		13.663.266,65	100	14.438.149,74	100	15.246.865,66	100	15.045.884,99	100	100	

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

*Data 2021 baru akan dirilis akhir Februari 2021

Tabel 2.8. Nilai dan Kontribusi Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan)

Kategori	Sektor	2017		2018		2019		2020		2021*	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.604.516,48	30,19	5.931.266,92	29,53	6.305.575,79	29,19	6.633.209,89	30,58		
B	Pertambangan dan Penggalian	1.166.510,64	6,28	1.259.727,22	6,27	1.269.251,85	5,88	1.299.990,77	5,99		
C	Industri Pengolahan	2.766.423,78	14,90	3.023.574,63	15,06	3.281.804,29	15,19	3.289.309,43	15,16		
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.997,73	0,03	6.511,04	0,03	6.952,98	0,03	7.051,80	0,03		
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7.327,34	0,04	7.674,80	0,04	8.190,53	0,04	8.808,15	0,04		
F	Konstruksi	1.281.590,00	6,90	1.427.921,54	7,11	1.558.780,99	7,22	1.561.730,71	7,20		
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.771.925,80	14,93	3.006.736,09	14,97	3.272.612,16	15,15	3.139.231,32	14,47		
H	Transportasi dan Pergudangan	683.792,97	3,68	737.074,28	3,67	802.578,18	3,72	590.362,98	2,72		
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	351.164,39	1,89	385.943,66	1,92	427.976,87	1,98	405.064,10	1,87		
J	Informasi dan Komunikasi	496.808,13	2,70	555.607,83	2,80	628.685,72	2,91	701.396,75	3,23		
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	548.813,67	2,96	593.478,93	2,96	618.392,92	2,86	631.068,10	2,91		
L	Real Estate	288.532,83	1,55	312.478,91	1,56	332.041,26	1,54	332.017,81	1,53		
M,N	Jasa Perusahaan	70.061,63	0,38	78.353,32	0,39	90.183,31	0,42	85.739,38	0,40		
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	679.361,10	3,66	718.146,47	3,58	735.090,04	3,40	732.617,71	3,38		
P	Jasa Pendidikan	1.187.851,62	6,40	1.315.588,62	6,55	1.457.260,31	6,75	1.480.564,68	6,82		
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	242.737,82	1,31	268.837,01	1,34	293.633,78	1,36	320.317,35	1,48		
R,S,T,U	Jasa lainnya	410.807,73	2,21	454.114,42	2,26	510.466,28	2,36	475.858,04	2,19		
Produk Domestik Regional Bruto											

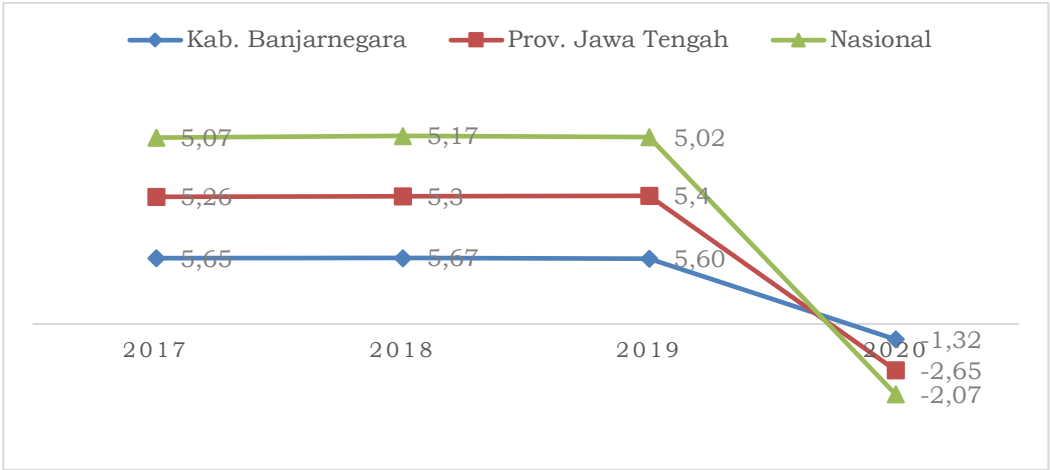
Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

*Data 2021 baru akan dirilis akhir Februari 2021

2. Laju pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk menghitung kinerja perekonomian pada suatu tahun fiskal dengan menggunakan rumusan pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara cenderung dinamis dalam kurun waktu tahun 2017-2021. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara tercatat sebesar 5,41%, mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2019 sebesar 5,47%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sebesar 5,28% di tahun 2020.

Data perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan nasional selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.3. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

Pertumbuhan lapangan usaha di dalam struktur perekonomian Kabupaten Banjarnegara secara rata-rata paling besar disumbang oleh kategori informasi dan komunikasi serta jasa pendidikan. Sedangkan lapangan usaha yang secara rata-rata tumbuh paling kecil adalah lapangan usaha kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Data rata-rata pertumbuhan lapangan usaha dalam PDRD selama lima tahun terakhir disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9. Rata-rata Pertumbuhan Lapangan Usaha dalam PDRB Tahun 2017-2021 atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2010 Kabupaten Banjarnegara

Kategori	Lapangan Usaha	Rata-rata Pertumbuhan	
		Hb	Hk
		%	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8,08	2,36
B	Pertambangan dan Penggalian	12,82	5,21
C	Industri Pengolahan	13,06	7,75
D	Pengadaan Listrik dan Gas	14,81	10,67
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,33	2,01
F	Konstruksi	10,79	6,25
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,96	5,86
H	Transportasi dan Pergudangan	10,87	7,88
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	11,01	6,77
J	Informasi dan Komunikasi	9,07	10,92
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	11,43	6,06
L	Real Estate	10,07	7,31
M,N	Jasa Perusahaan	12,23	8,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9,29	2,82
P	Jasa Pendidikan	16,97	10,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	14,25	8,98
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,45	6,18
Produk Domestik Regional Bruto		10,25	5,37

Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara (diolah)

3. Laju inflasi

Laju inflasi yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara cenderung mengalami penurunan pada kurun waktu 2017-2021. Pada tahun 2020 laju inflasi di Kabupaten Banjarnegara mengalami penurunan menjadi sebesar 1,9%. Kenaikan harga terbesar disumbang oleh kelompok komoditas kesehatan dan bahan makanan. Laju inflasi bulanan memiliki pola yang hampir sama, terutama pada kenaikan bulan Maret, Juni, Juli dan November. Pola tersebut menunjukkan bahwa kenaikan dan penurunan harga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu musim dan tidak seimbangny antara permintaan dan penawaran suatu barang (misalnya saat panen, menjelang hari raya, dan tahun ajaran baru).

Perbandingan laju inflasi Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10. Laju Inflasi Kabupaten Banjarnegara dibandingkan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021 (%)

Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Banjarnegara	3.67	3.04	2.68	1.90	
Jawa Tengah	3.71	2.82	2.81	1.56	
Nasional	3.61	3.13	2.72	1.68	

Sumber: Indeks Harga Konsumen Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 dan BPS Provinsi Jawa Tengah

4. PDRB per kapita

PDRB perkapita penduduk Kabupaten Banjarnegara dapat menggambarkan secara relatif tingkat kesejahteraan masyarakat. Besarnya PDRB per kapita (ADHB) di Kabupaten Banjarnegara dalam kurun lima tahun menunjukkan peningkatan dari sebesar Rp. 15,9 juta pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp. 21,9 juta pada tahun 2020. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa perkembangan PDRB Perkapita di Kabupaten Banjarnegara cukup baik. Besarnya PDRB per kapita (ADHK) di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 tercatat sebesar Rp. 9.952.403,66 menjadi sebesar Rp. 12.262.427,80 pada tahun 2015.

Tabel 2.11. Perkembangan PDRB Perkapita Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017- 2020

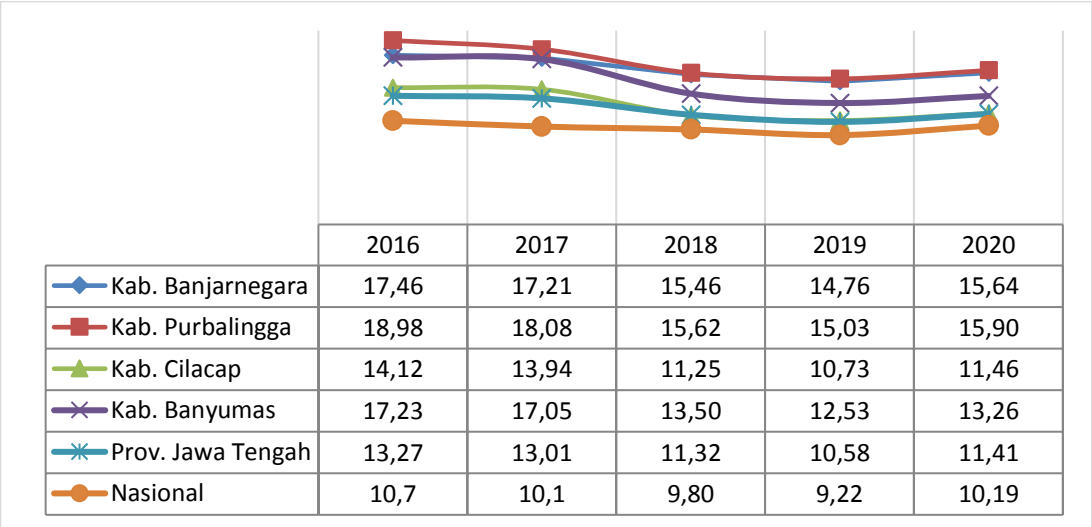
Tahun	PDRB per Kapita (ADHB)	PDRB per Kapita (ADHK)
2017	15.995.894,10	12.262.427,80
2018	11.533.728,14	10.473.363,43
2019	12.751.207,07	11.043.083,01
2020	21.977.045,03	21.977.045,03
2021		

Sumber : Pendapatan Regional Kabupaten Banjarnegara 2015

5. Persentase penduduk miskin

Salah satu indikator keberhasilan pembangunan adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa menurun pula jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2016 persentase penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara sebesar 17,46%, turun bila dibandingkan tahun 2015 yang tercatat sebesar 18,37%. Tingkat kemiskinan Kabupaten Banjarnegara masih berada di atas rata-rata Jawa Tengah yang tercatat 13,27%. Jumlah penduduk miskin selama kurun waktu tahun 2017-2021 menunjukkan penurunan dari sebanyak 164.000 jiwa menjadi 158.200 jiwa. Upaya penanggulangan kemiskinan dilaksanakan

melalui berbagai program pengentasan kemiskinan baik yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, provinsi maupun APBD Kabupaten Banjarnegara. Grafik perbandingan persentase penduduk miskin disajikan dalam tabel berikut:

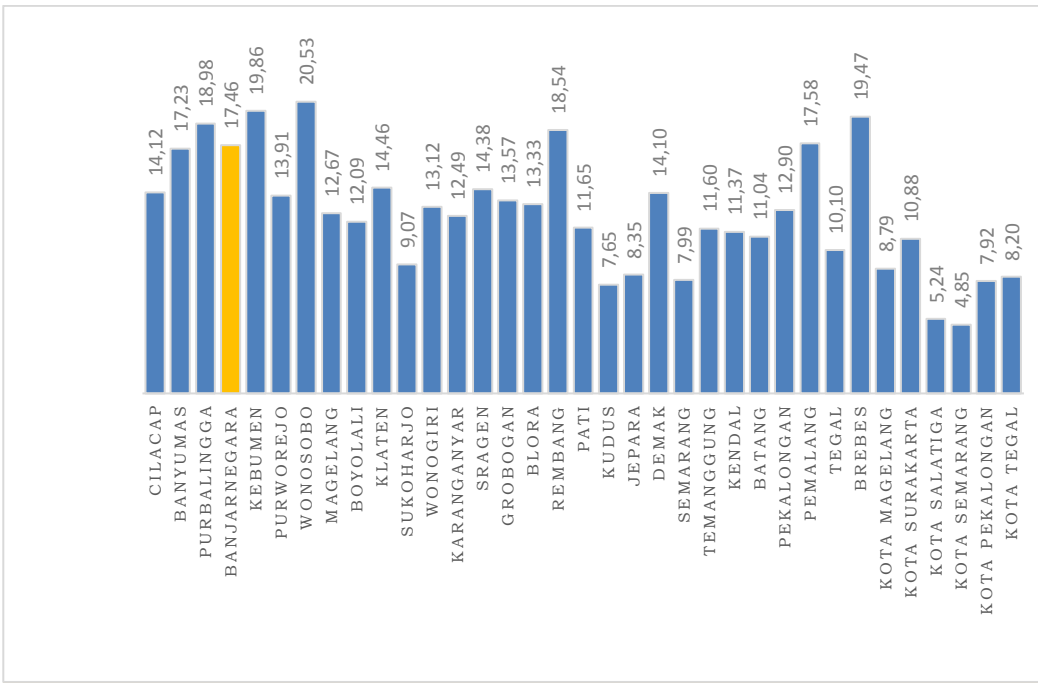


Sumber: BPS Kabupaten Banjarnegara

Gambar 2.4. Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banjarnegara dengan Jawa Tengah Tahun 2017-2021

Banjarnegara menduduki peringkat ketujuh sebagai Kabupaten dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Secara umum, kabupaten di wilayah eks-Karesidenan Banyumas merupakan penyumbang tertinggi angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah dengan rata-rata tingkat kemiskinan sebesar 16,95%.

Posisi Kabupaten Banjarnegara bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Jawa Tengah ditampilkan pada tabel berikut ini:



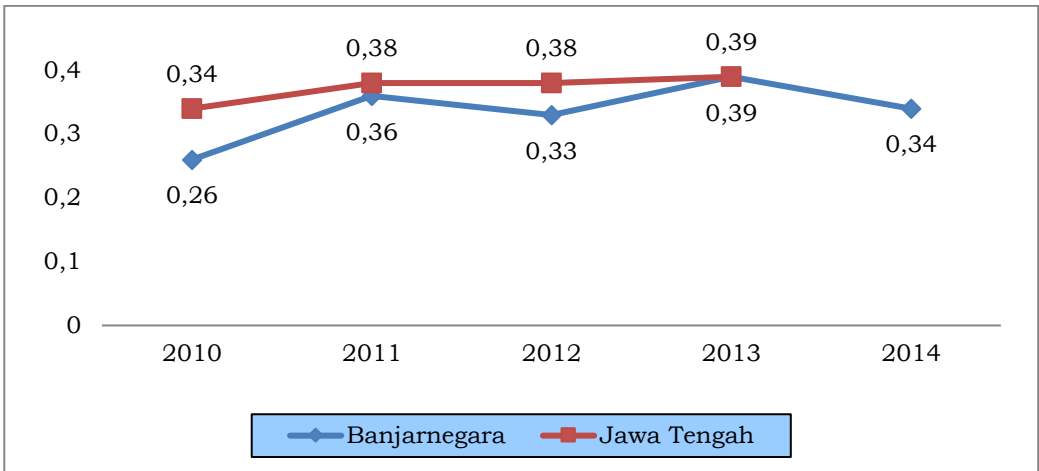
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.5. Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021

6. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, Koefisien Gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Koefisien Gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk.

Tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Banjarnegara setiap tahunnya mengalami trend peningkatan. Ini berarti bahwa masih terdapat kesenjangan pendapatan antar penduduk yang cukup mencolok, digambarkan dengan angka indeks gini pada tahun 2014 sebesar 0,34, cenderung meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2010 hanya sebesar 0,26.

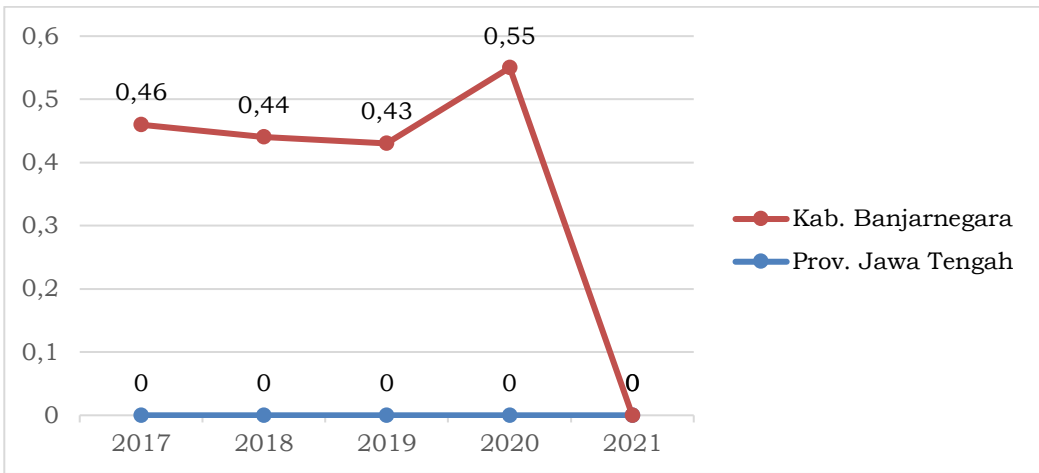


Sumber : Indikator Utama Sosial, Politik dan Keamanan Jawa Tengah, 2015

Gambar 2.6. Perbandingan Indeks Gini Kabupaten Banjarnegara dengan Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2021

7. Indeks Williamson

Dari hasil pengolahan Indeks Williamson PDRB, tingkat disparitas antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2010-2014 cenderung stabil. Tingkat ketimpangan antar kecamatan di Kabupaten Banjarnegara tergolong rendah atau cenderung merata. Faktor yang mempengaruhi peningkatan disparitas pendapatan antar kecamatan yaitu pertumbuhan kecamatan yang berbeda. Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah, seperti terlihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Pemerataan Pendapatan Kab. Banjarnegara 2014

Gambar 2.7. Perbandingan Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara dan Jawa Tengah Tahun 2017-2021

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar : (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Mulai tahun 2014 dengan metode perhitungan yang baru indikator pembentuk IPM meliputi angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran perkapita disesuaikan.

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 dengan metode penghitungan yang baru terjadi trend peningkatan IPM dari sebesar 62,29 pada tahun 2012 menjadi 65,52 pada tahun 2016, seperti terlihat pada gambar berikut:

Tabel 2.12. Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Banjarnegara, kabupaten se-eks karesidenan Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional Tahun 2021

Kabupaten/ Provinsi	Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	IPM
Banjarnegara	74.28	11.63	6.75	940.700	67.86
Purbalingga	73.31	12.00	7.25	1.003.200	69.15
Banyumas	73.80	13.03	7.63	1.154.600	72.44
Cilacap	73.90	12.63	7.09	1.053.400	70.42
Jawa Tengah	74.47	12.77	7.75	1.103.400	72.16
Nasional	71.57	13.08	8.54	1.115.600	72.29

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Perkembangan kinerja indikator pembentuk IPM Kabupaten Banjarnegara tergambarkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.13. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup (tahun)	73,79	73,91	74.01	74,18	74.28
Harapan Lama Sekolah (tahun)	11,41	11,42	11.45	11,46	11.68
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	6,27	6,28	6.50	6,74	6.75
Pengeluaran Riil Perkapita (ribu rupiah)	8.630	9.160	9.547	9.263	9.407
IPM	65,86	66,54	67.34	67,45	67.86
Prov. Jateng	70.52	71.12	71.73	71.87	72. 16

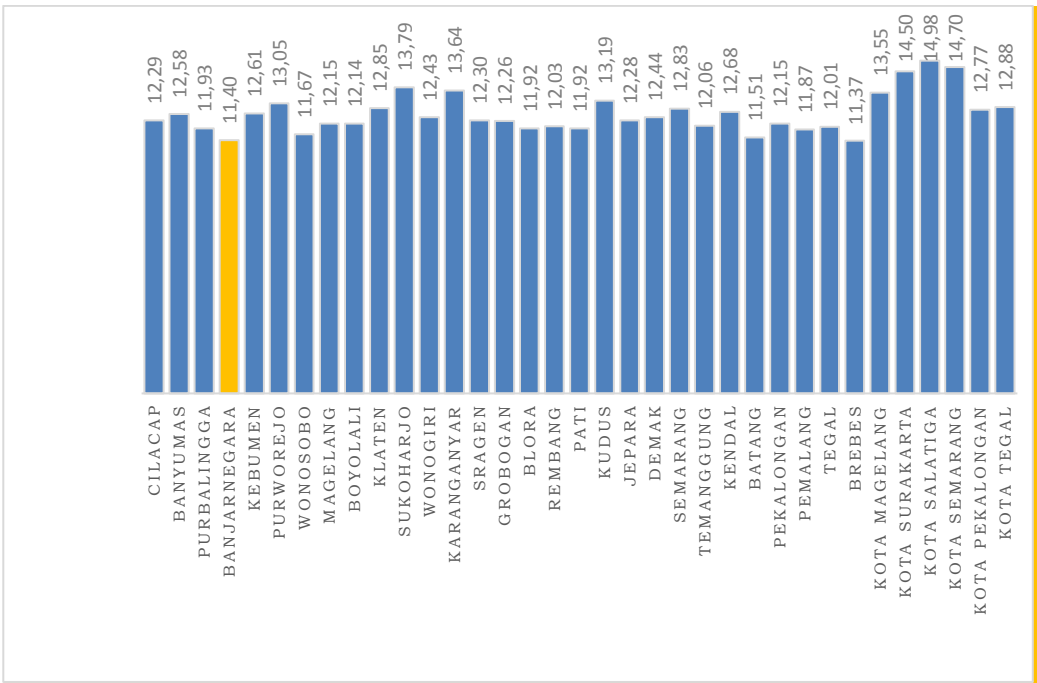
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Penjelasan masing-masing indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia diuraikan sebagai berikut:

a. Harapan lama sekolah

Angka harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan lama sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan.

Harapan lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2012 adalah 10,22 tahun, mengalami peningkatan hingga tahun 2016 menjadi tercatat sebesar 11,40 tahun. Meskipun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan ini relatif tidak banyak. Angka harapan lama sekolah sebesar 11,40 berarti bahwa rata-rata masyarakat Kabupaten Banjarnegara mempunyai harapan menempuh pendidikan selama 11,40 tahun di masa yang akan datang atau setara dengan kelas III SMA. Berikut ini disajikan perbandingan harapan lama sekolah Kabupaten Banjarnegara dengan kabupaten/kota di sekitarnya.



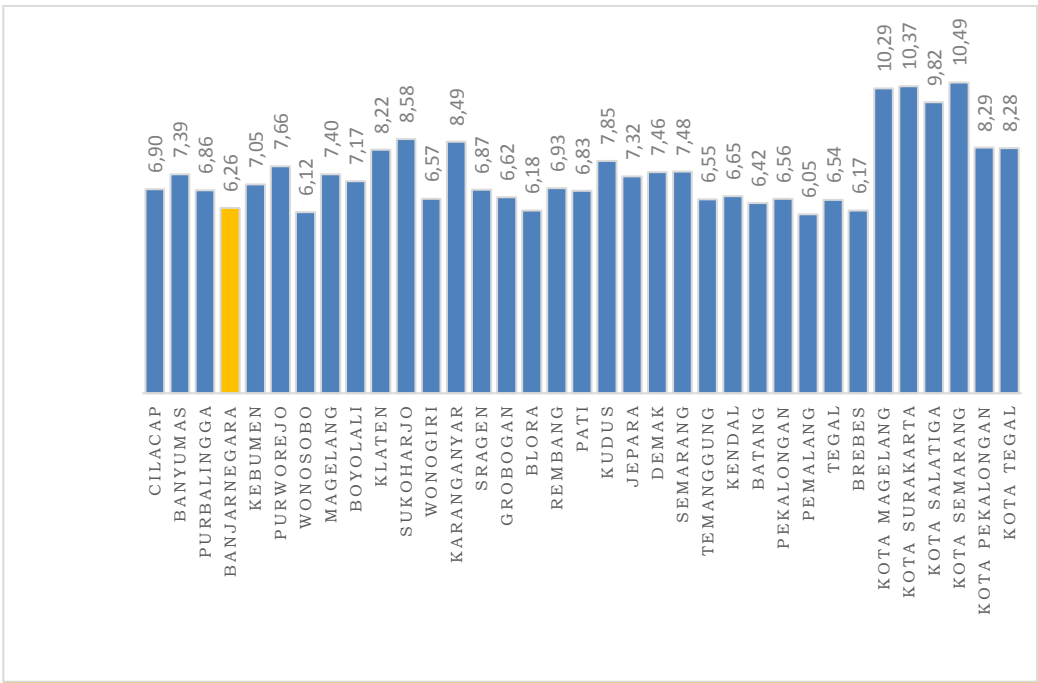
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.8. Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021

b. Rata-rata lama sekolah

Indikator kesejahteraan penduduk yang juga mempengaruhi angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Banjarnegara adalah indikator rata-rata lama sekolah. Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rata-rata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Sampai dengan tahun 2016, rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Banjarnegara sebesar 6,26. Rata-rata lama sekolah Kabupaten Banjarnegara relatif rendah apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah karena berbagai faktor.

Berikut ini disajikan perbandingan angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Banjarnegara dengan kabupaten/kota di sekitarnya.



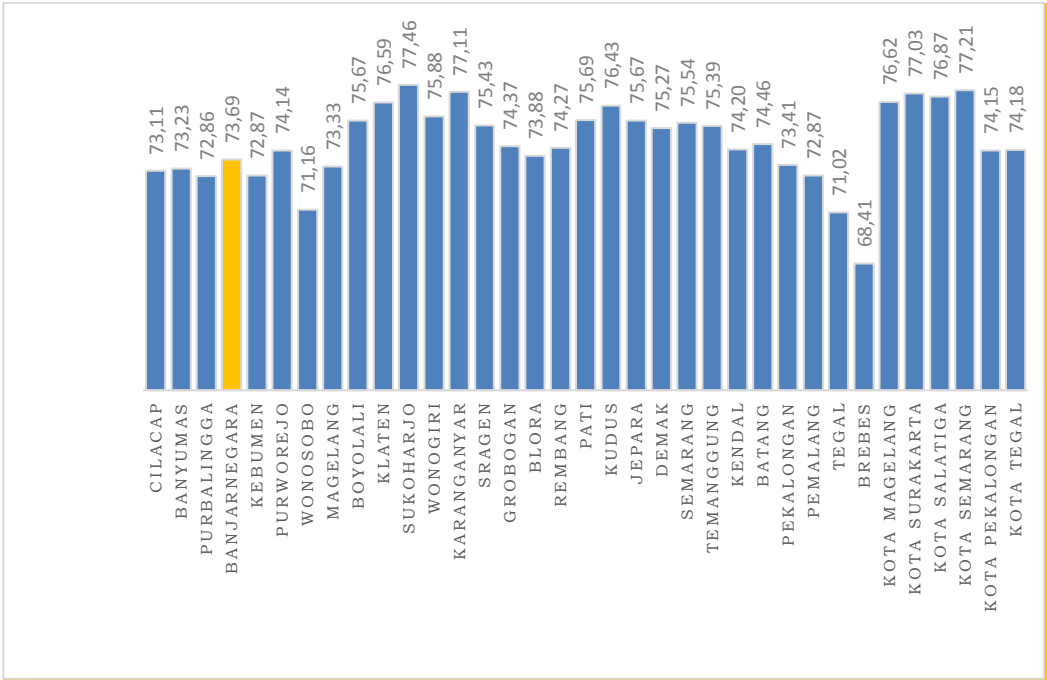
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.9. Posisi Relatif Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Banjarnegara Dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021

c. Angka harapan hidup

Angka harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas (kematian) menurut umur. Angka ini merupakan angka yang menunjukkan perkiraan usia seseorang dihitung sejak dilahirkan. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Angka Harapan Hidup digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka harapan hidup Kabupaten Banjarnegara setiap tahunnya menunjukkan tren peningkatan, dari 73,25 tahun pada tahun 2012 menjadi 73,69 tahun pada tahun 2016.

Berikut ini disajikan perbandingan angka harapan hidup Kabupaten Banjarnegara dengan kabupaten/kota di sekitarnya.



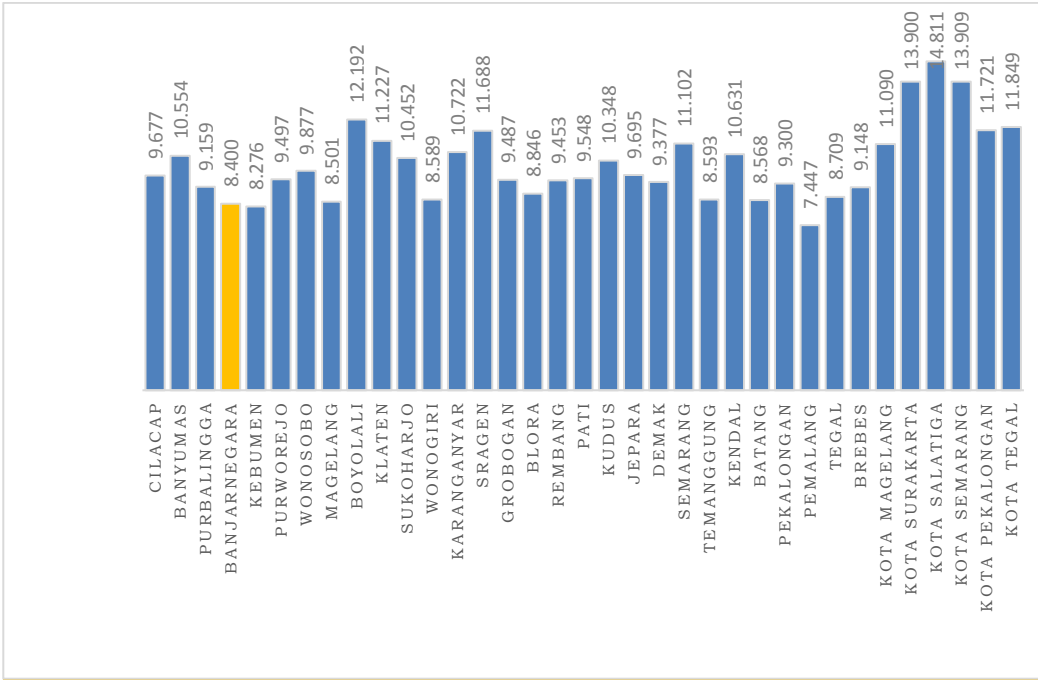
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.10. Posisi Relatif Angka Harapan Hidup Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021

d. Pengeluaran riil per kapita

Pengeluaran riil per kapita menunjukkan daya beli, yaitu kemampuan masyarakat dalam membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa. Pengeluaran riil per kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Kemampuan daya beli antar daerah berbeda-beda. Semakin rendahnya nilai daya beli suatu masyarakat berkaitan erat dengan kondisi perekonomian pada saat itu yang sedang memburuk yang berarti semakin rendah kemampuan masyarakat membeli suatu barang atau jasa.

Pengeluaran riil perkapita Kabupaten Banjarnegara menempati posisi ke-34 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, capaiannya masih di bawah rata-rata angka Jawa tengah, seperti terlihat pada gambar berikut.

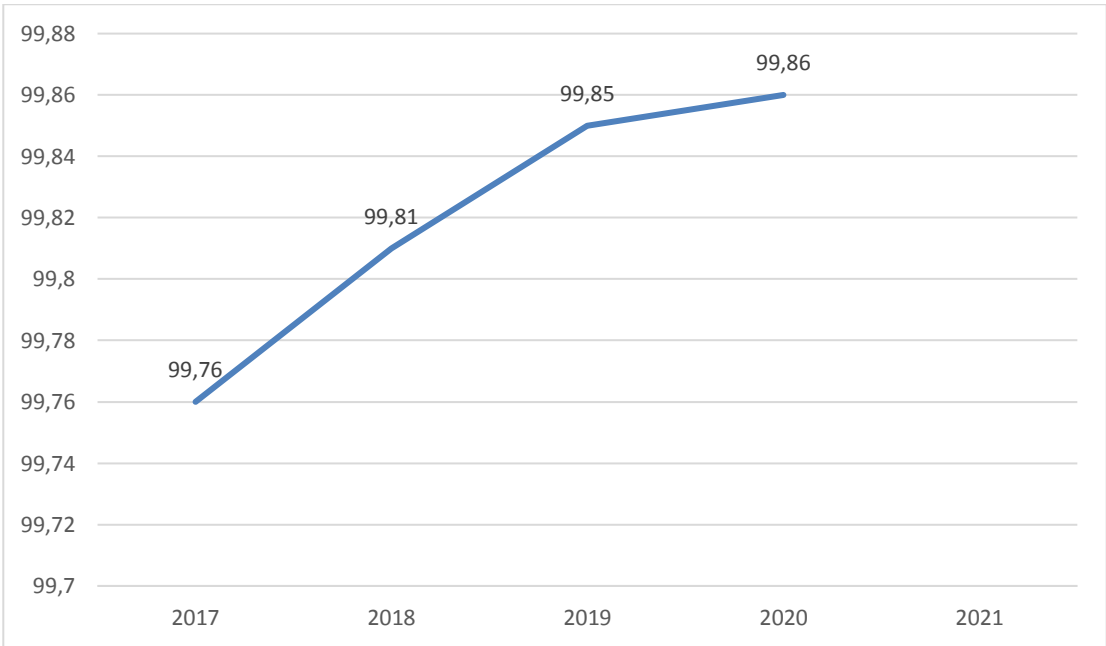


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah

Gambar 2.11. Posisi Relatif Pengeluaran Riil Perkapita Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2021

2. Angka Melek Huruf

Angka melek huruf meningkat dari 99,76% pada tahun 2017 menjadi 99,81% pada tahun 2018. Dengan capaian tersebut, tercatat hanya sekitar 0,24% penduduk Kabupaten Banjarnegara yang masih buta huruf. Lambatnya penanganan penduduk buta huruf ini disebabkan banyaknya penduduk buta huruf yang sudah berusia lanjut, sehingga minat belajarnya rendah.



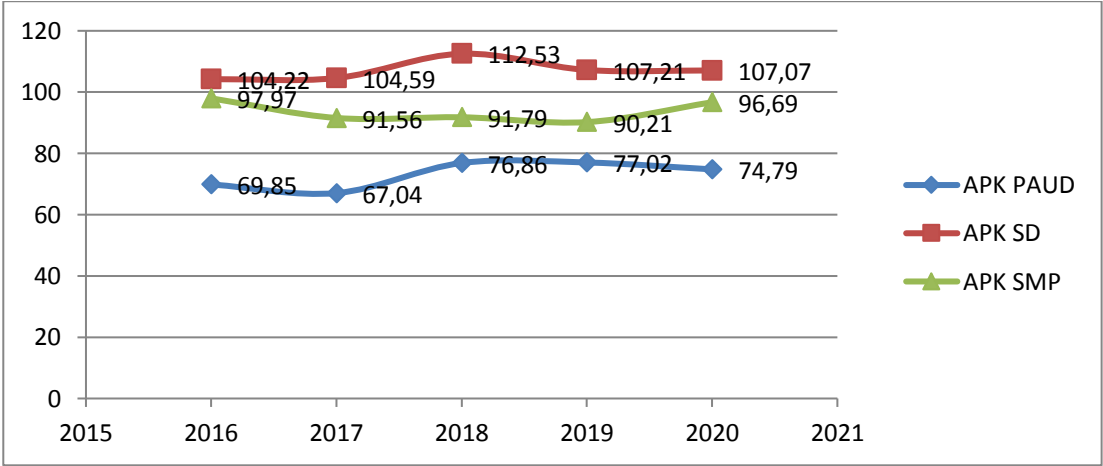
Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Gambar 2.12. Angka Melek Huruf Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

3. Angka Partisipasi Kasar

Angka partisipasi kasar (APK) merupakan persentase siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dari jumlah penduduk di usia tertentu. APK merupakan indikator sederhana yang menunjukkan daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. APK PAUD, APK SD/MI/Paket A dan APK SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Banjarnegara selama kurun waktu 5 tahun dari 2016-2020 menunjukkan angka fluktuatif. APK PAUD pada tahun 2016 sebesar 69,85 mengalami kenaikan hingga tahun 2020 menjadi sebesar 74,79. Untuk APK SD/MI/Paket A mengalami kenaikan dimana pada tahun 2016 pada angka 104.22 menjadi sebesar 107,07 pada tahun 2020. Sedangkan APK SMP/MTs/Paket B pada tahun 2016 sebesar 97.97 turun menjadi sebesar 96.69 pada tahun 2020.

Angka capaian ini harus diakselerasi melalui peningkatan akses pendidikan dan motivasi siswa dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM masyarakat.



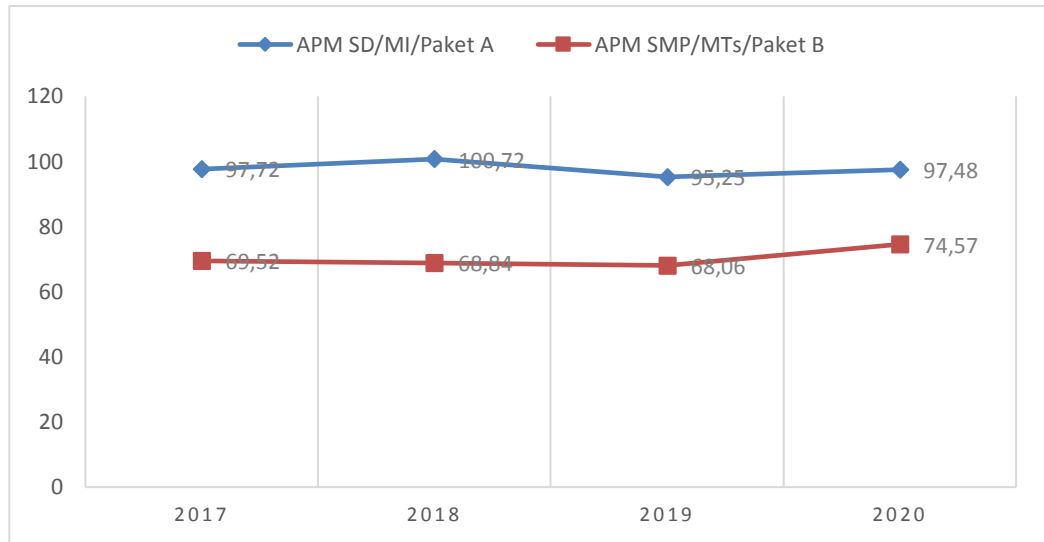
Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

Gambar 2.13. Angka Partisipasi Kasar (%) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

4. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah tertentu di tingkat pendidikan tertentu. APM merupakan indikator daya serap pendidikan berdasarkan usia standar di setiap jenjang pendidikan.

Angka Partisipasi murni pada tahun 2017-2021 cenderung stabil dan tidak ada perubahan angka yang cukup signifikan. Angka capaian ini harus diakselerasi melalui peningkatan akses pendidikan, motivasi, dan ketepatan orang tua siswa dalam memasukan anaknya ke setiap jenjang pendidikan berdasarkan usia sekolahnya.



Sumber: Dindikpora Kab. Banjarnegara

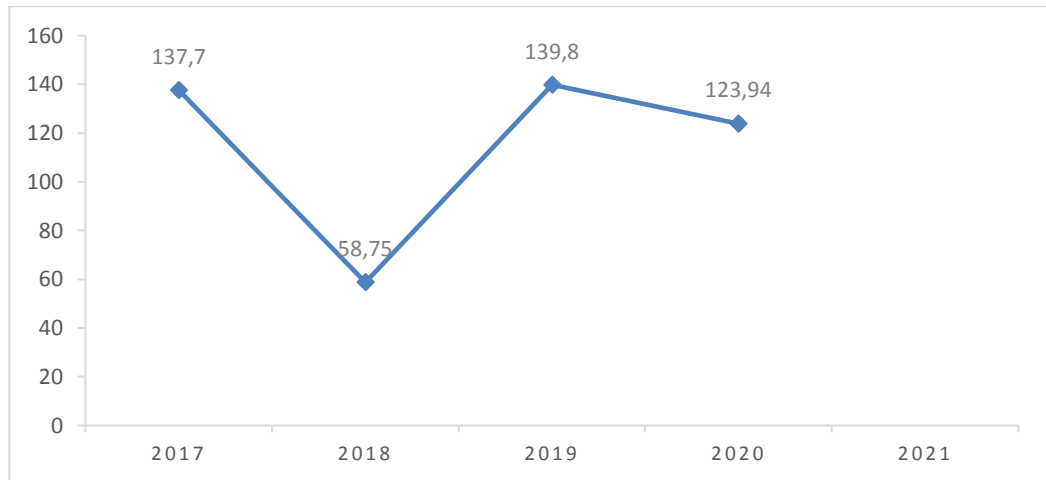
Gambar 2.14. Angka Partisipasi Murni (%) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

5. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah angka kematian seorang perempuan selama kehamilannya sampai 42 hari setelah pengakhiran kehamilan yang disebabkan oleh berbagai penyebab yang berhubungan dengan kehamilan atau proses penanganannya tetapi tidak karena kecelakaan. Secara empiris, penyebab AKI meliputi keterlambatan dalam pengambilan keputusan mengenai tempat persalinan, keterlambatan di dalam perjalanan, dan keterlambatan dalam mendapatkan pertolongan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Selain itu, kualitas kesehatan ibu yang kurang baik sebelum ataupun selama hamil juga menyebabkan terjadinya kehamilan dengan risiko tinggi yang dapat memicu terjadinya kematian ibu.

Capaian AKI cenderung menurun, yaitu sebesar 137,7 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2017 menjadi 58,75 per 100.000 Kelahiran Hidup pada tahun 2018, tetapi naik kembali pada tahun 2019 sebesar 139,8 dan turun lagi pada tahun 2020 sebesar 123,94. Meski begitu, penanganan dalam rangka

mengurangi AKI perlu ditingkatkan. Berbagai permasalahan dalam penanganan AKI diantaranya yaitu kemiskinan, infrastruktur jalan dan jembatan, dan akses pelayanan kesehatan, terutama rumah sakit yang kurang merata.



Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

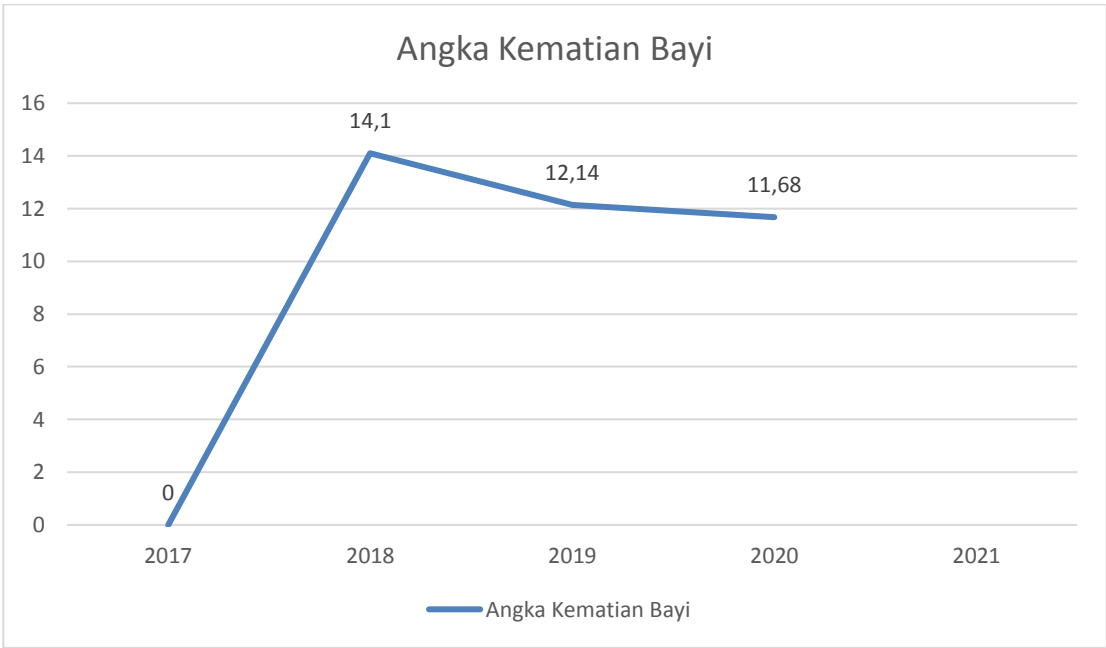
Gambar 2.15. Angka Kematian Ibu (per 100.000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

6. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi (usia 0-11 bulan) di suatu wilayah pada kurun waktu satu tahun (bayi lahir mati tidak masuk dalam hitungan). Penyebab tingginya AKB diantaranya yaitu: 1). kejadian kegawatan pada bayi sulit diduga sebelumnya, sedangkan kemampuan pemberi pelayanan di tingkat dasar terbatas, 2). masyarakat cenderung tidak menganggap penting melakukan rujukan pada kasus kegawatan bayi usia muda sehingga seringkali terjadi keterlambatan penanganan, 3). tingginya angka kehamilan pada usia kurang dari 20 tahun, sehingga mengakibatkan kelahiran bayi risiko tinggi, dan 4). kualitas kesehatan ibu yang kurang baik sebelum ataupun selama hamil, sehingga banyak bayi dengan BBLR juga kelainan kongenetal dengan segala komplikasinya.

Capaian AKB cenderung fluktuatif, di tahun 2017 angka menunjukkan ada 13,6 kematian, lalu naik pada tahun 2018 sebesar 14,10 dan turun kembali pada tahun 2019 sebesar 12,14 per 1000 Kelahiran Hidup. Peningkatkan deteksi dini bagi kehamilan risiko tinggi menjadi salah satu kunci dalam menekan AKB. Selain itu, kerja sama antara pelayanan kesehatan tingkat

dasar dan rujukan (terutama sarana prasarana rumah sakit dan jejaringnya), peningkatan edukasi masyarakat, serta dukungan lintas program dan lintas sektor perlu ditingkatkan dalam upaya penurunan AKB.



Sumber: Dinkes Kab. Banjarnegara

Gambar 2.16. Angka Kematian Bayi (per 1000 Kelahiran Hidup) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Gambar 2.2. Keterangan Indikator Pencapaian

Interval Nilai	Kriteria	Keterangan
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	●
76% ≤ 90%	Tinggi	■
66% ≤ 75%	Sedang	▲
51% ≤ 65%	Rendah	◆
≤ 50%	Sangat rendah	▼









1. Pendidikan



Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan triwulan IV tahun 2021, dari 12 indikator urusan pendidikan sebanyak 4 indikator telah sesuai target, 5 indikator belum sesuai target, 1 indikator tidak tercapai dan 2 indikator belum dapat dievaluasi. Adapun ke 4 indikator yang telah sesuai target yaitu indikator Rata-rata lama sekolah dari target 2021 sebesar 6,57 sd.6,65 terealisasi sebesar 6,65, indikator APK PAUD dari target 2021 sebesar 72,40 terealisasi sebesar 74,84, indikator APS 7-12

tahun dari target 2021 sebesar 88 terealisasi sebesar 90,84 dan indikator APS 13-15 tahun dari target 2021 sebesar 77 terealisasi sebesar 86,47. Sebanyak 6 indikator yang belum sesuai target yaitu indikator Harapan lama sekolah dari target 2021 sebesar $11,8 \pm 0,2$ terealisasi sebesar 11,63, indikator APK SD dari target 2021 sebesar 100 terealisasi sebesar 92,24, indikator APK SMP dari target 2021 sebesar 94,40 terealisasi sebesar 90,78, indikator Angka melek huruf dari target 2021 sebesar 99,89 terealisasi sebesar 99,86, indikator Persentase guru tersertifikasi dari target 2021 sebesar 94 terealisasi sebesar 78,77 dan indikator Angka melanjutkan ke SMP dari target 2021 sebesar 92,40 terealisasi sebesar 85,04. Sedangkan 2 indikator yang tidak dapat dievaluasi yaitu indikator Angka rata-rata ujian SD dan indikator Angka rata-rata ujian SMP karena tidak ada lagi Ujian Nasional sehingga kelulusan siswa nilai diperoleh dari nilai rata-rata raport plus nilai ujian sekolah.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pendidikan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rata-rata lama sekolah	6,65 s.d. 6,72	6,74	6,57 s.d. 6,65	6,75	101,5		Dindikpora
2	Harapan lama sekolah	11,9 ± 0,2	11,46	11,8 ± 0,2	11,63	98,5		Dindikpora
3	APK PAUD	73,00	74,79	72,40	74,84	103		Dindikpora
4	APK SD	100	107,07	100	92,24	92,24		Dindikpora
5	APS 7-12 Tahun	88,55	106,48	88,00	90,84	103		Dindikpora
6	APK SMP	94,50	96,69	94,40	90,78	96		Dindikpora
7	APS 13-15	77,50	92,75	77,00	86,47	112		Dindikpora
8	Angka Rata-Rata Ujian SD	7,45	NA	7,40	NA	NA		Dindikpora
9	Angka Rata-Rata Ujian SMP	7,00	NA	6,80	NA	NA		Dindikpora
10	Angka Melek Huruf	99,90	99,86	99,89	99,86	99,96		Dindikpora

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Presentase guru tersertifikasi	95	94,52	94	78,77	83,79		Dindikpora
12	Angka Melanjutkan ke SMP	92,50	100,65	92,40	85,04	92		Dindikpora

Sumber : Dindikpora Kab. Banjarnegara

2. Kesehatan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 26 indikator pada urusan kesehatan terdapat 14 indikator yang sudah tercapai sesuai target yaitu : indikator Angka Usia Harapan Hidup dari target 2021 sebesar 74,01 terealisasi sebesar 74,28, indikator indeks keluarga sehat dari target 2021 sebesar 65% terealisasi sebesar 93,9%, indikator Persentase PHBS tatanan rumah tangga strata utama dan paripurna dari target 2021 sebesar 80% terealisasi sebesar 89,3%, indikator Persentase Balita Gizi buruk tertangani dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, indikator Proporsi Penderita DBD yang ditangani dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, indikator Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif minimal 85% dari target 2021 sebesar ≥85% terealisasi sebesar 90,98%, indikator Persentase angka kasus HIV yang diobati dari target 2021 sebesar 58% terealisasi sebesar 85,9%, indikator Proporsi penderita malaria yang diobati dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, indikator Presentase orang dengan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari target 2021 sebesar 100% terealisasi 100%, indikator Jumlah PUSKESMAS terakreditasi; Tingkatan Akreditasi Hj. Anna Lasmanah dari target 2021 sebanyak 35 PUSKESMAS; Paripurna terealisasi sebanyak 35 PUSKESMAS; Paripurna, indikator Presentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTP dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, indikator Length Of Stay (LOS) RS Hj Lasmanah dari target 2021

selama 3-6 hari terealisasi selama 3,3 hari, indikator Presentase skrining kesehatan lansia dari target 2021 sebesar 45% terealisasi sebesar 50,57% dan indikator Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari target 2021 sebesar 98% terealisasi sebesar 99,1%. Sebanyak 6 indikator belum sesuai target yaitu indikator Prosentase bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap dari target 2021 sebesar 99,50% terealisasi sebesar 80,6%, indikator Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun dari target 2021 sebanyak 5 terealisasi sebanyak 4 kasus, indikator Turn Over Interval (TOI) dari target 2021 sebesar 1-3 hari terealisasi 5,8 hari, indikator Bed Turn Over (BTO) dari target 2021 sebanyak 50-70 kali terealisasi sebanyak 42 kali, indikator Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar dari target 2021 sebesar 95% terealisasi sebesar 87%, dan indikator persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar dari target 2021 sebesar 99% terealisasi sebesar 97,7%. Sebanyak 6 indikator tidak tercapai yaitu indikator Persentase Desa/ Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM dari target 2021 sebesar 25% terealisasi sebesar 6,83%, indikator Presentase orang dengan penyakit HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 35,17%, indikator Presentase fasilitas bangunan, sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 75/2014 dari target 2021 sebesar 30% terealisasi sebesar 28,6%. indikator Bed Occupancy Rate (BOR) dari target 2021 sebesar 60-75 terealisasi sebesar 42,92%, indikator kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis) dari target 2021 sebanyak 21 jenis terealisasi sebanyak 16 jenis, dan indikator Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar dari target 2021 sebesar 95% terealisasi sebesar 79,1%.

Secara rinci pencapaian target kinerja indikator urusan kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.15. Capaian Kinerja Urusan Wajib Kesehatan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Angka usia harapan hidup	74,08	74,01	74,01	74,28	100	<div></div>	Dinkes
2	Indeks Keluarga Sehat	70%	88	65%	93,9%	144	<div></div>	Dinkes
3	Persentase PHBS tatanan rumah tangga strata utama dan paripurna	85%	81,52	80%	89,3%	105,06	<div></div>	Dinkes
4	Prosentase Balita Gizi buruk tertangani	100%	100	100%	100%	100	<div></div>	Dinkes
5	Persentase Desa / Kelurahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM	30%	6,8	25%	6,83%	27,32	<div></div>	Dinkes
6	Proporsi Penderita DBD yang ditangani	100%	100	100%	100%	100	<div></div>	Dinkes
7	Prosentase bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap	100%	95	99,50%	80,6%	84,84	<div></div>	Dinkes
8	Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif minimal 85%	≥85%	90,6	≥85%	90,98%	107,03	<div></div>	Dinkes
9	Persentase angka kasus HIV yang diobati	60%	65	58%	85,9%	156,18	<div></div>	Dinkes
10	Proporsi penderita malaria yang diobati	100%	100	100%	100%	100	<div></div>	Dinkes
11	Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid	5 kasus	1 kasus	5 kasus	4 kasus	80	<div></div>	Dinkes

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia di bawah 15 tahun							
12	Presentase orang dengan penyakit HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	25,86	100%	35,17	35%	▼	Dinkes
13	Presentase orang dengan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	102,1	100%	100%	100	●	Dinkes
14	Jumlah PUSKESMAS terakreditasi; Tingkatan Akreditasi Hj. Anna Lasmanah	35 PUSKESMAS; Paripurna	35 Puskesmas; Paripurna	35 PUSKESMAS; Paripurna	35 PUSKESMAS; Paripurna	100	●	Dinkes
15	Presentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTP	100%	100%	100%	100%	100	●	Dinkes
16	Presentase fasilitas bangunan, sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 75/2014	35%	29%	30%	28,6%	63,56	▼	Dinkes

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
17	Bed Occupancy Rate (BOR)	60-70%	49.45	60-75	42,92 %	72%	▼	RSUD Hj Lasmanah
18	Length Of Stay (LOS)	3-6 hari	3.6 hari	3-6 hari	3,3 hari	100%	●	RSUD Hj Lasmanah
19	Turn Over Interval (TOI)	1-3 hari	2.77 hari	1-3 hari	5,8 hari	93%	▶	RSUD Hj Lasmanah
20	Bed Turn Over (BTO)	50-70 kali	66.58 kali	50-70 kali	42 kali	94%	▶	RSUD Hj Lasmanah
21	Kelengkapan jenis pelayanan spesialis (%/jenis)	22 Jenis	16 jenis	21 Jenis	16 Jenis	76%	▼	RSUD Hj Lasmanah
22	Presentasae skrining kesehatan lansia	50%	46,95	45%	50,57%	112	●	Dinkes
23	Presentase Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar	100%	88,6	95%	87%	91,5	▶	Dinkes
24	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100%	98,1	99%	97,7	98,68	▶	Dinkes
25	Prosentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	98,4	98%	99,1%	101	●	Dinkes
26	Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	55,4	95%	79,1%	83,2	▼	Dinkes

Sumber : Dinkes dan RSUD Hj Anna Lasmanah Kab. Banjarnegara

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 12 indikator sebanyak 9 indikator sudah sesuai target yaitu indikator Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dari target 2021

sebesar 71 s.d. 73% terealisasi sebesar 81,229%, indikator Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik dari target 2021 sebesar 17.003 terelisasi sebesar 17.323, indikator Prosentase jalan yang baik dan berkualitas dari target 2021 sebesar 76% terealisasi sebesar 81,229%, indikator Prosentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman sebesar dari target 2021 sebesar 90,95% terealisasi sebesar 95,22%, indikator Bertambahnya panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang baik dan berkualitas dari target 2021 sebesar 3.200 m terealisasi sebesar 15.837 m, indikator bertambahnya turap/talud/bronjong yang baik dan berkualitas dari target 2021 sebesar 3.320 m³ terealisasi sebesar 18.940 m³, indikator Prosentase Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkualitas dari target 2021 sebesar 69% terealisasi sebesar 70,30%, indikator terlayannya akses air minum yang bersih dan aman serta sanitasi yang memadai dari target 2021 sebanyak 1.355 jiwa terealisasi sebanyak 9.774 jiwa, dan indikator terkendalanya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang dari target 2021 sebesar 52% terealisasi sebesar 71%. Sebanyak 2 indikator belum sesuai target yaitu, indikator bertambahnya panjang ruas jalan kabupaten dari target 2021 sebesar 955,861 km terealisasi sebesar 938,65 km dan indikator Tersedianya dokumen rencana tata ruang/rtr wilayah kabupaten beserta rencana rincinya sesuai dinamika wilayah dari target 2021 sebanyak 20 dokumen terealisasi sebanyak 17 dokumen. Sedangkan 1 indikator tidak tercapai yaitu, indikator Prosentase ruas jalan yang terinspeksi dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 50%. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik	73 s.d. 75%	80,17% (752,560 km)	71 s.d. 73	81,229	111%	●	DPUPR
2	Luasan sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	17.496	15,830	17.003	17.323	102%	●	DPUPR
3	Prosentase jalan yang baik dan berkualitas	80%	80,17% (752,560 km)	76%	81,229	107%	●	DPUPR
4	Prosentase penduduk yang mendapat akses air minum yang bersih dan aman	91,6%	94,52%	90,95%	95,22%	105%	●	DPKPLH
5	Bertambahnya panjang ruas jalan kabupaten	963.386 km	752,560 Km	955.861 km	938,65 km	98%	▶	DPUPR
6	Bertambahnya panjang saluran drainase/ gorong-gorong yang baik dan berkualitas	4.000 m	8.923m	3.200 m	15.837 m	495%	●	DPUPR
7	Bertambahnya turap/talud/bronjong yang baik dan berkualitas	4.150 m3	8.669 M3	3.320 m3	18.940 m3	570%	●	DPUPR
8	Prosentase ruas jalan yang terinspeksi	100%	100	100%	50%	50%	▼	DPUPR
9	Prosentase Panjang Jaringan Irigasi dalam kondisi baik dan berkualitas	71%	63,30	69%	70.30%	102%	●	DPUPR
10	Terlayannya akses air minum yang bersih dan aman serta sanitasi yang memadai	1.355 jiwa	389.715 jiwa	1.355 jiwa	9.774 jiwa	721%	●	DPKPLH
11	Tersedianya dokumen rencana tata ruang/rtr wilayah kabupaten beserta rencana rincinya sesuai dinamika wilayah	24 dok	16 dok	20 dok	17 dok	85%	▶	DPUPR
12	Terkendalinya pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang	60%	70	52%	71%	137%	●	DPUPR





Sumber : DPUPR dan DPKP Kab. Banjarnegara

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021 dari 4 indikator urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sebanyak 2 indikator telah sesuai target yaitu indikator Prosentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai dari target 2021 sebesar 63,75% terealisasi sebesar 65,24% dan indikator berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan dari target 2021 sebesar 21% terealisasi sebesar 34,35%. Sedangkan 2 indikator lainnya belum sesuai target yaitu indikator Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni dari target 2021 sebesar 89±1% terealisasi sebesar 80% dan indikator rasio rumah layak huni dari target 2021 sebesar 89% terealisasi sebesar 85,83%.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17. Capaian Kinerja Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021










No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase MBR yang menghuni Rumah Layak Huni	90 ± 1	71,55%	89 ± 1	80%	90		DPKPLH
2	Rasio rumah layak huni	90%	85,83%	89%	80%	90		DPKPLH
3	Prosentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai	65%	64,07%	63,75%	65,24%	102		DPKPLH
4	Berkurangnya luasan pemukiman kumuh di kawasan perkotaan	berkurang 24%	berkurang 18,15%	berkurang 21%	Berkurang 34,35%	164		DPKPLH




Sumber : DPKP Kab. Banjarnegara

5. Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021 dari 13 indikator terdapat 7 indikator yang telah sesuai target, 4 indikator belum sesuai target, 1 indikator tidak tercapai dan 1 indikator tidak dapat dievaluasi. Adapun ke-7 indikator yang telah sesuai target yaitu indikator Presentase perda dan perbup ketertiban yang ditegakkan dari target 2021 sebesar 80% terealisasi sebesar 84,21%, indikator berkurangnya jumlah konflik masyarakat dari target 2021 sebanyak 2 konflik terealisasi 2 konflik, indikator berkurangnya jumlah konflik agama dari target 2021 sebanyak 1 konflik terealisasi 0 konflik, indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten dari target 2021 sebesar 92,4% terealisasi sebesar 100%, indikator Persentase Sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pemberantasan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dari target 2021 sebesar 15% terealisasi sebesar 17,9%, indikator prosentase masyarakat yang tangguh dalam penanggulangan bencana dari target 2020 sebesar 36% terealisasi sebesar 45,6% dan indikator prosentase desa yang tertangani melalui kegiatan pasca bencana dari target 2021 sebesar 80% terealisasi sebesar 158%. Sebanyak 4 indikator yang belum sesuai target yaitu indikator Persentase desa tangguh bencana dari target 2021 sebesar 41,05% terealisasi sebesar 38,97%, indikator Persentase peningkatan jumlah ormas/LSM yang diberikan SKT dari target 2021 sebesar 100% (25 Ormas) terealisasi sebesar 88% (22 Ormas), indikator Rasio anggota Linmas per Rukun Tetangga (RT) dari target 2021 sebesar 1,53% terealisasi sebesar 1,47%, dan indikator Response rate bencana kebakaran dari target 2021 sebesar 15 menit terealisasi sebesar 17,6 menit. Sebanyak 1 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator prosentase penurunan angka kriminalitas dari target 2021 sebesar 3,5% terealisasi sebesar 2,1%. Sedangkan 1 indikator tidak dapat dievaluasi yaitu indikator presentase pemilih dalam pemilu karena tahun 2021 tidak ada pemilu. Secara rinci kinerja pembangunan urusan ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase desa tangguh bencana	52,63	31,28	41,05	38,97	95%		BPBD
2	Presentase pemilih dalam pemilu	PilBup 70-75%	-	-	-	-		Bakesbangpol
3	Presentase perda dan perbup ketertiban yang ditegakkan	80%	82% (11 Perda, 8 Perbup)	80%	84,21% (12 Perda, 4 Perbup)	105%		Satpol PP
4	Prosentase penurunan angka kriminalitas	turun 4%	Turun 2,65 % (tipiring 7, tibum 330)	turun 3,5% (368 kasus kriminal)	Turun 2,1% (268 tibum, 4 tipiring)	60%		Satpol PP
5	Persentase peningkatan jumlah ormas/LSM yang diberikan SKT	100%	(76%) 8 ormas	100%	88% (22 ormas)	88%		Bakesbangpol
6	Rasio anggota Linmas per Rukun Tetangga (RT)	1,54	1,43 (7.847 linmas)	1,53	1,47 (7.554 linmas)	96%		Satpol PP
7	Berkurangnya jumlah konflik masyarakat	1	3	2	2	100%		Bakesbangpol
8	Berkurangnya jumlah konflik agama	1	0	1	0	100%		Bakesbangpol
9	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	92,50%	81,99 % (337 kasus)	92,4%	100% (272 kasus)	108%		Satpol PP
10	Persentase Sekolah yang telah mendapat pembinaan tentang Pemberantasan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran	15%	0	15%	17,9%	119%		Bakesbangpol

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gelap Narkoba (P4GN)							
11	Prosentase masyarakat yang tangguh dalam penanggulangan bencana	43,20%	15%	36%	45,6%	127%		BPBD
12	Prosentase desa yang tertangani melalui kegiatan pasca bencana	100% (15 desa)	80%(12 desa)	80% (12 desa)	158% (19 desa)	197,5%		BPBD
13	Response rate bencana kebakaran	15 menit	16,4 menit	15 menit	17,6 menit	82,6%		Satpol PP

Sumber : Satpol PP dan Kantor Kesbangpollinmas Kab. Banjarnegara

6. Sosial

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 7 indikator pada urusan sosial terdapat 6 indikator yang sesuai target yaitu Indikator Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkat produktivitas sosial ekonominya dari target 2021 sebesar 34.32% terealisasi sebesar 50.58%, indikator Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga dari target 2021 sebesar 5.53% terealisasi sebesar 6.03%, indikator Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar lembaga dari target 2021 sebesar 0.99% terealisasi sebesar 1.99%, indikator Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga dari target 2021 sebesar 6.22% terealisasi sebesar 6.94%, Indikator Persentase penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga dari target 2021 sebesar 13.92% terealisasi sebesar 17.1% dan indikator Persentase peran aktif PSKS lembaga dan perorangan terdapat dua pengukuran yakni Prosentase Peran aktif PSKS Lembaga dan Prosentase Peran aktif PSKS Perorangan. Prosentase Peran aktif PSKS Lembaga dari target 2021 sebesar 43.21% terealisasi sebesar 27.29%,



sedangkan prosentase Peran aktif PSKS Perorangan dari target 2021 sebesar 20.23% terealisasi sebesar 27.65% sehingga dari pengukuran kedua indikator tersebut telah melebihi target yaitu sebesar 100,7%.

Sedangkan 1 indikator urusan sosial yang belum sesuai target yaitu Indikator Persentase Penurunan PMKS dari target 2021 sebesar 0.2% terealisasi sebesar -7.55%.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan sosial dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.19. Capaian Kinerja Urusan Wajib Sosial Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Penurunan PMKS	0,2	-6	0,2	-7,55	-3875	▼	Dinsos P3A
2	Persentase keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan meningkat produktivitas sosial ekonominya	34,37	50,20	34,32	50,58	148,16	●	Dinsos P3A
3	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial luar lembaga	5,53	17,70	5,53	6,03	109	●	Dinsos P3A
4	Persentase anak terlantar yang mendapatkan pelayanan sosial di luar lembaga	0,99	0	0,99	1,91	193	●	Dinsos P3A
5	Persentase penyandang cacat dan eks trauma yang	6,22	0	6,22	6,94	112	●	Dinsos P3A

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga							
6	Persentase penyandang penyakit sosial yang mendapatkan pelayanan sosial luar lembaga	13,92	14,71	13,92	17,1	123		Dinsos P3A
7	Persentase peran aktif PSKS lembaga dan perorangan	43,21 dan 20,23	15,22 dan 8,81	43,21 dan 20,23	27,99 dan 27,65	64,78 dan 136,68		Dinsos P3A

Sumber : Dinsos Kab. Banjarnegara

2.3.1. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV 2021, dari 4 indikator sebanyak 3 indikator telah sesuai target yaitu indikator Persentase pencari kerja/penganggur yang mendapatkan pelatihan dari target 2021 sebesar 3% terealisasi sebesar 6,1%, indikator Prosentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan dari target 2021 sebesar 76,49% terealisasi sebesar 90% dan indikator Persentase tenaga kerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan dari target 2021 sebesar 68,45% terealisasi sebesar 69,91%. Sedangkan 1 indikator tidak tercapai yaitu indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari target 2021 sebesar <4,6 terealisasi sebesar 5,86. Secara rinci kinerja pembangunan urusan tenaga kerja dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20. Capaian Kinerja Urusan Wajib Tenaga Kerja Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	< 4,5	5,86	< 4,6	5.86	73	▼	Disnaker PMPTSP
2	Persentase pencari kerja/penganggur yang mendapatkan pelatihan	5,68	2,76	3%	6,10	203	●	Disnaker PMPTSP
3	Prosentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	83,93	17,65	76,49%	90	118	●	Disnaker PMPTSP
4	Persentase tenaga kerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	68,59	70,25	68,45%	69.91	102	●	Disnaker PMPTSP

Sumber : Disnakertrans Kab. Banjarnegara





2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak




Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 9 indikator capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebanyak 5 (Lima) Indikator telah sesuai target yaitu Indikator Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terlayani sesuai standar dari target 2021 sebesar 100% (55 kasus) terealisasi sebesar 100% (55 kasus), indikator persentase OPD yang melaksanakan Anggaran Responsif Gender dari target 2021 sebesar 100% (24 OPD) terealisasi sebesar 100% (24 OPD), indikator Persentase ketersediaan data gender disetiap OPD dari target 2021 sebesar 100% (24 OPD) terealisasi sebesar 100% (24 OPD), Prosentase Kelompok Perempuan Rentan yang terbentuk 110% dari target 2021 sebesar 21.6% terealisasi sebesar 23.7%, dan Indikator Meningkatnya prosentase kelembagaan Gerakan Sayang Ibu dan Anak tingkat Desa dari target 2021 sebesar 80.9% terealisasi sebesar 94.6%. Sebanyak 2 (Dua) Indikator belum sesuai Target yaitu Indikator Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga

Pemerintah dari target 2021 sebesar 2.43% terealisasi sebesar 2.12% dan Indikator Kabupaten Layak Anak dari target 2021 Madya (601) terealisasi Pratama (560,49). Sedangkan 2 indikator lainnya tidak dapat dievaluasi yaitu indikator RAD PPA dan indikator Sosialisasi RAD PPA karena RAD PPA yang semestinya sudah tersusun pada tahun 2018 sesuai target dalam RPJMD, namun sampai dengan tahun 2021 belum tersusun. Kebijakan strategis yang telah dilaksanakan dalam upaya perlindungan anak tahun 2021 yaitu penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan KLA (inisiatif DPRD) yang didalamnya memuat RAD KLA, namun baru ditetapkan menjadi Perda pada Januari 2022 yaitu Perda nomor 2 Tahun 2022.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.21. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	2,44	2,09	2,43	2,12	87		Dinsos P3A
2	RAD PPA	-	0	-	NA	NA		Dinsos P3A
3	Sosialisasi RAD PPA	10 Kec	0	10 Kec	NA	NA		Dinsos P3A
4	Kabupaten Layak Anak	Madya	0	Madya (601)	Pratama (560,49)	93,26		Dinsos P3A
5	Persentase perempuan dan anak korban kekerasan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terlayani sesuai standar	100%;	100% (44 kasus)	100%	100% (55 Kasus)	100		Dinsos P3A
6	Persentase OPD yang melaksanakan Anggaran	100%;	87,5% (21 OPD)	100%	100 % (24 OPD)	100		Dinsos P3A





No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Responsif Gender							
7	Persentase ketersediaan data gender disetiap OPD	100%;	100	100%	100%	100		Dinsos P3A
8	Prosentase Kelompok Perempuan Rentan yang terbentuk	25,2%	0	21,6%	23,7 %	110		Dinsos P3A
9	Meningkatnya prosentase kelembagaan Gerakan Sayang Ibu dan Anak tingkat Desa	100%	0	80,9%	94,6%	117		Dinsos P3A

Sumber: DPPKBP3A Kab. Banjarnegara

3. Pangan

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 4 indikator capaian urusan pangan sebanyak 3 indikator telah sesuai target atau melebihi target yaitu indikator ketersediaan energi perkapita dari target 2021 sebesar 2.794 kkal/kap /hari terealisasi sebesar 3.339 kkal/kap /hari, indikator ketersediaan protein perkapita dari target 2021 sebesar 59,21 gr/kap/hr terealisasi sebesar 73,44 gr/kap/hr dan indikator ketersediaan pangan utama dari target 2021 sebesar 161.263,51 ton terealisasi sebesar 169.855,00 ton. Sedangkan sebanyak 1 indikator yang belum sesuai target yaitu indikator pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari target sebesar 93 terealisasi sebesar 89. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pangan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



Tabel 2.22. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	> 95	91,6	93	89	95, 69		Distankan KP
2	Ketersediaan energi perkapita	2.844 kkal/kap /hari	3.867 kkal/kap /hari	2.794 kkal/kap /hari	3.339 kkal/kap /hari	119,5		Distankan KP
3	Ketersediaan protein perkapita	59,21 gr/kap/hari	80,34	59,21 gr/kap/hari	73,44 gr/kap/hari	124,03		Distankan KP
4	Ketersediaan pangan utama	162.069,83 ton	171.076,90	161.263,51 ton	169.855,00 ton	105,33		Distankan KP

Sumber: DKP Kab. Banjarnegara

4. Pertanian

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 2 indikator urusan pertanian semuanya tercapai bahkan melebihi target yang telah ditetapkan. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pertanian dapat dilihat pada tabel di bawah ini:






No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase tanah PEMKAB yang bersertifikat;	45,23%;	36,63	42,11%;	52,10	123,72		BPPKAD
2	Prosentase kepastian hukum, pengusaan, pemilikan, peggunaan dan pemanfaatan tanah	63%	46,62	61%	76,05	124,67		BPPKAD

5. Lingkungan hidup

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 6 indikator urusan Lingkungan Hidup sebanyak 3 indikator telah sesuai target yaitu indikator Persentase Penanganan Sampah dari target 2021 sebesar 30% terealisasi sebesar 76,33%, indikator Indeks Kualitas Udara dari target 2021 sebesar 82,9 terealisasi sebesar 88,62 dan indikator bertambahnya luasan dan terkelolanya RTH dikawasan perkotaan dari target 2021 sebesar 17,20% terealisasi sebesar 17,20%. Sebanyak 2 indikator belum sesuai target yaitu indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari target 2021 sebesar 69 terealisasi sebesar 62,36 dan indikator Indeks Kualitas Air dari target 2021 sebesar 58,85 terealisasi sebesar 47,5. Sedangkan 1 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Indeks Kualitas Tutupan Lahan dari target 2021 sebesar 65,17 terealisasi sebesar 39,3.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.23. Capaian Kinerja Urusan Wajib Lingkungan Hidup Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5		7	8	9
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	69,25	72,78	69	62,36	90%		DPKPLH
2	Persentase penanganan sampah	33%	51,04	30%	76,33%	254%		DPKPLH
3	Indeks Kualitas Air	58,9	59,31	58,85	47,5	81%		DPKPLH
4	Indeks Kualitas Udara	82,9	89,39	82,9	88,62	107%		DPKPLH
5	Indeks Tutupan Lahan	65,17	65,15	65,17	39,3	60%		DPKPLH
6	Bertambahnya luasan dan Terkelolanya RTH di Kawasan Perkotaan	17,50%	17,16	17,20%	17,20%	100%		DPKPLH

Sumber: DLH dan DPUPR Kab. Banjarnegara

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021 dari 3 indikator urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil sebanyak 2 indikator tercapai sesuai target yaitu indikator Cakupan Penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali dari target 2021 sebesar 95% terealisasi sebesar 99,84% dan indikator Cakupan Bayi berakte kelahiran dari target 2021 sebesar 95% terealisasi sebesar 94,09%. Sedangkan 1 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak dari target 2021 sebesar 75% terealisasi sebesar 38,92%. Secara rinci pencapaian indikator urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah sebagai berikut.

Tabel 2.24. Capaian Kinerja Urusan Wajib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Cakupan Penerbitan KTP berbasis NIK atau e-KTP untuk yang pertama kali	96%	99,47	95%	99,84	105	●	Dindukcapil
2	Cakupan Bayi berakte kelahiran	95%	92	95%	94,09	99	●	Dindukcapil
3	Cakupan Penerbitan Kartu Identitas Anak	90%	42,81	75%	38,92	52	▼	Dindukcapil




Sumber: Dindukcapil Kab. Banjarnegara




7. Pemberdayaan masyarakat dan desa

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 6 indikator urusan pemberdayaan masyarakat dan desa semua indikator sudah tercapai sesuai target yaitu indikator persentase peningkatan desa berkembang dari target 2021

sebesar 3% terealisasi sebesar 4,31%, indikator Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa dari target 2021 sebesar 85% terealisasi sebesar 86,47%, indikator Persentase desa yang memiliki lembaga Ekonomi masyarakat (BUMDes) yang terukur secara skill dan manajerial dari target 2021 sebesar 65% terealisasi sebesar 92,86%, indikator Persentase tingkat swadaya Masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa dari target 2021 sebesar 28% terealisasi sebesar 36,95%, indikator Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat desa anggota BPD dari target 2021 sebesar 85% terealisasi sebesar 90,8%, dan Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan dari target 2021 sebesar 28% terealisasi sebesar 42,95%. Secara rinci pencapaian indikator urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 2.25. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan desa berkembang	3%	3,98%	3%	4,31%	143,67%		Dispermades
2	Persentase peningkatan pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan desa	90%	100%	85%	86,47%	101,73%		Dispermades
3	Persentase desa yang memiliki lembaga Ekonomi masyarakat (BUM Des) yang terukur secara skill dan manajerial.	70%	71,80%	65%	92,86%	142,86%		Dispermades

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	Persentase tingkat swadaya Masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa	30%	27,81%	28%	36,95	131,96%		Dispermades
5	Persentase peningkatan pemahaman dan pengetahuan perangkat desa anggota BPD	90%	86,19	85%	90,8%	106,82%		Dispermades
6	Persentase peningkatan peranan kaum perempuan dalam pembangunan di perdesaan	30%	30,87%	28%	42,95%	153,39%		Dispermades

Sumber: Dispermades Kab. Banjarnegara


8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 11 indikator urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sebanyak 7 indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator menurunnya angka kelahiran total (TFR) dari target 2021 sebesar 2,3% terealisasi sebesar 1,94%, indikator Unmeetneed dari target 2021 sebesar 7% terealisasi sebesar 6,98%, indikator menurunnya PUS usia 15-19 th (<20 Th) dari target 2021 sebesar 2,92% terealisasi sebesar 1,59%, indikator prosentase peserta KB aktif dari target 2021 sebesar 78,81% terealisasi sebesar 79,93%, indikator Anggota UPPKS Miskin yang terlatih dari target 350 terealisasi sebesar 355, indikator Cakupan Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri di Desa/Kelurahan dari target 2021 sebesar 28,14% terealisasi sebesar 30,58% dan indikator Prosentase pemuka masyarakat dan agama yang mendukung program KB dan Melakukan KIE dari target 2021 sebesar 75% terealisasi sebesar 75,51%.

Sebanyak 3 indikator belum sesuai target yaitu indikator Persentase PIK Remaja Tegar dari target 2021 sebesar 26,15% terealisasi sebesar 25,71%, indikator Meningkatkan Cakupan Kesertaan Tribina dari target 2021 sebesar 43,12% terealisasi sebesar 41,55%, dan indikator Cakupan sasaran yang menjadi Anggota UPPKS dari target 2021 sebesar 24,05% terealisasi sebesar 22,83%. Sedangkan 1 indikator tidak dapat dievaluasi karena tidak ada targetnya dalam RPJMD yaitu indikator Meningkatnya strata Posyandu Purnama. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26. Capaian Kinerja Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya Angka Kelahiran Total (TFR)	2,3%	2,108	2,3%	1,94%	118,56%	●	Dispermades PPKB
2	<i>Unmeetneed</i>	6,99%	6,91%	7%	6,98%	100,29%	●	Dispermades PPKB
3	Menurunnya PUS usia 15 - 19 th (<20 Th)	2,87%	1,724%	2,92%	1,59%	183,65%	●	Dispermades PPKB
4	Prosentase Peserta KB Aktif	79,24%	80,8%	78,81%	79,93%	101,42%	●	Dispermades PPKB
5	Anggota UPPKS Miskin yang terlatih	375	0	350	355	101,43%	●	Dispermades PPKB
6	Cakupan Institusi Masyarakat Pedesaan Mandiri di Desa/Kelurahan	32,14%	30,41%	30,14%	30,58%	101,46%	●	Dispermades PPKB
7	Prosentase pemuka masyarakat dan agama yang mendukung program KB dan Melakukan KIE	76,3%	63,17%	75%	75,51%	100,68%	●	Dispermades PPKB
8	Persentase PIK Remaja Tegar	26,15%	10%	26,15%	25,71%	98,32%	▶	Dispermades PPKB
9	Meningkatkan Cakupan Kesertaan Tribina	44,12%	28,46%	43,12%	41,55%	96,36%	▶	Dispermades PPKB









No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Cakupan sasaran yang menjadi Anggota UPPKS	25,36%	9,246%	24,05%	22,83%	94,93%		Dispermades PPKB
11	Meningkatnya strata Posyandu Purnama	-	25,66%	-	55,51%	NA		Dispermades PPKB

Sumber: DPPKBP3A Kab. Banjarnegara

9. Perhubungan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 8 indikator urusan perhubungan sebanyak 3 indikator telah sesuai target, sebanyak 3 indikator belum sesuai target dan 2 indikator tidak tercapai. Adapun ke-3 indikator yang telah sesuai target yaitu indikator Persentase Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ serta jumlah LPJU dalam keadaan baik dari target 2021 sebesar 80% perbaikan dan pemeliharaan 100 titik terealisasi sebesar 90% dan 1800 titik, indikator Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan dari target 2021 sebesar 32 terealisasi sebesar 33 dan indikator Cakupan Pelayanan Perparkiran dari target 2021 sebesar 75% terealisasi sebesar 90%. Sebanyak 3 indikator belum sesuai target yaitu indikator Bertambahnya jumlah jalur angkutan dari target 2021 sebanyak 47 terealisasi sebanyak 46, indikator terpenuhinya sarana keselamatan pengguna jalan dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 84,32% dan indikator Persentase unit pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik dari target 2021 sebesar 96% terealisasi sebesar 92,88%. Sedangkan 2 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Terpenuhinya Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan dari target 2021 sebanyak 7 lokasi terealisasi sebanyak 4 lokasi dan indikator Penghargaan Wahana Tata Nugraha dari target 2021 meraih WTN namun tidak terealisasi. Secara rinci kinerja pembangunan urusan perhubungan dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 2.27. Capaian Kinerja Urusan Wajib Perhubungan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Terpenuhinya Jumlah Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	7 Lokasi	4 Lokasi	7 Lokasi	4 Lokasi	57%		Dishub
2	Persentase Terpeliharanya Prasarana dan Fasilitas LLAJ; Jumlah LPJU dalam keadaan baik	100%; perbaikan dan pemeliharaan 100 titik	20% perbaikan dan pemeliharaan 325 titik	80%; perbaikan dan pemeliharaan 100 titik	90 %; perbaikan dan pemeliharaan 1.800 titik	956%		Dishub
3	Bertambahnya jumlah jalur angkutan	48	46	47	46	97,8%		Dishub
4	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	40	24	32	33	103		Dishub
5	Persentase terpenuhinya sarana keselamatan pengguna jalan	100%	50	100%	84,32%	84,32		Dishub
6	Persentase unit pengujian kendaraan bermotor dalam kondisi baik	97%	88,64%	96%	92,88%	96,7		Dishub
7	Penghargaan Wahana Tata Nugraha	Piala WTN	0	Plakat WTN	0	0		Dishub
8	Cakupan Pelayanan Perparkiran	80%	90	75%	90%	120		Dishub

Sumber: Dinhub Kab. Banjarnegara






10. Komunikasi dan informatika

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 5 indikator capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika terdapat 2 indikator yang telah sesuai target, sebanyak 1

indikator belum sesuai target dan 2 indikator tidak tercapai. Adapun ke 2 indikator yang telah sesuai target yaitu indikator Prosentase diseminasi informasi bagi masyarakat dari target 2021 sebesar 80% terealisasi sebesar 100% dan indikator Jumlah SIM yang mendukung pelayanan publik dari target 2021 sebanyak 22 SIM terealisasi sebanyak 47 SIM. Sebanyak 1 indikator belum sesuai target yaitu indikator Presentase Desa yang menggunakan SID dari target 2021 sebesar 82% terealisasi sebesar 73%. Sedangkan 2 indikator tidak tercapai yaitu indikator indikator Prosentase Jumlah SDM yang dilatih dalam bidang informasi dan komunikasi dari target 2021 sebesar 80% terealisasi sebesar 0% dan indikator Prosentase terselenggaranya sosialisasi bidang cukai dari target 2021 sebesar 80% terealisasi sebesar 0%.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan komunikasi dan informatika dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28. Capaian Kinerja Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Presentase Desa menggunakan SID	100%	73%	82%	73%	89%		Dinkominfo
2	Prosentase Jumlah SDM yang dilatih dalam bidang informasi dan komunikasi	100%	0	80%	0	0		Dinkominfo
3	Prosentase diseminasi informasi bagi masyarakat	100%	100%	80%	100%	125%		Dinkominfo
4	Prosentase terselenggaranya sosialisasi bidang cukai	100%	0	80%	0	0		Dinkominfo
5	Jumlah SIM yang mendukung pelayanan publik	23	42	22	47	213,64%		Dinkominfo

Sumber: Dinkominfo Kab. Banjarnegara

11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 8 indikator capaian kinerja pada urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah sebanyak 3 indikator telah sesuai target yaitu indikator Peningkatan kapasitas sumberdaya UKM dari target 2021 sebanyak 150 UKM terealisasi sebanyak 150 UKM, indikator Meningkatnya wirausaha yang mandiri dari target 2021 sebanyak 80 UKM terealisasi sebanyak 87 UKM dan indikator jumlah LKM yang dapat mengakses permodalan dari bank umum maupun BPR dari target 2021 sebanyak 3 LKM (izin OJK dan kemenkop), dan 3 LKM (akses permodalan dari bank umum maupun BPR) terealisasi sebanyak 3 LKM (izin OJK dan kemenkop), dan 3 LKM (akses permodalan dari bank umum maupun BPR). Sebanyak 4 indikator tidak tercapai yaitu indikator Persentase koperasi sehat dari target 2021 sebesar 37 s.d. 38% terealisasi 27,55%, indikator Meningkatnya kemampuan UMKM untuk mengakses permodalan dari target 2021 sebanyak 200 UKM terealisasi sebanyak 50 UKM, indikator Informasi permodalan bagi UMKM dari target 2021 sebanyak 400 UMKM terealisasi sebanyak 0 UKM, dan indikator Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi dari target 2021 sebanyak 100 koperasi terealisasi sebanyak 30 koperasi. Sedangkan 1 indikator tidak dapat dievaluasi karena belum dapat dihitung yaitu indikator kontribusi UKM terhadap PDRB akibat pandemi Covid19.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan koperasi dan UKM dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29. Capaian Kinerja Urusan Wajib Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Banjarnegara 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kontribusi UKM terhadap PDRB	14 s.d. 15	NA	13 s.d. 14	NA	NA		Disperindagkop UKM

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Persentase koperasi sehat	38 s.d. 39	30.07	37 s.d. 38	27.55 %	74,45	▼	Disperindagkop UKM
3	Peningkatan kapasitas sumberdaya UKM	150 UKM	18 UMKM	150 UKM	150 UKM	100%	●	Disperindagkop UKM
4	Meningkatnya wirausaha yang mandiri	80 UKM	0	80 UKM	87 UKM	109%	●	Disperindagkop UKM
5	Meningkatnya kemampuan UMKM untuk mengakses permodalan	200 UMKM	0	200 UMKM	50 UMKM	25 %	▼	Disperindagkop UKM
6	Informasi permodalan bagi UMKM	400 UMKM	50	400 UMKM	0	0	▼	Bag Perekonomian
7	Jumlah LKM yang mendapat izin OJK dan kemenkop, dan jumlah LKM yang dapat mengakses permodalan dari bank umum maupun BPR	3 LKM (izin OJK dan kemenkop), dan 3 LKM (akses permodalan dari bank umum maupun BPR)	0	3 LKM (izin OJK dan kemenkop), dan 3 LKM (akses permodalan dari bank umum maupun BPR)	3 LKM (izin OJK dan kemenkop), dan 3 LKM (akses permodalan dari bank umum maupun BPR)	100%	●	Bag Perekonomian
8	Meningkatnya kualitas SDM pengelola koperasi	100 Koperasi	35 Koperasi	100 Koperasi	30 Koperasi	30%	▼	Disperindagkop UKM

Sumber: Disperindagkop UKM

Berdasarkan data yang dihimpun, koperasi aktif menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, koperasi sehat juga menunjukkan tren peningkatan, meski belum semua koperasi telah dilakukan asesmen perihal kesehatan operasional maupun finansialnya. Berikut ini disajikan data perihal koperasi aktif dan sehat.

Tabel 2.30. Data Jumlah Koperasi Aktif dan Sehat

Kriteria	Jumlah				
	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah koperasi	409	415	402	402	406
Koperasi yang aktif	329	339	326	337	341
Koperasi yang tidak aktif	80	76	76	65	65
Koperasi yang dinilai kesehatannya	22	82	66	70	70

Koperasi sehat	3	15	15	17	18
Koperasi cukup sehat	19	67	51	53	51
Koperasi tidak/kurang sehat	-	-	-	-	1

Sumber: Disperindagkop UKM

12. Penanaman modal

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 3 indikator capaian urusan penanaman modal sebanyak 1 indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional dari target 2021 sebesar 15 s.d 17,5% terealisasi sebesar 28,33%. Sedangkan 2 indikator lainnya tidak tercapai yaitu indikator Jumlah Investor berskala nasional; Jumlah nilai Investasi berskala nasional dari target 2021 sebanyak 30 terealisasi sebanyak 23 dan indikator % ijin lokasi yang sesuai dengan tata ruang dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 1%.

Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan penanaman modal bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.31. Capaian Kinerja Urusan Wajib Penanaman Modal Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase peningkatan nilai investasi berskala nasional	17,5 s.d. 20	-50,7 Rp.270.307.861.092	15 s.d. 17,5	28,33 346.889.649.356	162	●	Disnaker PMPTSP
2	Jumlah Investor berskala nasional; Jumlah nilai Investasi berskala nasional	35	59	30	23	77	▼	Disnaker PMPTSP
3	% ijin lokasi yang sesuai dgn tata ruang	100	7	100	1	1	▼	Disnaker PMPTSP




Sumber: DPMPTSP Kab. Banjarnegara

13. Kepemudaan dan olah raga

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 3 indikator Urusan Kepemudaan dan Olahraga

sebanyak 1 indikator telah sesuai target yaitu terlaksananya pembinaan PASKIBRAKA dari target 2021 sebanyak 1 orang yang lolos seleksi di tingkat provinsi terealisasi sebanyak 2 orang Sedangkan 1 indikator belum sesuai target yaitu indikator Jumlah siswa berprestasi Tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional dari target 2021 sebanyak 25 orang terealisasi sebanyak 20 orang. Sebanyak 1 indikator tidak tercapai yaitu terlaksananya porseni tripartit Kabupaten Banjarnegara dari target 2021 sebanyak 1,90% terealisasi sebanyak 0%. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.32. Capaian Kinerja Urusan Wajib Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jml siswa berprestasi tk. Propinsi, Nas dan Internasional	35	27	25	20	80%		Dindikpora
2	Terlaksananya pembinaan pembinaan PASKIBRAKA tingkat Kabupaten	1	1	1	2	200%		Bag Pemotda
3	Terlaksananya porseni tripartit Kabupaten Banjarnegara	2,10	0	1,90%	0	0		Disnaker PMPTSP

Sumber Dindikpora Kab. Banjarnegara




14. Statistik

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 3 indikator Capaian pada urusan statistik semua indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator Tersedianya data statistik sektoral kabupaten dari target 2021 sebanyak 3 jenis dokumen (BDA, KDA, Statistik sektoral) terealisasi sebanyak 3 jenis dokumen, indikator Tersedianya data indikator makro daerah dari target 2021 sebanyak 5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williamson terealisasi 5 jenis indikator dan indikator Persentase

desa dan kelurahan yang aktif melakukan update data dan informasi desanya dari target 2021 sebesar 65% terealisasi sebesar 100%.

Secara rinci kinerja pembangunan urusan statistik dapat dilihat pada tabel berikut ini.


Tabel 2.33. Capaian Kinerja Urusan Wajib Statistik Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Tersedianya data statistik sektoral kabupaten	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	3 Jenis (BDA, KDA, Statistik Sektoral Kabupaten)	100		Dinkominfo
2	Tersedianya data indikator makro daerah	5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williamson)	5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williamson)	5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williamson)	5 jenis indikator (LPE, PDRB, Inflasi, NTP, Indeks Williamson)	100		Baperlitbang
3	Persentase desa dan kelurahan yang aktif melakukan update data dan informasi desanya.	70%	100%	65%	100%	153,8%		Dispermades

Sumber : Baperlitbang Kab. Banjarnegara

15. Persandian



Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, capaian urusan persandian telah tercapai sesuai target yaitu indikator Prosentase terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Informasi pada OPD dari target 2021 sebesar 25% terealisasi sebesar 25%. Berikut ini disajikan capaian indikator urusan persandian.




No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prosentase terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Pengamanan Informasi pada OPD	25%	25%	25%	25%	100%		Dinkominfo

16. Kebudayaan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 6 indikator capaian urusan kebudayaan sebanyak 3 indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator Jumlah kelompok seni yang aktif dari target 2021 sebanyak 2 terealisasi sebanyak 143, indikator Persentase TMP dan Monumen-Monumen yang terpelihara dengan baik dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100% dan indikator jumlah cagar budaya yang dikelola dari target 2021 sebanyak 8 cagar budaya terealisasi sebanyak 99 cagar budaya. Sedangkan 2 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Persentase pelaksanaan pembentukan satgas pengembangan nilai-nilai budaya di desa dari target 2021 sebesar 80% terealisasi sebesar 0% dan Indikator jumlah event budaya daerah dari target 2021 sebanyak 8. Terealisasi sebanyak 0. Sedangkan 1 indikator belum bisa dievaluasi yaitu indikator Indeks Kebudayaan karena data belum dirilis.

Tabel 2.34. Capaian Kinerja Urusan Wajib Kebudayaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Kebudayaan	77,71	85%	68,68	NA	NA		Disparbud
2	Jumlah kelompok seni yang aktif	2	1675	2	143	7.150%		Disparbud
3	Persentase pelaksanaan pembentukan satgas	85%	0	80%	0	0		Dispermades PPKB

	pengembangan nilai-nilai budaya di desa							
4	Persentase TMP dan Monumen- Monumen yang terpelihara dengan baik	100%	55	100%	100	100%		Dinsos P3A
5	jumlah cagar budaya yang dikelola	7	40	8	99	1.237%		Disparbud
6	jumlah event budaya daerah	8	2	8	8	0		Disparbud



Sumber : Disparbud Kab. Banjarnegara

17. Perpustakaan

Dari hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 3 indikator pada urusan perpustakaan sebanyak 2 indikator sudah sesuai target dan 1 indikator tidak tercapai. Ke-2 indikator yang sudah sesuai target yaitu indikator Persentase pengelola perpustakaan yang meningkat kompetensinya dengan target 2021 sebesar 21,52% terealisasi sebesar 32,09% dan indikator Persentase perpustakaan milik masyarakat dan lembaga lainnya yang dibina dari target 2021 sebesar 23,81% terealisasi sebesar 43,08%. Sedangkan 1 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan dari target 2021 sebesar 36.500 terealisasi sebesar 13.421. Secara rinci kinerja pembangunan urusan perpustakaan dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 2.35. Capaian Kinerja Urusan Wajib Perpustakaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan	37.000	11.233	36.500	13.421	36,77%		Disarpus



2	Persentase pengelola perpustakaan yang meningkat kompetensinya	21,52	0	21,52	32,09%	149,12%		Disarpus
3	Persentase perpustakaan milik masyarakat dan lembaga lainnya yang dibina	23,81	0	23,81	43,08%	180,93%		Disarpus

Sumber: Disarpus Kab. Banjarnegara

18. Kearsipan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 3 indikator pada urusan kearsipan 2 indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator Persentase OPD yang melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif secara baik dengan capaian 8,33% dari target 2021 sebesar 8,33% dan indikator Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang tersedia dan memadai dengan capaian sebesar 8,33% dari target 2021 sebesar 8,33%. Sedangkan 1 indikator tidak dapat dievaluasi karena tidak ada target pada tahun 2021 di RPJMD yaitu indikator Persentase pengelola arsip di unit pengolah yang meningkat kompetensinya. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kearsipan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.36. Capaian Kinerja Urusan Wajib Kearsipan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5		7	8	9
1	Persentase OPD yang melakukan pengelolaan arsip dinamis aktif secara baik	8,33	8,33	8,33	8,33	100%		Disarpus
2	Persentase sarana dan prasarana kearsipan yang tersedia dan memadai	8,33	8,33	8,33	8,33	100%		Disarpus

3	Persentase pengelola arsip di unit pengolah yang meningkat kompetensinya	41,03	0	-	-	0	Disarpus
---	--	-------	---	---	---	---	----------

Sumber: Disarpus Kab. Banjarnegara

2.3.2. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 4 indikator urusan kelautan dan perikanan semua 1 indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator produksi perikanan budidaya dari target 2021 sebesar 21.500 ton terealisasi sebesar 38.282,62 ton, indikator produksi benih ikan dari target 2021 sebesar 2.288 Juta ekor terealisasi sebesar 2.529.655.019 ekor, indikator produksi perikanan tangkap dari target 2021 sebesar 1.250 ton terealisasi sebesar 1.253,238 ton dan indikator Konsumsi ikan dari target tahun 2021 sebesar 21,7 kg/kap/th terealisasi sebesar 27,45 kg/kap/th. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.37. Capaian Kinerja Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Produksi perikanan budidaya	21.500 Ton	34.977	21.500 Ton	38.282,62 ton	178	<div></div>	Distankan KP
2	Produksi benih ikan	2.879 juta ekor	2.323	2.288 juta ekor	2.529.655.019 ekor	110	<div></div>	Distankan KP
3	Produksi perikanan tangkap	1.250 Ton	1.384	1.250 Ton	1.253,238 ton	100,2	<div></div>	Distankan KP
4	Konsumsi ikan	21,70 kg/kap/th	26,97	21,7 kg/kap/th	27,45 kg/kap/th	126	<div></div>	Distankan KP

Sumber: Dintankan Kab. Banjarnegara

2. Pariwisata

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 4 indikator capaian urusan pariwisata sebanyak 2 indikator telah tercapai sesuai target dan 2 indikator tidak tercapai. Ke-2 indikator yang telah sesuai target yaitu indikator Jumlah kegiatan pameran promosi pariwisata, jumlah kunjungan pariwisata dari target 2021 sebesar 5 terealisasi sebesar 11 dan indikator Jumlah pembinaan pelaku usaha pariwisata, Jumlah kerjasama dengan lembaga/dunia usaha dari target 2021 sebesar 5 dan 2 terealisasi sebanyak 8 dan 3. Sedangkan 2 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan dari target 2021 sebanyak 2.200.000 kunjungan wisatawan terealisasi sebanyak 1.219.574 kunjungan dan indikator jumlah dan jenis produk destinasi pariwisata dari target 2021 sebesar 3 dan 3 terealisasi 1 dan 1. Secara rinci kinerja pembangunan urusan pariwisata dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.38. Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pariwisata Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prosentase peningkatan kunjungan wisatawan	3%	-47,6% (972.705 orang)	3% (2.200.000)	(1.219.574)	55,44%	▼	Disparbud
2	Jumlah kegiatan pameran promosi pariwisata, jumlah kunjungan pariwisata	5	0	5	11	220	●	Disparbud
3	Jumlah dan Jenis produk Destinasi Pariwisata	3 dan 3	4 dan 4	3 dan 3	1 dan 1	11,1	▼	Disparbud
4	Jumlah pembinaan pelaku usaha pariwisata, Jumlah kerjasama dengan	5 dan 2	4 dan 2	5 dan 2	8 dan 3	155	●	Disparbud

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	lembaga/dunia usaha							

Sumber : Disparbud Kab. Banjarnegara

Selain data capaian kinerja, pada tabel berikut ini disajikan data jumlah obyek wisata serta sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Kabupaten Banjarnegara.

Tabel 2.39. Data Obyek Wisata di Kabupaten Banjarnegara

Nama Obyek Wisata	Lokasi	Jenis Wisata
Kawasan Wisata DT Dieng	Kec. Batur	Alam
TRMS Seruling Mas	Kec. Banjarnegara	Rekreasi
Waduk Mrica	Kec. Bawang	Air
Kolam Renang Anglir Mendung	Desa Paweden Kec. Karangobar	Air
Kerajinan Keramik	Kec. Purworejo Klampok	Industri
Pemandian Air Panas	Desa Gumelem Wetan Kec. Susukan	Air
Pemandian Air Panas	Desa Tempuran Kec. Wanayasa	Air
Curug Pitu	Desa Kemiri Kec. Sigaluh	Alam
Curug Pletuk	Desa Pesangkalan Kec. Pagedongan	Alam
Curug Sikopel	Kec. Pagentan	Alam
Giri Tirta	Kec. Pejawaran	Alam
Arung Jeram Serayu	Desa Singomerto Kec. Sigaluh	Minat Khusus

Sumber : Disparbud Kab. Banjarnegara

Tabel 2.40. Data Sarana dan Prasarana Pariwisata di Kabupaten Banjarnegara

Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
Hotel		
• Hotel Melati	8 Buah	Kamar: 220, tempat tidur: 440
• Hotel Bintang	1 Buah	Kamar: 124, tempat tidur: 248
Home Stay	132 Buah	Dieng Kulon, Kepakisan, Karang Tengah
Rumah Makan Layak Wisata	37 Buah	Kursi: 851 buah
Biro Perjalanan Wisata	14 Buah	-
Kios Cinderamata :		
• Keramik	20 Buah	Klampok
• Batik Tulis	5 Buah	Susukan
• Pusat oleh-oleh	4 Buah	Dieng dan Banjarnegara
Gelanggang Renang	6 Buah	Serulingmas, Anglir Mendung, Tirta Teja, Surya Yudha Sport Center, Serayu Park, D'Qiano hotspring water park
Padang Golf	1 Buah	9 hole



Sumber : Disparbud Kab. Banjarnegara

3. Pertanian

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 14 indikator capaian urusan pertanian sebanyak 9 indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator produksi kopi dari target

2021 sebesar 1.318,73 Ton terealisasi sebesar 2.332,73, indikator produksi durian dari target 2021 sebesar 5.073,22 Ton terealisasi sebesar 6.736,30, indikator produksi cabai dari target 2021 sebesar 16.419,31 Ton terealisasi sebesar 23.973,40, indikator produksi padi dari target 2021 sebesar 161.263,51 Ton terealisasi sebesar 169.853,00, indikator produksi lada dari target 2021 sebesar 121 Ton terealisasi sebesar 170,63 ton, indikator cakupan bina kelompok tani dari target tahun 2021 sebesar 90% terealisasi sebesar 90%, , indikator populasi domba batur dari target 2021 sebesar 9.250 ekor terealisasi sebesar 9.471 ekor, indikator populasi kambing/domba dari target 2021 sebesar 263.398 ekor terealisasi sebesar 279.392 dan indikator Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang bersertifikat pra NKV dari target sebanyak 3 terealisasi sebanyak 3. Sebanyak 2 indikator belum sesuai target yaitu indikator Nilai Tukar Petani (NTP) dari target tahun 2021 sebesar 103 sd. 104 terealisasi sebesar 102,45 dan indikator populasi sapi dari target 2021 sebanyak 32.076 ekor terealisasi sebanyak 31.340 ekor. Sedangkan 2 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator pelaksanaan event promosi dari target 2021 sebanyak 4 kali terealisasi sebanyak 1 kali dan indikator produksi jagung dari target 2021 sebesar 67.790,15 Ton terealisasi sebesar 51.949,82. Sedangkan 1 indikator belum dapat dievaluasi yaitu indikator pertumbuhan sektor pertanian karena data belum dapat dihitung. Secara rinci kinerja urusan pertanian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.41. Capaian Kinerja Urusan Pilihan Pertanian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan sektor pertanian	3 s.d. 4	3,53	2,7 s.d. 3,7	NA	NA		DistankankP
2	Nilai Tukar Petani (umum)	103 s.d. 105	105,63	103 s.d. 104	102,45	99,46		DistankankP
3	Pelaksanaan event promosi	4 kali	2 kali	6 kali	1	16,67		DistankankP

4	Produksi kopi	1.368,73	2.214,40	1.318,73	2.332,73	177	●	DistankanKP
5	Produksi durian	5.326,88	11.684,00	5.073,22	6.736,30	133	●	DistankanKP
6	Produksi cabai	12.240,27	30.268,20	16.419,31	23.973,40	146	●	DistankanKP
7	Produksi padi	162.069,83	171.076,90	161.263,51	169.853,00	105,32	●	DistankanKP
8	Produksi Jagung	68.468,05	63.072,50	67.790,15	51.949,82	76,63	▼	DistankanKP
9	Produksi lada	121,50	172,7	121,00	170,63	141	●	DistankanKP
10	Cakupan bina kelompok tani	90%	76,62	90%	90%	100	●	DistankanKP
11	Populasi Domba Batur	9.500 ekor	9.471 Ekor	9.250 ekor	9.471	102,39	●	DistankanKP
12	Populasi Sapi	32.269 ekor	29.448 Ekor	32.076 ekor	31.340	97,70	▶	DistankanKP
13	Populasi Kambing/Domba	263.925 ekor	265.571 Ekor	263.398 ekor	279.392	106	●	DistankanKP
14	Jumlah unit usaha pangan asal hewan yang bersertifikat pra NKV	3	3	3	3	100	●	DistankanKP

Sumber: Dintankan Kab. Banjarnegara







4. Perdagangan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 10 indikator sebanyak 6 indikator telah sesuai target yaitu indikator meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan program pemantauan kepokmas dari target 2021 sebanyak 288 kali terealisasi sebanyak 288 kali, indikator Optimalisasi penggunaan DBHCHT pada OPD dari target 2021 sebanyak 4 Kegiatan 8 OPD terealisasi sebanyak 6 kegiatan 6 OPD, indikator pemantauan dan pengawasan distribusi tabung LPG 3 kg dari target 2021 sebanyak 5 kegiatan 100 Pangkalan terealisasi sebanyak 8 kegiatan 100 pangkalan, indikator Pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat yang stabil (TPID dan pasar ramadhan) dari target 2021 sebanyak 5 Rakor 1750 paket terealisasi sebanyak 5 rakor 2.500 paket, indikator Meningkatnya jumlah kunjungan dari target 2021 sebanyak 23 pasar terealisasi sebanyak 23 pasar, dan indikator meningkatnya pelaksanaan kedisiplinan pedagang kakilima dari target 2021 sebanyak 40 PKL terealisasi sebanyak 75 PKL. Sebanyak 3 indikator tidak tercapai yaitu indikator meningkatnya pelaksanaan pengembangan dan pelatihan ekspor dan impor dari target 2021 sebanyak 45 UMKM terealisasi sebanyak 15 UMKM, indikator meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan program promosi dari target 2021 sebanyak 148 UKM terealisasi sebanyak 26 UMKM dan , indikator Meningkatnya bangunan gedung pasar

dari target 2021 sebanyak 26 gedung pasar terealisasi sebanyak 9 gedung pasar. Sedangkan 1 indikator lainnya yaitu pertumbuhan sektor perdagangan belum dapat dievaluasi karena belum dapat dihitung akibat pandemi Covid19.

Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan perdagangan bisa dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.42. Capaian Kinerja Urusan Pilihan Perdagangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan sektor perdagangan	8,4 s.d. 9	NA	8,3 s.d. 9	NA	NA		
2	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan program pemantauan kepokmas	320 kali	150 kali	288 Kali	288 Kali	100%		Disperindagkop UKM
3	Optimalisasi penggunaan DBHCHT pada OPD	4 keg, 8 OPD	4 keg, 10 OPD	4 keg, 8 OPD	6 keg, 6 OPD	112,5		Bag Perekonomian
4	Pemantauan dan pengawasan distribusi tabung LPG 3 kg	5 keg, 100 pangkalan	5 keg, 70 pangkalan	5 keg, 100 pangkalan	8 keg,100 pangkalan	130		Bag Perekonomian
5	Pemantauan ketersediaan dan harga kebutuhan pokok masyarakat yang stabil (TPID dan pasar ramadhan)	5 rakor, 1500 paket	5 rakor, 1500 paket	5 rakor, 1750 paket	5 rakor 2.500 paket	142,8		Bag Perekonomian
6	Meningkatnya pelaksanaan pengembangan dan pelatihan ekspor dan import	50 UKM	0	45 UMKM	15 UMKM	33%		Disperindagkop UKM
7	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan program promosi	109 UMKM	20	148 UMKM	26 UMKM	18 %		Disperindagkop UKM

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Meningkatnya bangunan gedung pasar	30 Gedung Pasar	10 Gedung pasar	26 Gedung Pasar	9 Gedung Pasar	35 %	▼	Disperindagkop UKM
9	Meningkatnya jumlah kunjungan	23 Pasar	0	23 Pasar	23 Pasar	100 %	●	Disperindagkop UKM
10	Meningkatnya pelaksanaan kedisiplinan pedagang kakilima	75 PKL	35 PKL	40 PKL	75 UMKM	188 %	●	Disperindagkop UKM

Sumber : Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara

Berikut ini disajikan data jumlah pasar di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2016

Tabel 2.43. Data Jumlah Pasar Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

Uraian	Jumlah
Pasar tradisional	24 unit
Jumlah pasar tradisional yang dibina	24 unit
Pasar modern	72 unit

Sumber : Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara dan DPMPTSP Kab. Banjarnegara

5. Perindustrian

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 6 inidkator capaian kinerja urusan perindustrian sebanyak 3 indikator yang telah tercapai sesuai target yaitu indikator persentase meningkatnya kemampuan SDM Wirausaha dan tenaga kerja IKM tentang IPTEK sistem produksi dari target 2021 sebesar 2,24% terealisasi sebesar 2,24%, indikator Prosentase peningkatan SDM IKM yang berkualitas dari target 2021 sebesar 2,5% terealisasi sebesar 2,5% dan indikator Tersedianya Data sistem informasi IKM dari target 2021 sebanyak 1 IKM terealisasi sebanyak 1 IKM. Sebanyak 2 indikator tidak tercapai yaitu indikator pemberdayaan Dekranasda dari target 2021 sebanyak 2 Diklat, 5 ekspo terealisasi 0 Diklat, 2 Ekspo dan indikator meningkatnya kemampuan tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi industri dari target 2021 sebesar 275 terealisasi sebesar 205. Sedangkan 1 indikator lainnya belum dapat dihitung karena pandemi Covid 19 yaitu indikator Pertumbuhan sektor

industri. Secara rinci kinerja urusan pembangunan urusan perindustrian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.44. Capaian Kinerja Urusan Pilihan Perindustrian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan sektor industri	7,1 s.d. 8	NA	7 s.d. 8	NA	NA		Disperindagkop UKM
2	Prosentase meningkatnya kemampuan SDM Wirausaha dan tenaga kerja IKM tentang IPTEK sistem produksi	2,69	1.75	2,24	2,24	100	●	Disperindagkop UKM
3	Prosentase peningkatan SDM IKM yang berkualitas	0,3	0.3	2,5	2,5	100	●	Disperindagkop UKM
4	Pemberdayaan Dekranasda	2 Diklat, 5 ekspo	0	2 Diklat, 5 ekspo	0 Diklat, 2 ekspo virtual	20	▼	Bag Perekonomian
5	Meningkatnya kemampuan tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi industri	325	175	275	205	75	▼	Disperindagkop UKM
6	Tersedianya Data sistem informasi IKM	1	1	1	1	100	●	Disperindagkop UKM

Sumber : Disperindagkop UKM Kab. Banjarnegara

6. Transmigrasi

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, Capaian kinerja urusan ketransmigrasian yang hanya 1 indikator tidak tercapai dari target 2021 sebesar 10 KK, karena pada tahun 2021 kegiatan pengiriman transmigran tidak teranggarkan. Secara rinci kinerja pembangunan urusan ketransmigrasian dapat dilihat dari tabel berikut ini.

Tabel 2.45. Capaian Kinerja Urusan Pilihan Ketrasmigrasian Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah transmigran yang ditempatkan	10 KK	0	10 KK	0	0	▼	Disnaker PMPTSP

Sumber : Disnakertrans Kab. Banjarnegara

2.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Administrasi pemerintahan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 14 indikator capaian kinerja urusan administrasi pemerintahan sebanyak 12 indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator Survey Kepuasan Masyarakat dari target 2021 sebesar 79 terealisasi sebesar 82,56, indikator Nilai AKIP Kabupaten dari target 2021 kategori B terealisasi kategori B dengan nilai 68,04, indikator terselesaikannya kegiatan pengadaan barang/jasa melalui proses lelang secara elektronik dari target 2021 sebesar 98% terealisasi 98%, indikator Perda inisiatif yang tersusun dari target 2021 sebanyak 22 perda terealisasi 23 perda, indikator terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dari target 2021 yaitu 1 kegiatan terealisasi 1 kegiatan, indikator Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang mandiri dari target 2021 sebesar 80% terealisasi sebesar 85,53%, indikator Persentase penerapan kebijakan pelayanan publik dari target 2021 sebesar 100% terealisasi 100%, indikator Terkoordinasinya dan Terfasilitasinya Kerjasama antar Pemerintah Daerah dari target 2021 sebanyak 1 kegiatan terealisasi 1 kegiatan, indikator jumlah kebijakan yang disusun dari target 2021 sebanyak 1 kebijakan terealisasi 1 kebijakan, indikator Tersusun dan Tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Desa dari target 2021 sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen, indikator Persentase OPD tepat fungsi dan ukuran dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, dan indikator Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM dari target 2021 sebanyak 125 Orang

terrealisasi sebanyak 130 orang. Sebanyak 1 indikator tidak tercapai yaitu indikator Terbentuknya produk hukum daerah dari target 2021 sebanyak 25 Perda; 85 Perbup; 1.350 SK terrealisasi sebanyak 6 Perda; 57 Perbup dan 986 SK Bupati. Sedangkan 1 indikator tidak dapat dievaluasi karena meskipun ada target dalam RPJMD namun tidak ada kegiatannya yaitu indikator Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan PILKADA, PILPRES, dan PILEG di Kabupaten karena tahun 2021 tidak ada agenda Pilkada, Pilpres dan Pileg. Secara rinci kinerja pembangunan urusan administrasi pemerintahan dapat dilihat dari tabel di bawah ini

Tabel 2.46. Capaian Kinerja Penunjang Administrasi Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Survey Kepuasan Masyarakat	80	82,39	79	82,56	104,51	<div></div>	Bag Organisasi (kgt sd Juli)
2	Nilai AKIP Kabupaten	B	B (66,65)	B	B (68,04)	102,09	<div></div>	Bag Organisasi
3	Terselesaikannya kegiatan pengadaan barang/jasa melalui proses lelang secara elektronik	98	99,3	98	98	100	<div></div>	Bag Pengadaan Barang dan Jasa
4	Perda inisiatif yang tersusun	22	20	22	23	104,54	<div></div>	Setwan
5	Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan Daerah	1	1	1	1	100	<div></div>	Bakesbangpolinmas
6	Persentase kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa yang mandiri	85%	90	80%	85,53%	106,91	<div></div>	Dispermades
7	Persentase penerapan kebijakan pelayanan publik	100%	100	100%	100%	100	<div></div>	Bag Organisasi
8	Terkoordinasinya dan Terfasilitasinya Kerjasama antar Pemerintah Daerah	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	1 kegiatan	100	<div></div>	Bag Pemotda

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Terbentuknya produk hukum daerah	Perda 25; Perbup 85; SK 1.350	Perda = 7 Perbup = 82 Sk = 854	Perda: 25; Perbup : 85; SK 1.350	Perda: 6; Perbup : 57; SK 986	57	▼	Bag Hukum
10	Jumlah kebijakan yang disusun	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	1 kebijakan	100	●	Bag Organisasi
11	Tersusun dan Tersosialisasinya Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	●	Dispermades PPKB
12	Persentase OPD tepat fungsi dan ukuran	100%	100	100%	100%	100	●	Bag Organisasi
13	Terselenggaranya Pengawasan Pelaksanaan PILKADA, PILPRES, dan PILEG di Kabupaten	1	0	1	0	NA		Bag Pemotda
14	Jumlah SDM yang mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas SDM	125 Orang	0	125 Orang	130 Orang	104	●	Bag Perekonomian

Sumber: Setda Kab. Banjarnegara

2. Pengawasan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, capaian kinerja urusan pengawasan dari 6 indikator sebanyak 5 indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan : a. Inskab, b. Insprov, c. BPK RI dari target 2021 sebesar a.98 b.98 c.80 terealisasi sebesar a.91,43 b.100 c.96,22, indikator Maturitas SPIP (Prosentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP) dari target 2021 sebesar 60% (atau 3,083) terealisasi sebesar 60% (atau 3,083), indikator Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah dari target 2021 sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 2 dokumen, indikator Persentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP dari target 2021 sebesar 95%

terrealisasi sebesar 95% dan indikator jumlah dokumen pedoman pengawasan dengan dari target 2021 sebanyak 2 dokumen terrealisasi sebanyak 2 dokumen. Sedangkan 1 indikator lainnya yaitu indikator Indeks Reformasi Birokrasi tidak dapat dievaluasi karena tidak ada targetnya dalam RPJMD dan data terbaru belum dirilis oleh KemenpanRB..

Secara rinci kinerja pembangunan urusan pengawasan dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.47. Capaian Kinerja Penunjang Pengawasan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Indeks Reformasi Birokrasi		63,01		NA	NA		Inspektorat
2	Prosentase penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan: a. Inskab, b. Insprov, c. BPK RI	a.98 b.98 c.80	a. 89,64 b. 100 c. 95,23	a.98 b.98 c.80	a. 91,43 b. 100 c. 96,22	a. 93,30 b. 102.04 c. 120,28		Inspektorat
3	Maturitas SPIP Prosentase pemenuhan unsur penilaian maturitas SPIP	60%	60% (3,083)	60%	60% (2,452)	100		Inspektorat
4	Tersusunnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah	3 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100		Inspektorat
5	Persentase terpenuhinya unsur kapabilitas APIP	95%	95%	95%	95%	100		Inspektorat
6	Jumlah dokumen pedoman pengawasan	2	2	2	2	100		Inspektorat

Sumber: Inspektorat Kab. Banjarnegara





3. Perencanaan








Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 17 indikator capaian kinerja urusan perencanaan sebanyak 9 indikator telah tercapai sesuai target yaitu indikator Terfasilitasinya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Banjarnegara dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, indikator Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dari target 2021 sebanyak 1 dokumen terealisasi sebanyak 1 dokumen, indikator Meningkatnya kapasitas aparatur perencana di Kabupaten Banjarnegara dari target 2021 sebanyak 20 OPD terealisasi sebanyak 24 OPD Kabupaten dan 20 OPD Kecamatan, indikator Kesesuaian program dalam RKPD yang ada di dalam RPJMD dari target 2021 sebesar >90 terealisasi sebesar 100%, indikator Kesesuaian program dalam APBD yang ada di dalam RKPD dari target 2021 sebesar >90% terealisasi sebesar 100%, indikator tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi dari target 2021 sebanyak 3 dokumen terealisasi sebanyak 3 dokumen, indikator Terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan pemerintahan, kesejahteraan dan sosial dari target 2021 sebesar 100% terealisasi sebesar 100%, indikator tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dari target 2021 sebanyak 2 dokumen terealisasi sebanyak 10 dokumen, indikator terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam dari target 2021 sebanyak 1 kegiatan terealisasi sebanyak 1 kegiatan. Sebanyak 1 indikator belum sesuai target yaitu indikator Persentase penduduk dari target 2021 sebesar 15,2% s.d. 14,6% terealisasi sebesar 16,23% (meningkat). Sebanyak 1 indikator tidak tercapai yaitu indikator Tersediannya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan dari target 2021 sebanyak 2 dokumen terealisasi 0. Sedangkan 5 indikator tidak dapat dievaluasi karena data belum dirilis oleh BPS serta tidak ada targetnya dalam RPJMD untuk tahun 2021 yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi, indikator PDRB Per Kapita, indikator Indeks Williamson, indikator Indeks

Pembangunan Manusia, indikator laju inflasi dan indikator Tersedinya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar (tidak ada targetnya di RPJMD untuk tahun 2021 meskipun ada outputnya 1 kegiatan).

Secara rinci pencapaian indikator fungsi perencanaan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.48. Capaian Kinerja Penunjang Perencanaan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,4 s.d 5,75	5,6*	5,4 s.d 5,75	NA	NA		Baperlitbang
2	PDRB Per Kapita	> 21,5 Juta	21,5*	> 21 Juta	NA	NA		Baperlitbang
3	Indeks Williamson	0,43	0,43*	0,44	NA	NA		Baperlitbang
4	Indeks Pembangunan Manusia		67,45		74,28	NA		Baperlitbang
5	Laju Inflasi	3 ± 1	1,90	3 ± 1	NA	NA		Baperlitbang
6	Persentase penduduk miskin	14,6 s.d. 14	15,64 %	15,2 s.d. 14,6	16,23	93%		Baperlitbang
7	Terfasilitasinya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dengan perguruan tinggi yang melakukan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Banjarnegara	100%	75 %	100%	100%	100%		Baperlitbang
8	Tersediannya dokumen perencanaan pengembangan wilayah perbatasan	2 dok	0	2 dok	0	0%		Baperlitbang
9	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	1 dok	-	1 dok	1 dok	100		Baperlitbang











No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Tersedianya dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	-	4 Kegiatan	-	1 Kegiatan	NA		Baperlitbang
11	Meningkatnya kapasitas aparatur perencana di Kabupaten Banjarnegara	24 OPD	0	20 OPD	24 OPD 20 Kec.	120		Baperlitbang
12	Kesesuaian program dalam RKPD yang ada di dalam RPJMD	>90%	94,2 %	>90%	100%	111		Baperlitbang
13	Kesesuaian program dalam APBD yang ada di dalam RKPD	>90%	94 %	>90%	100%	111		Baperlitbang
14	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	3 dokumen	100		Baperlitbang
15	Terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan pemerintah, kesejahteraan dan sosial	100%	95 %	100%	100%	100		Baperlitbang
16	Tersedianya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	2 dok	7 dok	2 dok	10 dok (dokumen PSETK dalam 10 klaster)	500		Baperlitbang
17	terkoordinasi dan terfasilitasinya perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg	100		Baperlitbang

Sumber: Baperlitbang Kab. Banjarnegara

4. Keuangan

Berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan IV tahun 2021, dari 12 indikator capaian pada urusan Keuangan semua indikator tercapai bahkan ada yang melampaui target. Realisasi PAD pada tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup besar, semua unsur PAD mengalami kenaikan bahkan kenaikan yang paling dominan dari Lain-lain PAD yang sah (pendapatan BLUD untuk covid). Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tahun 2021 juga masih dengan WTP untuk yang ke- 8 kalinya. Secara rinci pencapaian indikator urusan keuangan bisa dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49. Capaian Kinerja Penunjang Keuangan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Rasio kemandirian keuangan daerah	9,48	11,98	9,38	15,04	160,34		BPPKAD
2	Opini Badan Pemeriksa Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	100		BPPKAD
3	Persentase pertumbuhan PAD	4,14%	-7,27	4,03%	31,48	781,14		BPPKAD
4	Persentase pertumbuhan Pendapatan PBB dan BPHTB	2,22%	1,73	1,81%	9,02	498,34		BPPKAD
5	Persentase pertumbuhan Pajak dan Retribusi	5,97%	-12,34	5,91%	14,12	238,91		BPPKAD
6	Penetapan APBD tepat waktu	100	100	100	100	100		BPPKAD
7	Persentase Kegiatan dalam KUA PPAS yang terakomodir dalam APBD	>90%	100	>90%	>90	100		BPPKAD
8	Persentase penerbitan SP2D tepat waktu	100%	100	100%	100	100		BPPKAD
9	Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan SAP yang terselesaikan tepat waktu	100%	100	100%	100	100		BPPKAD
10	Tingkat penyerapan DAK dan Bantuan Keuangan Provinsi	100%	93,65	100%	105,90	105,90		BPPKAD

11	Jumlah Pendapatan BUMD yang disetor ke Kas Daerah	3,954124 Milyar	15,290 Milyar	3,594658 Milyar	17.259.412.303			BPPKAD
12	Persentase satker yang telah mengimplementasikan SIMDA BMD	59,16%	100	52,33%	100	100		BPPKAD

Sumber: BPPKAD Kab. Banjarnegara

5. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan

Berdasarkan hasil evaluasi triwulan IV tahun 2021, dari 3 indikator pada urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan 2 indikator telah tercapai melebihi target yaitu indikator meningkatnya kinerja kelembagaan dengan capaian 25 SKPD dari target 2021 sebesar 24 SKPD dan indikator terfasilitasinya PNS yang pindah/purna tugas dengan capaian 112,73% dari target 2021 sebesar 100%. Sedangkan 1 indikator yang tidak tercapai yaitu indikator meningkatnya profesionalisme PNS dengan capaian 39,39% dari target 2021 sebesar 100%. Secara rinci kinerja pembangunan urusan kepegawaian dapat dilihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 2.50. Capaian Kinerja Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021

No	Indikator	Target RPJMD	Realisasi th. 2020	Tahun 2021		Tingkat Capaian RKPD 2021 s.d TW IV (%)	Status	PD Penanggung Jawab
				Target	Realisasi s.d TW IV 2021			
1	2	3	4	5		7	8	9
1	Meningkatnya profesionalisme PNS	100%	19,09	100%	39,39%	39,39%		BKD
2	Meningkatnya kinerja kinerja kelembagaan	24	25	24	25	104,17%		BKD
3	Terfasilitasinya PNS yang pindah/purna tugas	100%	106,63	100%	112,73%	112,73%		BKD

Sumber: BKD Kab. Banjarnegara

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Capaian kinerja pada aspek daya saing daerah secara rinci disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.51. Capaian Kinerja Aspek Daya Saing Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

Indikator Kinerja	Satuan	Pencapaian Kinerja				
		2017	2018	2019	2020	2021
Nilai Tukar Petani	%	104,18	102,04	102,04	103,86	102,93
Pengeluaran riil per kapita	Rp 000	7.570	7.654	7.684	7.930	8.400

Sumber: BPS Kab. Banjarnegara

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2017-2021

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pendanaan/sumber-sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD, maka analisis pengelolaan keuangan daerah menjelaskan tentang aspek kebijakan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

1. Pendapatan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Pendapatan Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta 3) Lain-lain pendapatan yang sah yang meliputi Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.

Pendapatan daerah menjadi sumber pendanaan utama dalam pelaksanaan pembangunan, sehingga upaya peningkatan

pendapatan khususnya pendapatan asli daerah menjadi prioritas dalam rangka peningkatan kapasitas fiskal yang akan berbanding lurus dengan keleluasaan ruang dalam pencapaian visi kepala daerah. Dalam tahun 2017-2021 kebijakan pendapatan meliputi:

- a. Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi sektor pajak daerah, retribusi daerah, pendayagunaan aset daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- b. Melakukan upaya peningkatan dana perimbangan dari Dana Alokasi Umum dan bagi hasil pajak, serta bukan pajak.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia yang ada guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Mengembangkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan potensi daerah.
- e. Meningkatkan kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara dari tahun 2017-2021 mengalami penurunan dari sebesar Rp 2.167.801.161.490,- menjadi sebesar Rp 2.086.011.631.250,-.

Dilihat dari masing-masing unsur pendapatan dalam APBD, sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 seluruh unsur pendapatan daerah menunjukkan peningkatan. PAD meningkat dari sebesar Rp 210.744.662.990,- menjadi Rp 313.782.512.336,-; Dana Perimbangan menurun dari sebesar Rp 1.776.057.602.800,- menjadi Rp 1.251.747.015.765,- ; Lain-lain pendapatan yang sah meningkat dari sebesar Rp 1.185.202.700,- menjadi Rp 108.293.665.561,-. Peningkatan PAD menunjukkan bahwa di Kabupaten Banjarnegara ada upaya untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari potensi daerah. Tidak tertutup kemungkinan bahwa potensi tersebut masih bisa ditingkatkan lagi di masa yang akan datang.

Secara rinci perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021 (<i>unaudited</i>)
I	PENDAPATAN	2.167.801.161.490	2.074.653.161.695	2.105.990.272.337	1.994.604.106.561	2.086.011.631.250
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	210.744.662.990	235.994.436.137	257.700.650.110	238.638.994.321	313.782.512.336
A	Pendapatan Pajak Daerah	48.468.199.275	57.741.373.549	60.732.283.268	55.447.395.349	58.925.075.927
	Pajak Hotel	407.575.985	415.398.700	502.314.095	346.565.247	358.786.796
	Pajak Restoran	3.333.763.757	3.803.670.657	4.943.800.998	3.320.308.878	3.594.753.258
	Pajak Hiburan	359.347.565	366.093.569	277.256.950	103.188.341	106.273.165
	Pajak Reklame	645.559.595	687.109.952	668.228.623	865.897.408	1.088.296.395
	Pajak Penerangan Jalan	19.091.432.213	21.061.820.101	22.152.042.539	19.824.966.103	20.545.331.441
	Pajak Parkir	186.764.400	190.859.200	257.223.440	224.005.020	227.306.721
	Pajak Air Tanah	451.388.080	400.603.689	437.301.962	492.744.910	459.442.500
	Pajak Sarang Burung Walet	3.850.000	3.550.000	3.600.000	4.300.000	3.600.000
	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.652.935.126	3.906.072.200	3.961.571.845	2.007.287.604	1.736.333.119
	Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.187.123.712	4.567.675.367	4.695.662.209	4.155.777.987	5.350.882.980
	Pajak Bumi dan Bangunan	19.148.458.842	22.338.520.114	22.833.280.607	24.102.353.851	25.454.069.552

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021 (unaudited)
B	Hasil Retribusi Daerah	29.696.773.430	30.582.362.011	21.457.325.417	16.589.489.104	23.289.751.400
	Retribusi Jasa Umum	18.416.701.250	19.599.697.288	5.676.729.509	4.951.735.452	23.289.751.400
	Retribusi Jasa Usaha	10.197.152.776	10.618.556.632	15.259.424.932	11.018.008.108	
	Retribusi Perizinan Tertentu	1.082.919.404	364.108.091	521.170.976	619.745.544	
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.231.741.849	15.038.003.942	17.091.096.087	15.290.379.441	17.259.412.303
	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD	11.231.741.849	15.038.003.942	17.091.096.087	15.290.379.441	17.259.412.303
D	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	121.347.948.436	132.632.696.635	158.419.945.338	151.311.730.427	214.308.272.706
	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	888.420.025	797.348.573	1.013.871.111	522.215.855	
	Penerimaan Jasa Giro	7.850.246.995	4.671.082.068	4.219.038.252	2.583.658.910	
	Penerimaan Bunga Deposito	10.193.597.622	10.006.242.828	8.032.714.494	2.748.972.592	
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	18.929.144	11.158.572	21.450.000	8.141.100	
	Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	433.965.148	1.044.379.882	1.785.405.238	121.761.422	
	Pendapatan Denda Pajak	109.319.838	119.713.933	171.070.309	71.590.489	

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021 (unaudited)
	Pendapatan Denda Retribusi	9.436.054	15.174.686	22.372.425	25.438.294	
	Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	319.694.600	29.025.000			
	Pendapatan Dari Pengembalian	4.155.679.058	1.981.785.097	872.742.309	445.040.521	
	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum	109.904.500	105.802.500	109.285.528	63.231.270	
	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	107.771.174	89.326.773	48.705.722	239.145.406	
	Likuidasi BUMD					
	Penerimaan kelompok masyarakat/perorangan					
	Hasil Dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	932.245.096	1.260.329.399	1.650.861.031	1.427.707.616	
	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran PERDA	3.250.000		4.500.000		
	Pendapatan dari pihak ketiga - PLTMH	1.567.965.610	1.082.097.620	1.389.167.354		
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN Pada FKTP	29.029.446.644	29.437.576.182			
	Pendapatan Klaim Asuransi		623.815.956	332.382.666		
	Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)	65.618.076.928	81.357.837.566	138.746.378.899	143.054.826.952	
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.955.871.295.800	1.835.490.768.559	1.848.289.622.227	1.754.892.179.951	1.663.935.453.353
	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.776.057.602.800	1.690.323.244.738	1.726.188.060.664	1.636.237.885.928	1.251.747.015.765

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021 (<i>unaudited</i>)
A	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	37.702.694.444	30.048.650.863	22.981.870.648	32.994.964.981	
	Bagi Hasil Pajak	36.294.722.058	28.666.869.329	21.670.909.597	31.166.295.087	42.021.353.147
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	1.407.972.386	1.381.781.534	1.310.961.051	1.828.669.894	3.383.637.330
B	Dana Alokasi Umum	959.486.489.000	959.486.489.000	999.003.344.000	900.564.784.000	895.961.511.000
	Dana Alokasi Umum	959.486.489.000	959.486.489.000	999.003.344.000	900.564.784.000	895.961.511.000
C	Dana Alokasi Khusus	564.397.479.356	478.012.322.875	441.548.385.016	437.549.539.947	
	Dana Alokasi Khusus	423.935.262.343	364.545.234.875	323.297.059.889	304.511.991.622	310.380.514.288
	BOS	86.740.719.013	86.717.088.000	94.454.578.127	106.369.436.325	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (SERTIFIKASI GURU)					
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus (DID)	53.721.498.000	26.750.000.000	23.796.747.000	26.668.112.000	17.199.334.000
D	Dana Desa	214.470.940.000	222.775.782.000	262.654.461.000	265.128.597.000	265.745.328.000
	Dana Desa	214.470.940.000	222.775.782.000	262.654.461.000	265.128.597.000	265.745.328.000

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021 (unaudited)
	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	179.813.693.000	145.167.523.821	122.101.561.563	118.654.294.023	129.243.775.588
A	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	100.371.692.000	104.796.773.471	107.283.576.666	102.461.046.023	122.694.193.588
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	100.371.692.000	104.796.773.471	107.283.576.666	102.461.046.023	122.694.193.588
B	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	79.442.001.000	40.370.750.350	14.817.984.897	16.193.248.000	6.549.582.000
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi	79.442.001.000	40.370.750.350	14.817.984.897	16.193.248.000	
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.185.202.700	3.167.956.999	0	1.072.932.289	108.293.665.561
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
A	Pendapatan Hibah	1.185.202.700	3.167.956.999	0	1.072.932.289	
	Pendapatan Hibah Dari Pemerintah	1.185.202.700	0	0	0	
	Pendapatan Hibah dari Kelompok masyarakat/perorangan	0	0	0	263.405.363	
	Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi	0	0	0	809.526.926	91.948.907.614
	Pendapatan Lainnya	0	3.167.956.999	0	0	16.344.757.947
	Pendapatan Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri	0	0	0	0	

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Proporsi Pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total pendapatan di Kabupaten Banjarnegara cenderung meningkat dari sebesar 9,72 % pada tahun 2017 menjadi 15,04 % pada tahun 2021. Untuk lain-lain pendapatan yang sah trennya cenderung fluktuatif, pada tahun 2017 proporsinya terhadap total pendapatan sebesar 0,05 %, angka tersebut meningkat pada angka sekitar 5,19 % di tahun 2021. Hal ini berpengaruh pada proporsi Dana Perimbangan terhadap total pendapatan di tahun 2021 yang menjadi sebesar 60 %, padahal proporsi tersebut selama tahun 2017-2021 menunjukkan kecenderungan penurunan proporsi dari sebesar 81,93 % menjadi 60 %.

Pertumbuhan masing-masing unsur pendapatan di Kabupaten Banjarnegara selama tahun 2017 hingga tahun 2021 menunjukkan kondisi yang fluktuatif. Laju pertumbuhan tahunan menggunakan metode penghitungan *Compound Annual Growth Rate* (CAGR) untuk PAD di Kabupaten Banjarnegara sebesar 6 %, sedangkan untuk dana perimbangan sebesar -4 %, dan untuk lain-lain pendapatan yang sah sebesar -46 %.

Komponen Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: (1) Pendapatan Pajak Daerah, (2) Pendapatan Retribusi Daerah, (3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Hingga saat ini PAD Kabupaten Banjarnegara sangat dipengaruhi oleh komponen Lain-lain PAD yang sah. Proporsi Lain-lain PAD yang sah meningkat dari sebesar 57,58 % pada tahun 2017 menjadi sebesar 68,29 % dari PAD pada tahun 2021. Hal ini dipengaruhi oleh perubahan status RSUD menjadi BLUD, sehingga pendapatan yang awalnya masuk retribusi daerah berubah menjadi lain-lain PAD yang sah. Sejak masuknya Pajak Bumi dan Bangunan sebagai komponen Pendapatan Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2014, pos Pendapatan Pajak Daerah menjadi terbesar kedua setelah Lain-Lain PAD yang Sah dalam menyumbangkan kontribusinya terhadap PAD.

2. Belanja Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja daerah dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah.

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Belanja daerah mengedepankan efisiensi anggaran, serta pemenuhan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Belanja daerah digunakan untuk mewujudkan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan.

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 kebijakan belanja daerah di Kabupaten Banjarnegara meliputi :

1. Peningkatan proporsi belanja untuk penanganan isu strategis dan komitmen nasional.
2. Peningkatan proporsi belanja langsung sebagai implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.
3. Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program kegiatan dalam urusan wajib dan pilihan.
4. Penguatan penyusunan anggaran dengan berbasis kinerja.

Besarnya belanja daerah di Kabupaten Banjarnegara lima tahun terakhir mengalami penurunan seiring dengan penurunan pendapatan daerah. Pada tahun 2017 besarnya belanja daerah

sebesar Rp 2.178.823.342.905,-, pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp 2.042.019.297.374,-.

Secara rinci perkembangan belanja daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2. Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021 (unaudited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
B	BELANJA	2.178.823.342.905	2.119.096.683.202	2.123.033.797.431	2.030.532.397.495	2.042.019.297.374	-6,81
1	BELANJA OPERASIONAL	1.287.375.920.917	1.308.531.541.183	1.372.795.814.399	1.259.046.892.519	1.344.038.014.010	-2,20
a	Belanja Pegawai (EKS BTL)	811.108.361.182	812.106.333.513	814.306.718.615	761.317.422.947	865.787.686.434	-6,14
a1	Belanja Pegawai (EKS BL)	58.756.487.168	63.708.194.074	67.782.303.133	65.924.142.381		12,20
b	Belanja Barang dan Jasa (EKS BL)	365.474.438.276	372.390.048.681	427.482.543.857	395.433.531.055	463.980.096.386	8,20
c	Belanja Bunga	-	-	-	-		
d	Belanja Subsidi	-	-	-	-		
e	Belanja Hibah	24.925.945.411	38.078.084.915	44.958.597.794	30.246.917.201	72.814.518.200	21,35
f	Belanja Bantuan Sosial	27.110.688.880	22.248.880.000	18.265.651.000	6.124.878.935	7.678.388.400	-77,41
2	BELANJA MODAL	562.843.385.558	474.607.689.278	358.205.528.802	348.505.249.709	294.844.828.809	-38,08
a	Belanja Modal	562.843.385.558	474.607.689.278	358.205.528.802	348.505.249.709	294.844.828.809	-38,08
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	527.738.000	271.790.000	1.813.696.829	37.594.817.867	22.654.563.455	7023,77
a	Belanja Tidak Terduga	527.738.000	271.790.000	1.813.696.829	37.594.817.867	22.654.563.455	7023,77

4	BELANJA TRANSFER	328.076.298.430	335.685.662.741	390.218.757.401	385.385.437.400	380.481.891.100	17,47
a	Belanja Bagi Hasil	5.262.859.000	5.487.219.000	10.854.531.000	11.714.442.000	11.040.471.500	122,59
b	Belanja Bantuan Keuangan	322.813.439.430	330.198.443.741	379.364.226.401	373.670.995.400	369.441.419.600	15,75
	SURPLUS / DEFISIT	-11.022.181.415	-44.443.521.507	-17.043.525.094	-35.928.290.934	43.992.333.876	225,96

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

Selama tahun 2017-2021, besarnya belanja tidak langsung mengalami penurunan sedangkan belanja langsung selalu mengalami peningkatan. Apabila dilihat dari besarnya belanja, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Belanja tidak langsung menurun dari 869 milyar pada tahun 2017 menjadi 865 milyar pada tahun 2021, sedangkan belanja langsung meningkat dari 417 milyar menjadi 544 milyar.

Dilihat dari proporsinya, selama kurun waktu tahun 2017-2021 terjadi fluktuasi proporsi masing-masing unsur belanja terhadap total belanja daerah, dengan kecenderungan proporsi belanja langsung meningkat, sedangkan proporsi belanja tidak langsung semakin menurun. Proporsi belanja langsung terhadap total belanja daerah meningkat dari sebesar 19,1 % menjadi sebesar 24,9 %. Sebaliknya, proporsi belanja tidak langsung menurun dari sebesar 39,9% menjadi 39,7%. Kecenderungan peningkatan proporsi belanja langsung menunjukkan adanya komitmen pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk meningkatkan pembangunan daerah.

Rasio belanja pegawai terhadap belanja daerah memberikan gambaran mengenai beban belanja yang harus dikeluarkan untuk gaji dan tunjangan pegawai. Semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Semakin menurunnya porsi belanja pegawai tidak langsung dalam APBD menunjukkan bahwa semakin sedikit porsi APBD yang dialokasikan untuk belanja aparatur, sehingga APBD bisa lebih terkonsentrasi pada belanja yang langsung terkait dengan pelayanan publik. Asumsinya belanja ini semakin berkurang maka akan direalokasikan ke belanja modal dan belanja barang dan jasa yang lebih efektif dalam mendorong roda perekonomian daerah.

Kondisi yang terjadi di Kabupaten Banjarnegara menunjukkan bahwa selama lima tahun terakhir Rasio belanja pegawai pada belanja tidak langsung terhadap belanja operasional cenderung menurun dari sebesar 67,5 % pada tahun 2017 menjadi 61,3% pada tahun 2021. Angka pada tahun 2017 sampai dengan 2021 menunjukkan proporsi yang tinggi (berada di atas 50%) hal

ini mengakibatkan ruang fiskal yang terbatas untuk membiayai pembangunan daerah. Seiring dengan berkurangnya jumlah pegawai, tahun 2021 angka proporsi ini turun ke angka 61,3%. Hal ini tentunya mengakibatkan pembiayaan pembangunan dapat lebih leluasa.

Salah satu ukuran kualitas belanja yang baik adalah semakin besarnya porsi belanja modal terhadap belanja daerah. Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah selain dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Belanja modal yang besar akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di daerah. Selama tahun 2017-2021 proporsi Belanja Modal terhadap Total belanja menunjukkan fluktuasi namun relatif kecil, berkisar antara 25,8 % hingga 17,2%. Proporsi belanja modal terhadap belanja langsung juga cenderung menurun dari 30,38% menjadi 20,99%. Fluktuasi Belanja Modal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat agar daerah bisa mengalokasikan belanja modal yang lebih besar sehingga mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan dapat berasal dari pinjaman daerah, penerimaan piutang daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, atau pencairan dana cadangan. Sementara itu pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, atau pemberian pinjaman daerah. Arah kebijakan pembiayaan daerah untuk tahun 2017-2021 adalah:

- a. Memperkuat penyertaan modal daerah dalam BUMD.
- b. Meningkatkan besaran SILPA dari sisi pelampauan pendapatan.
- c. Menurunkan besaran SILPA dari sisi belanja.

Dalam kurun waktu tahun 2017-2021 penerimaan pembiayaan daerah menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp 195.898.562.898,- pada tahun 2017 menjadi Rp 41.432.374.390,- pada tahun 2021. Fluktuasi penerimaan pembiayaan terutama disebabkan oleh Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) dan Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir tahun sebelumnya.

Perkembangan pengeluaran pembiayaan juga fluktuatif dengan kecenderungan menurun dari sebesar Rp 12.626.605.000,- pada tahun 2017 menjadi sebesar Rp 1.000.000.000 pada tahun 2021. Fluktuasi pengeluaran pembiayaan terutama disebabkan oleh Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah.

Secara rinci perkembangan realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.3. Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021 (unaudited)	Rata-Rata Pertumbuhan (%)
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	195.898.562.898	344.549.720.521	116.951.143.340	88.211.343.324	41.432.374.390	
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	195.491.204.317	344.499.552.966	116.906.522.531	88.157.618.246	41.384.263.390	
2	Pencairan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	
4	Penerimaan Kembali Pinjaman dana bergulir	407.358.581	50.167.555	44.620.809	53.725.078	48.111.000	
5	Penerimaan Kembali Dana investasi Daerah	0	0	0	0	0	
5	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0	
D	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	12.626.605.000	10.949.900.000	11.750.000.000	10.900.000.000	1.000.000.000	

1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0	
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	12.626.605.000	10.949.900.000	11.750.000.000	10.900.000.000	1.000.000.000	
3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	0	0	0	
4	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0	
	PEMBIAYAAN NETTO	183.271.957.898	333.599.820.521	105.201.143.340	77.311.343.324	40.432.374.390	
	SILPA	172.249.776.483	289.156.299.014	88.157.618.246	41.383.052.390	116.616.862.620	

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

3.1.2. Neraca Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang wajib dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Neraca Daerah memberikan informasi mengenai posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan.

Perkembangan jumlah aset Kabupaten Banjarnegara menunjukkan kenaikan, dari sebesar Rp 4.126.775.235.841,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 4.528.919.724.976,- pada tahun 2020. Jumlah kewajiban mengalami peningkatan dari Rp. 15.501.264.616,- pada tahun 2017 menjadi Rp. 21.558.235.705 pada tahun 2020. Sementara itu jumlah ekuitas dana naik dari Rp 4.111.273.971.226,- pada tahun 2017 menjadi Rp 4.507.361.489.27 pada tahun 2020, secara lengkap Neraca Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.4. Neraca Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2021

No	URAIAN	2017	2018	2019	2020	2021 (unaudited)	%*)
A	ASET						
1	ASET LANCAR	222.555.280.293	189.270.299.425	170.186.465.926	113.125.935.585		
	Kas di Kas Daerah	151.896.713.915	95.888.898.446	66.444.787.831	19.889.824.377		
	Kas di Bendahara Penerimaan	264.700.440	2.874.000	38.489	211.225.540		
	Kas di Bendahara Pengeluaran	1.941.953.355	0	0	22.113.736		
	Kas di BLUD	13.869.440.299	17.298.643.178	17.634.040.004	18.379.758.508		
	Kas di Bendahara BOS	0	1.838.843.162	4.125.671.415	2.740.689.771		
	Kas Lainnya	0	0	0	212.822.774		
	Kas di Bendahara JKN	4.285.670.837	1.877.331.700	0	0		
	Piutang Pendapatan	25.485.348.992	50.940.114.633	55.527.045.596	48.492.846.959		
	<i>Penyisihan Piutang</i>	<i>-5.334.784.773</i>	<i>-7.801.628.507</i>	<i>-6.068.158.628</i>	<i>-5.190.655.646</i>		
	Piutang Pajak	0	0	0	0		
	<i>Penyisihan Piutang Pajak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Piutang Pajak Netto	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Piutang Retribusi	0	0	0	0		
	<i>Penyisihan Piutang Retribusi</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Piutang Retribusi Netto	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0	0	0		
	<i>Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		

			Penyisihan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	0	0	0	0		
			Piutang Lain lain PAD yang Sah	0	0	0	0		
			<i>Penyisihan Piutang Lain Lain PAD yang Sah</i>	0	0	0	0		
			Piutang Lain lain PAD yang Sah netto	0	0	0	0		
			Beban Dibayar Dimuka	775.390.663	801.728.333	618.710.572	584.510.330		
			Asuransi dibayar Di Muka						
			Persediaan	29.370.846.565	28.423.494.480	31.904.330.646	27.782.799.236		
			Persediaan Bahan Habis Pakai	0	0	0	0		
			Persediaan Bahan /Material	0	0	0	0		
			Persediaan Brg Diserahkan ke Masyarakat	0	0	0	0		
2	INVESTASI JANGKA PANJANG			109.401.661.531	102.714.445.902	113.126.473.524	121.502.303.921		
a	Investasi Jangka Panjang Non Permanen			0	0	0	0		
			Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya	0	0	0	0		
			Investasi Dalam Obligasi	0	0	0	0		
			Investasi Dalam Proyek Pembangunan	0	0	0	0		
			Dana Bergulir	10.117.832.182	10.067.664.627	10.023.043.818	9.969.318.740		
			<i>Penyisihan Investasi Non Permanen</i>	-9.897.610.033	-9.650.245.799	-9.493.361.373	-9.164.412.503		
b	Investasi Jangka Panjang Permanen			109.181.439.382	102.297.027.074	112.596.791.079	120.697.397.684		

3	ASET TETAP			3.779.546.635.452	4.057.924.311.849	4.184.672.125.814	4.292.426.640.231		
	Tanah			1.133.911.843.562	1.148.725.795.655	1.163.542.100.340	1.186.013.045.527		
	Peralatan dan Mesin			449.526.943.566	500.789.018.419	562.403.041.424	636.393.380.496		
	Gedung dan Bangunan			1.459.755.946.609	1.534.459.478.610	1.591.370.935.862	1.607.229.462.198		
	Jalan, Irigasi dan Jaringan			2.440.605.369.230	2.781.779.568.081	3.001.246.049.054	3.296.033.827.918		
	Aset Tetap Lainnya			79.522.677.101	92.727.587.647	102.559.300.363	106.888.905.810		
	Konstruksi Dalam Pengerjaan			40.442.030.700	36.546.050.033	37.048.190.033	8.531.604.673		
	Akumulasi Penyusutan			-1.824.218.175.316	-2.037.103.186.596	-2.273.497.491.262	-2.548.663.586.391		
	Nilai Buku Aset Tetap			0	0	0	0		
4	ASET LAINNYA			15.271.658.565	5.842.163.250	1.385.782.609	1.864.845.239		
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah			0	0	0	0		
	Tagihan Jangka Panjang			132.970.137	125.205.565	117.455.565	106.314.474		
	Aset Tak Berwujud			440.125.090	617.441.300	873.599.550	1.030.661.240		
		Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0	0	0	0		
			Aset Tidak Berwujud Netto	0	0	0	0		
	Aset Lain-lain (Rusak)			14.698.563.338	5.099.516.385	394.727.494	727.869.525		
	Aset untuk Dihibahkan			0	0	0	0		
	Piutang Lebih dari 1 tahun			0	0	0	0		
		Penyisihan		0	0	0	0		
	JUMLAH ASET			4.126.775.235.841	4.355.751.220.426	4.469.370.847.873	4.528.919.724.976		
B	KEWAJIBAN			15.501.264.616	14.847.764.458	27.892.413.417	21.558.235.705		
1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			15.501.264.616	14.847.764.458	27.892.413.417	21.558.235.705		

		Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	8.702.363	67.955	46.919.493	73.382.316		
		Pendapatan Diterima Dimuka	596.467.987	1.150.408.481	1.449.826.903	2.594.368.467		
		Utang Beban	14.220.477.575	13.697.288.022	26.395.667.021	18.890.484.922		
		Utang Jangka Pendek Lainnya	675.616.691	0	0	0		
2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0	0	0	0		
C	EKUITAS DANA		4.111.273.971.226	4.340.903.455.968	4.441.478.434.456	4.507.361.489.271		
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		4.126.775.235.841	4.355.751.220.426	4.469.370.847.873	4.528.919.724.976		

***) Rata-Rata Pertumbuhan**

Sumber : LKD Kabupaten Banjarnegara

3.2. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah yang ada di Kabupaten Banjarnegara yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah yang digunakan untuk mendanai belanja daerah khususnya untuk pelayanan publik kepada masyarakat yang semakin menurun sehingga ketergantungan kepada pemerintah pusat semakin kuat.

Kemandirian keuangan daerah pada Kabupaten Banjarnegara menunjukkan kondisi yang relatif semakin membaik antar tahun. Pada tahun 2017 rasio kemandirian daerah Kabupaten Banjarnegara mencapai 10,77 %. Angka ini terus menunjukkan progress yang menggembirakan hingga tahun 2021 yang mencapai besaran 18,86 %. Kondisi rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2017-2021 sebagaimana tabel sebagai berikut :

Tabel 3.5 Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun	PAD (Rp)	Transfer pusat + provinsi (Rp)	Ratio Kemandirian Keuangan Daerah
2017	210.744.662.990	1.955.871.295.800	10,77
2018	235.994.436.137	1.835.490.768.559	12,86
2019	257.700.650.110	1.848.289.622.227	13,94
2020	238.638.994.321	1.754.892.179.951	13,59
2021 (unaudited)	313.782.512.336	1.663.935.453.353	18,86

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Permasalahan yang akan ditangani selama lima tahun dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara dikelompokkan berdasarkan urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya.

4.1.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

- a. Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pendidikan. Hal ini terlihat dari capaian APK dan APM. Pada tingkat SMP, APK berada pada angka 96,69% dan APM 74,57%. Sedangkan pada jenjang SD, APM berada pada angka 97,46%.
- b. Belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana penunjang pembelajaran.
- c. Masih rendahnya partisipasi sekolah. Hal ini dapat dilihat dari angka harapan lama sekolah yang baru pada angka 11,63 tahun.
- d. Belum optimalnya peningkatan dan pengembangan kompetensi dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan. Hal ini terlihat dari Guru SD yang tersertifikasi yang baru mencapai 78,77%.

- e. Masih belum optimalnya pemenuhan SPM bidang pendidikan. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan masih rendahnya angka partisipasi sekolah dan literasi siswa.

2. Kesehatan

- a. Masih rendahnya kualitas kesehatan ibu dan anak. Hal ini antara lain terlihat dari capaian AKI sebesar 273 per 100.000 KH, AKB sebesar 12,9 per 1000 KH, masih ditemukannya balita gizi buruk (capaian 0,05%) dan balita di bawah garis merah (capaian 0,35%), dan persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) yang baru mencapai 87,1%.
- b. Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan tidak menular karena beban ganda penyakit dan penyakit degeneratif. Hal ini terlihat dari kasus persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM) yang baru mencapai 51,9%, *Acute Flacid Paralysis* (AFP) sebanyak 4 kasus, dan persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebesar 35,17%.
- c. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berwawasan kesehatan belum optimal dan belum membudayanya perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini terlihat dari persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga strata utama-paripurna tingkat kabupaten yang baru mencapai 89,3%.
- d. Belum terpenuhinya standar pelayanan di puskesmas dan rumah sakit. Hal ini terlihat dari persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi yang baru mencapai 71%.
- e. Masih belum optimalnya pemenuhan SPM bidang kesehatan. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan masih belum optimalnya khususnya pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan penyakit degeneratif.

3. Pekerjaan umum dan penataan ruang

- a. Masih rendahnya kualitas jalan dan jembatan. Hal ini terlihat dari capaian panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik yang sebesar 81,23%.

- b. Masih rendahnya sistem drainase dan belum semua ruas jalan memiliki saluran drainase/gorong-gorong.
 - c. Masih rendahnya persentase capaian rumah bersanitasi yang terlihat dari persentase kepala keluarga terlayani pengelolaan sistem air limbah yang baru mencapai 65,24%.
 - d. Belum optimalnya cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat Banjarnegara. Cakupan persentase penduduk berakses air minum baru mencapai 95%.
 - e. Masih rendahnya kualitas jaringan irigasi dalam kondisi baik yang baru mencapai 70,30%.
 - f. Belum optimalnya rencana tata ruang dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang.
 - g. Masih belum optimalnya pemenuhan SPM bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan masih rendahnya cakupan pelayanan air minum.
4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- a. Masih rendahnya kualitas perumahan. Hal ini terlihat dari persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni yang baru tercapai 80%.
 - b. Masih adanya kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Banjarnegara.
 - c. Masih belum optimalnya pemenuhan SPM bidang perumahan rakyat dan Kawasan permukiman. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan masih rendahnya cakupan penyediaan rumah layak huni khususnya bagi korban bencana.
5. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat
- a. Masih rendahnya cakupan penanggulangan dan penyelamatan serta tingkat waktu tanggap pada bencana kebakaran.
 - b. Belum optimalnya patroli yang dilakukan oleh petugas Satpol PP dalam penanganan dan pencegahan gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
 - c. Belum optimalnya penegakan Perda dan Perkada dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban.
6. Sosial
- a. Banyaknya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Hal ini terlihat dari persentase anak terlantar yang terpenuhi

- kebutuhan dasarnya di luar panti yang baru mencapai 72,83%, dan persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti sebesar 10,96%.
- b. Belum optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam membantu penanganan PMKS. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang menyediakan pelayanan kesejahteraan sosial yang baru mencapai 27%.
 - c. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan PMKS meliputi penanganan penyandang disabilitas, penanganan eks psikotik, penanganan korban tindak kekerasan serta penanganan korban bencana.
 - d. Masih belum optimalnya pemenuhan SPM bidang sosial yang ditunjukkan dengan masih rendahnya cakupan pemenuhan pelayanan penyandang masalah sosial dan pengembangan jaminan sosial.

4.1.2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

- 1. Tenaga kerja
 - a. Masih adanya pengangguran dan rendahnya kesempatan kerja. Hal ini terlihat dari tingkat pengangguran terbuka yang masih berada pada angka 5,86%.
 - b. Masih belum optimalnya penanganan sengketa antara pekerja dan pemberi kerja.
 - c. Terbatasnya cakupan pelatihan peningkatan keterampilan pencari kerja.
- 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - a. Belum melembaganya pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran di tingkat daerah. Hal ini ditandai dengan persentase anggaran responsif gender dalam APBD baru 2,12%.
 - b. Belum optimalnya kualitas hidup perempuan dan anak, ditandai dengan Indeks Pemberdayaan Gender yang baru 73,20 dan persentase kelompok perempuan rentan yang terbentuk baru 21,6%.

- c. Masih tingginya potensi kasus kekerasan terhadap perempuan, penelantaran, eksploitasi terhadap perempuan dan anak.

3. Pangan

- a. Adanya potensi kerawanan pangan di Banjarnegara yang dipengaruhi oleh produksi pangan yang rendah, kemiskinan, kurang lancarnya distribusi pangan, dan seringnya terjadi bencana alam.
- b. Masih kurangnya cadangan pangan daerah, yang ditandai oleh capaian persentase tercukupinya kebutuhan pangan daerah yang baru mencapai 81%.
- c. Kualitas konsumsi pangan masih rendah, dengan tingkat ketergantungan konsumsi terhadap beras yang sangat tinggi.
- d. Belum optimalnya kontrol terhadap pestisida dan bahan-bahan kimia lainnya pada produk pangan segar dan bahan tambahan pangan pada produk pangan olahan.
- e. Potensi pangan lokal belum ditangani secara optimal.

4. Pertanahan

Belum optimalnya fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan pemanfaatan tanah.

5. Lingkungan hidup

a. Menurunnya kualitas air permukaan (air danau/waduk/embung) dan menurunnya potensi sumber daya air bersih untuk berbagai keperluan rumah tangga sehari-hari maupun untuk menunjang aktifitas ekonomi masyarakat.

b. Belum optimalnya penanganan limbah sehingga dapat memberikan dampak pada penurunan kualitas air dan udara. Persentase penduduk yang terlayani sanitasi dan air limbah yang memadai baru mencapai 65,24%.

c. Masih rendahnya penanganan dan kesadaran masyarakat mengenai masalah persampahan.

6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

a. Masih rendahnya cakupan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh cakupan penerbitan KTP 96,47%, cakupan penerbitan KIA 40,47%, dan cakupan penerbitan akte kelahiran 93,01%.

b. Belum optimalnya Sistem Informasi Pelayanan Kependudukan dan pemanfaatan database kependudukan.

7. Pemberdayaan masyarakat desa

a. Kemandirian dan keberdayaan masyarakat belum optimal. Hal ini terlihat dari swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat yang hanya sebesar 28%.

b. Belum optimalnya pengembangan pengembangan lembaga kemasyarakatan. Hal ini ditandai oleh persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif yang baru tercapai 20%.

c. Belum optimalnya kinerja aparatur desa dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa/kelurahan, termasuk pengelolaan kelembagaan, perencanaan dan penganggaran, keuangan, profil, penataan batas dan tata ruang desa.

8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - a. Masih tingginya angka kelahiran total (*Total Fertility Rate*) yang sebesar 2,2.
 - b. Masih tingginya Pasangan Usia Subur ber-KB tapi tidak terpenuhi (*Unmeet need*) yang masih sebesar 6,98%.
 - c. Masih rendahnya partisipasi keluarga yang mempunyai anak, remaja, dan lansia dalam kegiatan pengasuhan dan pembinaan melalui kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Hal ini antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya cakupan PUS yang isterinya di bawah usia 20 tahun.
9. Perhubungan
 - a. Masih kurangnya sarana dan prasarana perhubungan. Hal ini antara lain ditunjukkan oleh jumlah terminal bus serta masih minimnya sarana dan prasarana keselamatan lalu lintas.
 - b. Belum semua daerah mempunyai jaringan trayek.
 - c. Banyaknya kendaraan yang tidak laik jalan dan banyak kendaraan yang belum melakukan uji KIR.
 - d. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan dan menjaga fasilitas dan perlengkapan LLAJ.
10. Komunikasi dan informatika
 - a. Belum optimalnya pengembangan *e-government*. Pengembangan *e-government* sangat penting di era digital, khususnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi masih berada pada angka 8,5%.
 - b. Masih rendahnya penetrasi layanan publik secara digital yang diakses oleh masyarakat.
11. Koperasi, usaha kecil, dan menengah
 - a. Masih rendahnya kualitas koperasi, terlihat dari masih adanya koperasi tidak aktif yang hanya sebesar 27,55%.
 - b. Pertumbuhan UMKM yang lambat dan daya saing produk UMKM masih kurang, disebabkan oleh keterampilan SDM dan akses permodalan yang masih rendah. Usaha mikro yang menjadi wirausaha baru 89,29%.

- c. Masih rendahnya sumber daya manusia pengelola koperasi, khususnya yang berbasis masyarakat dengan persentase jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan latihan perkoperasian baru 7,12%.

12. Penanaman modal

Nilai persetujuan investasi dan nilai realisasi investasi belum optimal disebabkan oleh fasilitasi investasi yang belum optimal, sarana prasarana pendukung investasi yang belum memadai, dan belum optimalnya promosi dan kerjasama dalam rangka peningkatan investasi. Selain itu, dari sisi kepastian berinvestasi juga belum didukung tersedianya dokumen tata ruang.

13. Kepemudaan dan olahraga

- a. Belum optimalnya penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan organisasi kepemudaan.
- b. Belum optimalnya prestasi olahraga, pengembangan dan pembinaan olahraga prestasi dan sarana prasarana olahraga yang masih kurang.
- c. Masih rendahnya cakupan kewirausahaan pemuda.
- d. Belum optimalnya pendidikan karakter.

14. Statistik

Kurang optimalnya kualitas ketersediaan data statistik guna menunjang perencanaan dan evaluasi pada masing-masing perangkat daerah.

15. Persandian

Masih belum optimalnya tingkat keamanan informasi pemerintah.

16. Kebudayaan

- a. Semakin lunturnya nilai-nilai budaya dan kesenian daerah.
- b. Belum optimalnya pelestarian adat dan tradisi masyarakat.
- c. Rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap sejarah penting daerah.
- d. Banyaknya benda dan bangunan cagar budaya yang rusak atau hilang.

17. Perpustakaan

- a. Belum optimalnya tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.

- b. Belum optimalnya pembinaan dan kerjasama dalam pengelolaan dan pengembangan perpustakaan dengan lembaga lain.
- c. Masih rendahnya tingkat literasi masyarakat.

18. Kearsipan

- a. Masih belum optimalnya tata kelola kearsipan yang baik.
- b. Masih rendahnya kualitas arsip yang ditandai dengan ketersediaan arsip yang autentik, utuh, aman, dan terpercaya di lingkup daerah yang hanya 4,55%.

4.1.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan perikanan

- a. Pendapatan pembudidaya ikan, kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan dan nelayan masih belum optimal.
- b. Belum optimalnya produksi perikanan budidaya walaupun potensi lahan untuk budidaya tersedia.

2. Pariwisata

- a. Belum optimalnya pengelolaan destinasi pariwisata unggulan yang telah ada, dan kurangnya pengembangan potensi wisata sebagai destinasi wisata baru.
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- c. Masih rendahnya kualitas pelaku usaha dan jasa pariwisata.
- d. Lemahnya promosi dan pemasaran objek wisata unggulan dan kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam mendukung pemasaran ekonomi kreatif.

3. Pertanian

- a. Pendapatan dan tingkat kesejahteraan petani masih perlu ditingkatkan. Hal ini diindikasikan oleh masih rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang masih berada di angka 102,45%.
- b. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian serta jumlah populasi ternak.

4. Perdagangan

- a. Belum optimalnya perkembangan sektor perdagangan.
- b. Masih banyaknya lokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) yang belum terbina.

- c. Kondisi bangunan pasar pada sebagian besar pasar rakyat perlu direvitalisasi agar tercipta pasar yang nyaman, aman dan bersih.
 - d. Perilaku pengelola pasar antara pedagang dan paguyuban pasar yang masih kurang terhadap keamanan, kebersihan dan ketertiban pasar.
 - e. Masih rendahnya kapasitas ekspor.
5. Perindustrian
- a. Pertumbuhan industri kecil dan menengah (IKM) yang lambat dan daya saing IKM yang masih rendah.
 - b. Rendahnya omset penjualan produk IKM disebabkan promosi dan pemasaran produk IKM dengan memanfaatkan teknologi informasi masih kurang, serta terbatasnya fasilitasi IKM mengikuti kegiatan promosi dan pameran produk.
 - c. Masih banyaknya pelaku usaha yang belum memiliki kemampuan tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi.
 - d. Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membeli produk IKM.
6. Transmigrasi
- Terbatasnya alokasi pemberangkatan transmigran dan semakin menurunnya daerah yang dijadikan lokasi transmigrasi.

4.1.4. Pendukung Urusan Pemerintahan

- 1. Administrasi Pemerintahan
 - a. Penataan peraturan perundangan belum sepenuhnya sesuai dengan tata peraturan perundangan yang baru.
 - b. Belum semua unit-unit pelayanan perangkat daerah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dan standar pelayanan publik (SPP).
 - c. Belum optimalnya kualitas pelaporan kinerja pemerintah. Laporan kinerja yang disajikan OPD belum menggambarkan kinerja PD, tetapi masih sebatas menceritakan proses ataupun aktifitas yang dilaksanakan.
- 2. Pengawasan
 - a. Kurangnya cakupan pemeriksaan dan pengawasan.

- b. Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil temuan pengawasan.
 - c. Masih lemahnya pengendalian intern yang disertai pemantauan secara rutin.
- 3. Perencanaan
 - a. Masih belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
 - b. Masih belum optimalnya keterlibatan peran masyarakat dalam proses-proses penyusunan perencanaan.
- 4. Keuangan
 - a. Belum optimalnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap Pendapatan Daerah yang berimplikasi pada rendahnya kemandirian keuangan daerah.
 - b. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, terutama aset tanah yang belum bersertifikat.
- 5. Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan
 - a. Kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masih kurang.
 - b. Masih banyaknya kasus indisipliner pegawai.
 - c. Belum optimalnya pelaksanaan merit system.
- 6. Penelitian dan Pengembangan
 - a. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam menunjang pembangunan daerah.
 - b. Belum optimalnya peran penelitian dan pengembangan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 7. Kesatuan Bangsa dan Politik
 - a. Belum optimalnya partisipasi politik masyarakat.
 - b. Belum optimalnya pembinaan wawasan kebangsaan bagi organisasi kepemudaan, organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat.
 - c. Belum optimalnya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan Napza
- 8. Kewilayahan

Belum optimalnya pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat.

4.2. Isu Strategis

Isu strategis didefinisikan sebagai kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagai bagian dari wilayah nasional maupun provinsi, pembangunan daerah juga dilaksanakan secara sinergis dengan kebijakan di atasnya. Dalam rangka meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi kawasan, kawasan Banjarnegara menurut Perpres nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal - Semarang - Salatiga Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal – Pemalang masuk ke dalam kawasan pendukung dan pemberi nilai tambah pembangunan kawasan. Dalam perspektif RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Kabupaten Banjarnegara sebagai bagian dari kawasan Barlingmascakeb difokuskan pengembangannya ke arah PKN, PKW dan PKL di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, peternakan dan perdagangan. Potensi berupa industri unggulan batik, keramik; agropolitan Jakabaya, STA Batur di Kecamatan Batur dengan komoditas sayuran; klaster pariwisata Dieng, keramik Klampok, olahan makanan Barasnack, batik Gumelem; serta destinasi wisata Dieng dan Seruling Mas.

Dari sisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), rencana pengembangan ekonomi wilayah kecamatan di Kabupaten Banjarnegara dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan yang meliputi: Wilayah pengembangan I dengan pusat pengembangan

Kawasan Perkotaan Banjarnegara, meliputi: Kecamatan Madukara, Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Punggelan, Kecamatan Wanadadi, Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang, Kecamatan Pagedongan, dan Kecamatan Sigaluh. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai pusat perdagangan dan jasa, industri, pendidikan, pariwisata, pertanian, sumberdaya energi, dan sumberdaya mineral. Wilayah pengembangan II dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Purwareja Klampok, meliputi: Kecamatan Rakit; Kecamatan Purwonegoro; Kecamatan Mandiraja; Kecamatan Purwareja Klampok; dan Kecamatan Susukan. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai Pusat perdagangan dan jasa, hasil kerajinan, pertanian, sumberdaya energi, industri, perikanan darat; dan sumberdaya mineral. Wilayah pengembangan III dengan pusat pengembangan Kawasan Perkotaan Karangobar, meliputi Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan, Kecamatan Pejawaran, Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Kalibening, Kecamatan Pandanarum, dan Kecamatan Karangobar. Diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLP), dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Dengan fungsi wilayah sebagai Pusat pertanian, pariwisata, agropolitan, konservasi lingkungan, sumberdaya energi, dan sumberdaya mineral.

Dengan melakukan penelaahan terhadap isu/kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pencapaian visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, isu/kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, maka isu strategis yang diangkat dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia

Kondisi terlihat dari masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah (6,75 tahun), harapan lama sekolah (11,63 tahun), dan usia harapan hidup (74,28 tahun). Selain itu, pelayanan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat masih terkendala dengan masih rendahnya cakupan pemenuhan SPM.

2. Pemulihan perekonomian daerah yang berjalan lambat

Kondisi perekonomian yang terimbas terjadinya pandemi Covid-19 membutuhkan penanganan yang baik. Hal ini ditandai dengan terkontraksinya hampir semua lapangan usaha dalam struktur perekonomian daerah. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi sektor-sektor potensial seperti pariwisata, perdagangan, serta jasa. Sebagai bagian dari pengembangan ekonomi secara nasional dan regional, pengembangan ekonomi Banjarnegara juga disusun sebagai bagian dari pengembangan ekonomi kawasan Purwomanggung (Perpres nomor 79 tahun 2019) maupun pengembangan kawasan Barlingmascakeb. Selain itu, sebagai bagian dari rencana pengembangan ekonomi dan ketahanan pangan, diperlukan penyiapan kawasan peruntukan industri dan kawasan pertanian lahan berkelanjutan.

3. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

Hal ini ditandai dengan persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik 81,23, rendahnya kualitas irigasi, persentase penduduk berakses air minum 95%, dan persentase kepala keluarga terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah 65,24%.

4. Masih belum optimalnya tata Kelola pemerintahan

Hal ini ditandai oleh nilai skor SAKIP B, tingkat maturitas SPIP, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah.

5. Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran

Hal ini ditandai dengan persentase penduduk miskin sebesar 16,23% dan tingkat pengangguran 5,86%.

Konstruksi Perumusan isu strategis dan relevansinya dengan isu/kebijakan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pencapaian visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, isu/kebijakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, serta hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022 sebagai berikut:

Tabel 4.1. Perumusan Isu Strategis

No	Kategori	Telaah Dokumen Pendukung dan Indikator Makro					Rumusan Isu Strategis Daerah
		Telaah Isu/Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024) (7 Prioritas Nasional)	Telaah RPJPD Tahun 2005-2025	Telaah Isu/Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023)	Capaian Data Makro (Permendagri 18 Tahun 2020)	Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya (Tahun 2017-2022)	
1.	Sumber daya manusia	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat	1. Tingginya angka kemiskinan; 2. Tingginya ketimpangan; 3. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Pendidikan Vokasi; 4. Pelestarian Budaya Baik Benda Maupun Tak Benda	1. HLS: 11,63 tahun; 2. RLS: 6,75 tahun; 3. AKB 12,9 per 1000KH; 4. AKI: 273 per 100.000KH; 5. IPM: 67,86	1. Angka Harapan Hidup: 74,28 tahun; 2. Prevalensi stunting: 22,7%; 3. APK SMP: 96,69% 4. APM: 1). SD: 97,48%; 2). SMP: 74,57%; 5. Angka Melanjutkan ke SMP: 85,04%	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
		Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					
2.	Ekonomi	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui	1. Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Inklusif; 2. Tingginya ketimpangan.	1. LPE 3,46%; 2. Indeks gini: 0,34 3. TPT: 5,86%;	1. Pengeluaran riil per kapita: 9,4 juta; 2. NTP: 102,45%	Pemulihan Perekonomian Daerah yang berjalan lambat
		1. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi					

No	Kategori	Telaah Dokumen Pendukung dan Indikator Makro					Rumusan Isu Strategis Daerah
		Telaah Isu/Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024) (7 Prioritas Nasional)	Telaah RPJPD Tahun 2005-2025	Telaah Isu/Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023)	Capaian Data Makro (Permendagri 18 Tahun 2020)	Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya (Tahun 2017-2022)	
		Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 2. Membangun Lingkungan Hidup; 3. Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai				
3.	Infrastruktur	3. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan	Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	1. Pencemaran, kerusakan alam, dan resiko bencana alam; 2. Belum Optimalnya Pengendalian		1. Persentase jalan dalam kondisi baik: 81,23% 2. Cakupan rumah layak huni: 80%	Masih rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur

No	Kategori	Telaah Dokumen Pendukung dan Indikator Makro					Rumusan Isu Strategis Daerah
		Telaah Isu/Kebijakan Nasional (RPJMN Tahun 2020-2024) (7 Prioritas Nasional)	Telaah RPJPD Tahun 2005-2025	Telaah Isu/Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023)	Capaian Data Makro (Permendagri 18 Tahun 2020)	Evaluasi RPJMD Periode Sebelumnya (Tahun 2017-2022)	
		Pelayanan Dasar; 4. Membangun Lingkungan Hidup; 5. Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim		Pemanfaatan Ruang dan Tingginya Alih Fungsi Lahan Pertanian		3. Jaringan irigasi dalam kondisi baik: 70,30%	
4.	Tata Kelola	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)	1. WTP; 2. IRB: B; 3. SAKIP: B; 4. IKM: - 5. Kriminalitas:		Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan
5.	Sosial	1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing; 2. Meningkatkan Ketahanan bencana, dan Perubahan Iklim	Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar	Tingginya angka kemiskinan	Kemiskinan: 16,23%	TPT: 5,86%	Masih tingginya kemiskinan dan pengangguran

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka RPD Tahun 2023-2026 mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah:

BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Visi Pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 ini mengarah pada pencapaian tujuan, cita-cita dan harapan masyarakat Kabupaten Banjarnegara. Visi pembangunan daerah tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, kesejahteraan, dan kelestarian yang ingin dicapai. Oleh karena itu, perlu kiranya diberikan penjelasan makna visi untuk mendapatkan kesamaan persepsi tentang muatan substansi filosofis yang terkandung, sehingga segenap pemangku kepentingan secara sinergis dan optimal dapat memberikan kontribusi dalam rangka pencapaiannya.

Kabupaten Banjarnegara diartikan sebagai suatu daerah otonom. Daerah otonom (selanjutnya disebut daerah) adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah menunjukkan suatu kesatuan pemerintahan dan kemasyarakatan beserta semua potensi yang dimiliki.

Maju artinya bahwa pelaksanaan pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik secara fisik maupun nonfisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing tinggi, ber peradaban tinggi, profesional serta berwawasan ke depan yang luas. Maju juga diarahkan pada terbentuknya daerah yang mampu mengelola segenap potensinya namun tetap mengedepankan pentingnya kerja sama dan sinergitas. Beberapa indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran tercapainya kondisi maju adalah tercapainya daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat; terbangunnya jaringan sarana dan prasarana pembangunan, pemerintahan dan pelayanan yang merata yang berdampak pada berkurangnya kesenjangan antarwilayah, pembangunan perdesaan dan daerah terpencil; optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset daerah dan sumber-sumber keuangan lainnya bagi kepentingan pembangunan; dan meningkatnya investasi dalam pembangunan yang didukung kondusivitas daerah.

Berbasis artinya bahwa pembangunan daerah terkonsentrasi pada salah satu tujuan, sedangkan aspek-aspek yang lain tetap diperhatikan dan dilaksanakan untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut.

Pertanian, konsep pertanian dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan pembangunan daerah, pertanian merupakan konsentrasi selama periode RPJPD. Pertanian yang dimaksud adalah meliputi pertanian tanaman pangan seperti padi, palawija dan hortikultura yang meliputi sayur mayur dan buah-buahan. Di samping pertanian tanaman pangan juga bidang peternakan, perikanan dan perkebunan, yang kesemuanya diharapkan dapat memberikan kontribusi penuh dan besar yang dapat menopang pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

5.2. Misi RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025, terdapat penyederhanaan misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga misi menjadi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat** yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), meningkatnya pemerataan pendidikan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, meningkatnya akses, pemerataan, dan mutu pelayanan kesehatan, meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatnya pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin, mantapnya kearifan lokal yang tercermin dalam meningkatnya peradaban, harkat, dan martabat manusia, dan menguatnya jati diri dan kepribadian masyarakat, meningkat dan menguatnya sumber daya manusia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang, meningkatnya karakter masyarakat yang berbudaya yang mendasarkan pada kearifan lokal dan jati diri, serta meningkatnya kesadaran dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari sehingga membentuk karakter masyarakat bermoral dan berakhlak mulia.
2. **Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang**

sejahtera, aman dan damai yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan per kapita pada akhir periode pembangunan jangka panjang mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan kabupaten-kabupaten yang maju di Indonesia, meningkatnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif (sektor pertanian, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata didukung dengan sektor lain) yang berdaya saing tinggi menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi pertanian yang berkualitas, berdaya saing global, menjadi motor penggerak perekonomian sekaligus mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanan lebih bermutu, meningkatnya ketersediaan kebutuhan pokok dan dapat dipertahankan pada tingkat aman melalui swasembada pangan dan disertai dengan tersedianya instrumen jaminan pangan di masyarakat melalui revitalisasi pertanian dalam arti luas, meningkatnya sektor pertanian ke arah agribisnis dan agroindustri serta agrowisata yang didukung dengan meningkatnya perdagangan dalam usaha untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatnya pemanfaatan aset dan produk daerah yang berdaya saing tinggi sebagai sumber kekayaan daerah, meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi dan seimbang, meningkatnya keterpeliharaan kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing, dan modal pembangunan daerah, meningkatnya kualitas sumber daya air, udara, dan tanah sesuai baku mutu dan terlindunginya kesehatan masyarakat dari dampak akibat pencemaran, meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta mengurangi dampak bencana alam, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial, tercapainya penduduk tumbuh seimbang,

serta berkurangnya tindak kekerasan berbasis gender dan anak tanpa diskriminasi, menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk miskin, meningkatnya upaya perlindungan HAM dan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, meningkatnya kestabilan situasi dan kondisi perikehidupan bermasyarakat yang didukung oleh penegakan HAM dan terwujudnya kesetaraan gender, meningkatnya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat Kabupaten Banjarnegara, meningkatnya upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga dan memelihara persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat, serta meningkatnya perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat dari segala tindak kejahatan.

3. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab** yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi dan kesadaran politik masyarakat terutama menyangkut hak dan kewajiban warga negara serta institusionalisasi partai politik dalam kegiatan politik, meningkatnya profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, beretika, dan bertanggung jawab, serta mampu mendukung pembangunan daerah yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), meningkatnya kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar mutu pelayanan yang berorientasi pada terciptanya kepuasan masyarakat, meningkatnya perkembangan sistem dan iklim demokrasi pada berbagai aspek kehidupan politik yang dapat diukur dengan adanya pemerintahan yang berdasarkan hukum, birokrasi yang profesional dan netral, dan masyarakat yang mandiri, Meningkatnya kemampuan dan kemandirian daerah dalam mendukung pembangunan daerah, menguatnya kelembagaan lokal yang mampu mengakomodasi tuntutan perubahan dan berperan aktif dalam pembangunan daerah, serta meningkatnya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ditandai dengan meningkatnya infrastruktur wilayah dan yang andal sehingga dapat meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas faktor-faktor yang mendukung berkembangnya aktivitas produksi dan mampu membuka isolasi daerah serta membentuk kawasan-kawasan pertumbuhan baru, meningkatnya perumahan rakyat layak huni yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukungnya untuk mewujudkan daerah tanpa permukiman kumuh, meningkatnya keterpenuhan dan pemerataan kebutuhan prasarana dan sarana pelayanan dasar di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, dan meningkatnya jaringan irigasi, bendung dalam rangka menciptakan ketahanan pangan.

5.3. Tahapan dan Skala Prioritas Periode keempat (2020-2024) RPJPD Tahun 2005-2025

Berlandaskan pada pelaksanaan, pencapaian, serta sebagai kelanjutan dari periode sebelumnya yang diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Banjarnegara yang maju berbasis pertanian melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan sosial budaya dan ekonomi masyarakat Banjarnegara yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Dalam rangka mencapai tujuan akhir maka pada tahap ini pembangunan diselenggarakan untuk mencapai daerah agropolitan, mencakup tahapan sebagai berikut:

1. Pemantapan pelayanan pendidikan dasar yang bermutu didukung oleh sarana prasarana yang memadai dan tenaga pendidik yang berkompetensi, serta kurikulum pendidikan dasar yang sesuai dengan iptek, jenjang pendidikan lebih tinggi, dan pangsa pasar kerja.
2. Pemantapan peranan pemuda dalam pembangunan yang didukung oleh peningkatan kreativitas, keterampilan, seni budaya, dan olahraga, serta kewirausahaan yang berbasis pada penggunaan dan pemanfaatan teknologi.

3. Penyerapan tenaga kerja yang tinggi pada sektor industri dan pertanian.
4. Pengembangan riset yang mengarah pada penciptaan teknologi baru.
5. Pemantapan pelayanan perpustakaan berbasis teknologi informasi yang dapat berfungsi untuk mencerdaskan masyarakat.
6. Pemantapan pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan perseorangan/rujukan yang prima dengan mendayagunakan tenaga kesehatan yang profesional, serta didukung oleh sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat yang andal.
7. Pemantapan sistem pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan pengaturan persebarannya melalui KB dan transmigrasi mandiri.
8. Pemantapan penguasaan iptek di berbagai bidang secara kompetitif dalam mewujudkan kemandirian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
9. Pemantapan karakter masyarakat yang mempunyai jati diri yang tangguh, bermoral, dan mampu bersaing dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai agama dan budaya lokal yang memiliki ketahanan dalam dinamika pergaulan nasional, regional, dan internasional.
10. Pelestarian nilai-nilai kearifan budaya lokal dalam rangka memperkuat jati diri dalam pergaulan nasional maupun internasional.
11. Pemantapan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama disertai pembinaan dan pemeliharaan kerukunan hubungan antarumat beragama.
12. Pemantapan UMKM yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif di pasar global yang berbasis teknologi informasi.
13. Pemantapan struktur perekonomian yang didukung oleh produk-produk unggulan yang mempunyai nilai ekonomi strategis, berkualitas, serta mempunyai keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar global.
14. Pemantapan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang diarahkan untuk menghasilkan produk-produk yang

bertumpu pada sistem agribisnis guna menjamin ketahanan dan swasembada pangan, serta peningkatan nilai tambah produk ekspor.

15. Pemantapan kualitas dan pemasaran produk pada sektor perindustrian, perdagangan, dan pariwisata.
16. Meningkatkan keragaman kegiatan perekonomian kawasan agropolitan dan wilayah penyangganya.
17. Pembangunan industri yang terarah sesuai dengan kluster dan potensi di daerah yang bersangkutan, serta memperhatikan tata wilayah untuk mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan teratur.
18. Pemantapan konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup berbasis kelembagaan masyarakat dalam rangka menjaga keberlanjutan fungsi dalam menopang kehidupan.
19. Pelestarian sumber daya genetis berbasis masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
20. Pemantapan manajemen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas daya tampung dan daya dukung lingkungan.
21. Pemantapan fungsi kelembagaan dan sistem pengurangan risiko bencana.
22. Pemantapan sistem dan kelembagaan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan pemberdayaan penduduk usia lanjut melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
23. Pemantapan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan serta perlindungan anak dan remaja sesuai dengan norma-norma agama dan falsafah Pancasila.
24. Pemantapan kondisi perekonomian daerah yang berkelanjutan dalam rangka memperluas kesempatan kerja, pengurangan dan pengentasan kemiskinan.
25. Pemantapan budaya penegakan hukum guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
26. Pemantapan sistem dan pelestarian tata pengelolaan kehidupan bermasyarakat yang memahami dan menerapkan prinsip-prinsip dasar hukum dan HAM.

27. Pemantapan kondisi keamanan dan ketertiban melalui program/kegiatan yang mengutamakan keterpaduan aparat dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta menjaga kerukunan sosial dalam kehidupan masyarakat serta melibatkan masyarakat sebagai salah satu unsur utama dalam membangun pertahanan negara dengan tetap memperhatikan penegakan hukum dan HAM.
28. Pemantapan perlindungan terhadap masyarakat, penghargaan yang tinggi terhadap penegakan hukum dan peradilan untuk menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban, persatuan, dan kesatuan serta kerukunan masyarakat dalam rangka mewujudkan terjaminnya keamanan dan ketertiban.
29. Pemantapan sistem dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* melalui peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan keadilan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
30. Pemantapan sistem budaya kerja aparatur yang berkualitas, profesional, bersih, beretika, dan berwibawa dalam rangka menunjang tata pengelolaan pemerintahan yang baik.
31. Pemantapan sistem dan akses pelayanan publik melalui peningkatan kompetensi sesuai kewenangan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada bidang pelayanan dasar dan penunjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
32. Pemantapan sistem demokrasi, politik, dan penegakan hukum serta HAM melalui peningkatan kedewasaan politik rakyat serta penegakan hukum yang dilandasi prinsip transparansi, keadilan, dan HAM.
33. Pemantapan sistem perencanaan yang implementatif dan berkualitas yang berorientasi pada pemanfaatan sumber daya pembangunan secara sinergis.
34. Pemantapan kerja sama dan kemitraan strategis pada seluruh sektor pembangunan dengan tetap berbasis jati diri budaya masyarakat Banjarnegara dalam mengantisipasi kemajuan dan pengaruh globalisasi.

35. Semakin terbukanya peluang investasi domestik atau investasi asing untuk masuk ke daerah melalui perbaikan iklim investasi dan kebijakan yang mendukung dengan adanya kemunculan kutub-kutub pertumbuhan yang mampu menjadi motor penggerak perekonomian.
36. Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan saling mendukung satu sama lain serta sistem kelembagaan yang mantap dan terintegrasi.
37. Memperluas kerja sama dengan institusi nasional atau internasional yang akan mendukung perkembangan industri pertanian.
38. Terwujudnya keterkaitan kegiatan ekonomi antar wilayah perkotaan dan perdesaan dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang saling menguntungkan, sehingga terjadi keseimbangan pertumbuhan antara perdesaan dan perkotaan.
39. Pemantapan sistem transportasi yang berorientasi pada keamanan dan kenyamanan serta pemenuhan kebutuhan transportasi massal yang andal.
40. Pemenuhan kebutuhan rumah dan permukimannya yang berkualitas dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup.
41. Pemantapan prasarana dan sarana sumberdaya air dan irigasi untuk mendukung aktivitas produksi yang handal dan berdaya saing, dan terpenuhinya secara mantap kebutuhan prasarana dasar perdesaan dan perkotaan, dalam rangka peningkatan kemandirian, kualitas hidup, dan kesejahteraan masyarakat.
42. Pemantapan penatagunaan pertanahan, administrasi, dan hukum; pemanfaatan dan pengendalian pertanahan untuk menunjang perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.
43. Pemantapan sistem penataan ruang yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan melalui pemantapan penerapan perencanaan tata ruang; pemantapan dan pengembangan pemanfaatan ruang; dan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang untuk menunjang perekonomian daerah, pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

44. Pemantapan sistem manajemen penyelenggaraan telekomunikasi dan telematika yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat yang berstandar internasional baik dari aspek kelembagaan, organisasi, maupun regulasinya.
45. Pemantapan pasokan kebutuhan energi listrik bagi masyarakat luas (rumah tangga dan industri) secara konsisten melalui peningkatan sistem dan pemantapan manajemen operasi dan pemeliharaan jaringan distribusi secara terpadu.
46. Pemantapan pemerataan dan keserasian pembangunan wilayah kecamatan untuk meningkatkan daya saing dalam menunjang perekonomian daerah, kesejahteraan masyarakat, dan lingkungan hidup melalui pemantapan pembangunan kawasan strategis, keserasian peran, dan fungsi perkotaan dan perdesaan, serta ketersediaan infrastruktur wilayah yang andal.
47. Penciptaan Tata Ruang sesuai dengan hirarki perencanaan (RTRW Kabupaten) sebagai daerah pertanian yang memperhatikan koordinasi dan sinkronisasi pembangunan antar sektor dan antar wilayah.

5.4. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Dengan kata lain tujuan dan sasaran merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya kondusivitas wilayah

Sasaran:

1. Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama
2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana

Tujuan 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi

Sasaran:

1. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat
2. Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal
3. Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak

Tujuan 3: Meningkatnya kinerja perekonomian daerah

Sasaran:

1. Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha
2. Meningkatnya kesempatan kerja
3. Meningkatnya pemerataan pembangunan
4. Meningkatnya stabilitas harga
5. Meningkatnya daya saing daerah

Tujuan 4: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Sasaran:

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan

Tujuan 5: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sasaran:

Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah

Tujuan 6: Meningkatnya kualitas layanan publik

Sasaran:

Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik

Tujuan 7: Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

Sasaran:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
2. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah
4. Meningkatnya cakupan rumah layak huni
5. Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Tujuan dan sasaran jangka menengah selama periode RPD Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Banjarnegara

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR
					2021	2023	2024	2025	2026		
1.	Meningkatnya kondusivitas wilayah		Indeks ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan mayarakat	Angka	75,20	76,00	76,50	77,00	77,50	77,50	
		Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Persentase desa tangguh bencana	%	38,97	40	42	42	44	44	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Persentase penggunaan hak pilih								
			- Pilkades	%	80,33		80,50	80,65		80,65	
			- Pilgub	%			75			75	
			- Pilbup	%			75			75	
			- Pileg	%			75			75	
			- Pilpres	%			75			75	
		Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Indeks kebudayaan	Angka	63,49	65	67	69	71	71	
		Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,20	73,70	74,20	74,70	75,20	75,20	

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
					2021	2023	2024	2025	2026	
3	Meningkatnya kinerja perekonomian daerah		Laju pertumbuhan ekonomi	%	3,26	4,50-5,50	4,50-5,50	4,50-5,50	4,50-5,50	4,50-5,50
			PDRB per kapita	Juta Rupiah	22,22	>22,40	>22,60	>22,80	>23,00	>23,00
			Nilai Tukar Petani	%	103-106	103-106	103-106	103-106	103-106	103-106
		Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha	Persentase peningkatan nilai investasi	%	-66,44	1	1,5	2,5	4	4
		Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,86	<5	<4,75	<4,5	<4,25	<4,25
		Meningkatnya pemerataan pembangunan	Indeks Gini	Angka	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35	0,35
			Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,43	0,42	0,40	0,38	0,35	0,35
		Meningkatnya stabilitas harga	Laju inflasi	%	2,18	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
		Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,99	3,00	3,10	3,20	3,30	3,30
4	Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	62,36	67,5	68,5	68,75	69	69
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	63,01	64,00	65,00	66,00	67,00	67,00
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai	B	B	B	B	BB	BB
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
					2021	2023	2024	2025	2026	
6	Meningkatnya kualitas layanan publik		Indeks Inovasi Daerah	Angka	41,91	45	50	55	60	60
		Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	83,56	84,34	85,00	85,34	86,00	86,00
7	Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Angka	67,86	68	68,25	68,50	68,75	68,75
			Persentase penduduk miskin	%	16,23	15,64-14,46	14,46-13,64	13,64-12,46	12,46-11,64	12,46-11,64
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Menurunnya angka kematian neonatal	Per 1000 KH	9,45	8,5	8	7,5	7	7
			Angka Harapan Hidup	Tahun	74,28	74,48	74,68	74,88	75,08	75,08
			Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	287	210	190	170	150	150
			Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	12,9	12,5	12,3	12,1	11,9	11,9
			Prevalensi stunting	%	22,7	19	18	17	16	16
		Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Angka harapan lama sekolah	Tahun	11,63	11,65	11,66	11,67	11,69	11,69
			Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	6,75	6,80	6,85	6,90	7,01	7,01
		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kemahalan Konstruksi	%	93,14	92,50	92	91,50	91,00	91,00
		Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	80	82	84	86	88	88

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL	TARGET CAPAIAN				KONDISI AKHIR
					2021	2023	2024	2025	2026	
		Menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	-7,75	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Perumusan strategi dan arah kebijakan merupakan pendekatan komprehensif untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan pendekatan tersebut diharapkan perencanaan strategi dan arah kebijakan dapat menjadikan acuan untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Suatu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran namun juga beberapa sasaran yang inheren. Strategi harus dapat menunjukkan keinginan yang kuat, dari Pemerintah Daerah, bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Strategi wajib dijadikan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama pelaksanaan periode pembangunan jangka menengah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Tujuan 1: Meningkatnya kondusivitas wilayah

Strategi:

1. Pemantapan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat
2. Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana
3. Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel

Tujuan 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi

Strategi:

1. Penguatan pendidikan politik masyarakat
2. Penguatan karakter yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal
3. Percepatan pengarusutamaan gender

Tujuan 3: Meningkatnya kinerja perekonomian daerah

Strategi:

1. Peningkatan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan
3. Peningkatan kinerja sektor pariwisata
4. Peningkatan pendampingan dan pembinaan UKM
5. Peningkatan manajemen koperasi
6. Penciptaan lapangan kerja
7. Peningkatan kesejahteraan pekerja
8. Pengembangan agroindustri
9. Peningkatan daya saing ekonomi kreatif
10. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas perdagangan
11. Peningkatan antisipasi terhadap pergerakan harga komoditas pemicu inflasi dan tarikan permintaan
12. Pengembangan pusat-pusat kegiatan lokal.

Tujuan 4: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Strategi:

1. Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup
2. Pengembangan penghijauan dan rehabilitasi fungsi kawasan rawan bencana, kawasan hutan rakyat, dan kawasan agropolitan
3. Perlindungan sumber-sumber air dan mata air.

Tujuan 5: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Strategi:

1. Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah
2. Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur
3. Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa.

Tujuan 6: Meningkatnya kualitas layanan publik

Strategi:

Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau

Tujuan 7: Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

Strategi:

1. Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit

3. Peningkatan Upaya Promosi dan pemberdayaan Kesehatan
4. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan
5. Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan
6. Peningkatan pendidikan nonformal yang merata dan bermutu
7. Peningkatan kualitas manajemen infrastruktur jalan dan jembatan
8. Peningkatan akses dan kualitas jaringan irigasi
9. Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Umum
10. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
11. Pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan
12. Peningkatan Keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan meliputi:

Arah Kebijakan tahun pertama (2023) “Pemulihan perekonomian melalui peningkatan daya saing daerah”:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama bagi masyarakat miskin dan wilayah dengan akses rendah;
 - b. Meningkatkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi;
 - c. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku hidup bersih dan sehat pada masyarakat;
 - d. Peningkatan kerja sama pengembangan riset daerah;
 - e. Melestarikan kesenian lokal, benda dan bangunan cagar budaya;
 - f. Peningkatan kualitas pemenuhan hak anak dan perempuan
 - g. Meningkatkan minat dan budaya baca.
2. Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian, dengan fokus pada:
 - a. Menyediakan regulasi dan prosedur perizinan yang pro investasi;

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung investasi;
 - c. Penyediaan Mal Pelayanan Publik;
 - d. Peningkatan jumlah wirausaha;
 - e. Memfasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian dan perikanan;
 - f. Meningkatkan kualitas pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - g. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta aksesibilitas destinasi wisata;
 - h. Peningkatan kapasitas ekonomi kreatif.
3. Peningkatan konektivitas antarwilayah, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan pendukung perekonomian;
 - b. Mendorong terbukanya aksesibilitas kawasan untuk pertumbuhan ekonomi;
 - c. Mengembangkan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal.
4. Penanganan kemiskinan ekstrim dan pengurangan pengangguran, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan koordinasi antar lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan;
 - b. Perluasan kesempatan kerja dan lapangan berusaha;
 - c. Penguatan koordinasi dan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak mengenai bantuan RTLH;
 - d. Peningkatan akses air minum dan sanitasi;
 - e. Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
- a. Peningkatan kapasitas fiskal daerah;
 - b. Penyederhanaan prosedur untuk mengakses layanan publik;
 - c. Fasilitasi pendidikan dan pelatihan SDM aparatur;
 - d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi pembangunan daerah;
 - e. Meningkatkan kualitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 - f. Mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan.

6. Peningkatan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga terkait dalam menciptakan ketenteraman, ketertiban, dan keamanan masyarakat;
 - b. Meningkatkan pendidikan politik pada segmen pemilih rentan;
 - c. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar dan intra umat beragama;
 - d. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana;
 - e. Meningkatkan penanganan pasca bencana.

Arah Kebijakan tahun kedua (2024) “Pemantapan kondusivitas wilayah untuk mendukung perekonomian daerah yang berkelanjutan berbasis pertanian”:

1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan;
 - b. Penguatan lembaga pendidikan nonformal;
 - c. Meningkatkan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat;
 - d. Peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan;
 - e. Meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan inovasi daerah;
 - f. Meningkatkan sarana dan prasarana perpustakaan.
2. Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang pro investasi;
 - b. Menerapkan inovasi dan teknologi pertanian dan perikanan;
 - c. Meningkatkan kualitas sumber daya pertanian dan perikanan;
 - d. Mengembangkan atraksi dan even wisata;
 - e. Optimalisasi Mal Pelayanan Publik;
 - f. Peningkatan jumlah kewirausahaan pemuda;
 - g. Meningkatkan kapasitas kelembagaan UKM;
 - h. Penguatan sektor industri pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah produksi sektor primer;
 - i. Peningkatan kualitas ekonomi kreatif;
 - j. Pengendalian dampak lingkungan akibat pembangunan.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah, dengan fokus pada:
 - a. Melaksanakan pembangunan jalan tuntas ruas;

- b. Meningkatkan pengelolaan dan tata guna air irigasi;
 - c. Optimalisasi pengelolaan sumber daya air untuk pemenuhan kebutuhan air bersih;
 - d. Pengembangan manajemen persampahan;
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung jalan.
4. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:
- a. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru;
 - b. Meningkatkan cakupan penanganan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
 - c. Penanganan RTLH secara terpadu;
 - d. Peningkatan keterampilan berusaha dan fasilitasi informasi lapangan pekerjaan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
- a. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik;
 - b. Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan aset daerah;
 - c. Peningkatan kualitas pengendalian dan pengawasan pembangunan;
 - d. Meningkatkan disiplin aparatur.
6. Peningkatan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - b. Meningkatkan peran partai politik dan lembaga pendidikan dalam pendidikan politik dan pengembangan etika politik;
 - c. Meningkatkan toleransi dan kerukunan antar dan intra umat beragama;
 - d. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kebencanaan;
 - e. Pengurangan risiko bencana melalui mitigasi dan pencegahan kejadian bencana.

Arah Kebijakan tahun ketiga (2025) “Penguatan perekonomian daerah dengan peningkatan pemanfaatan potensi daerah”:

- 1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada:
 - a. Pemantapan kualitas pendidikan dasar dan kesetaraan;
 - b. Mengarahkan pendidikan nonformal agar dapat memberikan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;

- c. Meningkatkan upaya pencegahan, pemberantasan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular;
 - d. Meningkatkan implementasi riset dan inovasi daerah;
 - e. Meningkatkan sarana dan prasarana seni, olahraga, dan kebudayaan;
 - f. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - g. Pengendalian jumlah penduduk;
 - h. Penguatan literasi digital masyarakat.
2. Penguatan perekonomian daerah, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata serta amenities destinasi wisata;
 - c. Mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan;
 - d. Memperluas akses jaringan pemasaran UKM;
 - e. Meningkatkan pelayanan cakupan jaringan irigasi;
 - f. Memfasilitasi pencegahan dan penanganan gagal panen;
 - g. Memfasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian dan perikanan;
 - h. Meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan;
 - i. Meningkatkan strategi promosi wisata yang efektif;
 - j. Revitalisasi pasar-pasar tradisional;
 - k. Meningkatkan produksi dan produktivitas daerah;
 - l. Revitalisasi kelembagaan industri kreatif;
 - m. Meningkatkan kualitas tenaga kerja;
 - n. Mengembangkan penanaman pohon perlindungan mata air di kawasan perlindungan setempat.
3. Peningkatan kualitas infrastruktur daerah, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan;
 - b. Mengembangkan pilihan teknologi infrastruktur jalan;
 - c. Meningkatkan kuantitas dan kualitas Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum;
 - d. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan sanitasi dan air minum yang layak dan berkualitas.
4. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:

- a. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru;
 - b. Meningkatkan peran serta aktif Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
 - c. Perluasan penanganan RTLH.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
- a. Meningkatkan kualitas budaya pelayanan publik;
 - b. Optimalisasi pendapatan Asli daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - c. Penguatan implementasi e-government;
 - d. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan keuangan desa.
6. Peningkatan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - b. Memantapkan pendidikan budi pekerti dan wawasan kebangsaan sejak dini;
 - c. Meningkatkan kualitas komunikasi antar dan intra umat beragama;
 - d. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan tanggap darurat bencana;

Arah Kebijakan tahun keempat (2026) “Peningkatan pemerataan pembangunan wilayah”:

- 1. Peningkatan kualitas SDM yang berdaya saing, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas pendidikan;
 - b. Memperkuat pengendalian mutu pendidikan;
 - c. Meningkatkan kualitas cakupan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM dalam mendukung kemajuan budaya dan pelestarian cagar budaya;
 - e. Meningkatkan kualitas Kabupaten Layak Anak.
- 2. Penguatan perekonomian daerah berbasis pertanian yang berkelanjutan, dengan fokus pada:
 - a. Meningkatkan skala promosi dan kerja sama investasi;
 - b. Mengembangkan pariwisata berbasis kerakyatan;
 - c. Memperluas akses jaringan pemasaran UKM secara digital;
 - d. Meningkatkan kualitas kelembagaan pertanian dan perikanan;

- e. Meningkatkan penanganan panen dan pasca panen pertanian dan perikanan;
 - f. Memperkuat kelembagaan pariwisata;
 - g. Memperkuat industri kreatif dalam pengembangan pariwisata;
 - h. Meningkatkan kerja sama di bidang pemasaran dengan pelaku usaha wisata;
 - i. Memfasilitasi peningkatan inovasi dan perlindungan kekayaan intelektual;
3. Peningkatan infrastruktur daerah, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan;
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana keselamatan jalan raya;
 - c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
 - d. Memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sanitasi.
4. Pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, dengan fokus pada:
- a. Mendorong terciptanya lapangan pekerjaan baru;
 - b. Memperkuat kelembagaan kesejahteraan sosial;
 - c. Meningkatkan peran para pemangku kepentingan dalam program-program pengentasan kemiskinan.
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
- a. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah;
 - b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas pemerintah daerah;
 - d. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa.
6. Peningkatan kondusivitas wilayah, dengan fokus pada:
- a. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - b. Pemulihan sarana dan prasarana fisik dan non fisik di wilayah pascabencana secara terpadu;
 - c. Meningkatkan penanganan daerah rawan bencana.

6.3. Program Prioritas

Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD Tahun 2023-2026. Program prioritas yang akan dilaksanakan selama tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tujuan 1: Meningkatnya kondusivitas wilayah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
2. Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
3. Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
4. Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
5. Program penanggulangan bencana
6. Program penanganan bencana
7. Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.

Tujuan 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
2. Program pengembangan kebudayaan
3. Program penelitian dan pengembangan daerah
4. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Tujuan 3: Meningkatnya kinerja perekonomian daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pengembangan iklim penanaman modal
2. Program penyelenggaraan penataan ruang
3. Program pengelolaan perikanan budidaya
4. Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

5. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
6. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
7. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
8. Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
9. Program pemasaran pariwisata
10. Program pengembangan UMKM
11. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
12. Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
13. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
14. Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
15. Program penempatan tenaga kerja
16. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
17. Program hubungan industrial
18. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
19. Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
20. Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tujuan 4: Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
2. Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI).

Tujuan 5: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
2. Program penyelenggaraan pengawasan
3. Program pengelolaan keuangan daerah
4. Program pengelolaan pendapatan daerah

5. Program pengembangan sumber daya manusia
6. Program administrasi pemerintahan desa
7. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa.

Tujuan 6: Meningkatnya kualitas layanan publik

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program administrasi umum
2. Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota
3. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan 7: Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas

Program prioritas yang akan dilaksanakan adalah:

1. Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
2. Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan
3. Program pengelolaan pendidikan
4. Program pendidik dan tenaga kependidikan
5. Program pengelolaan pendidikan
6. Program penyelenggaraan jalan
7. Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
8. Program penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
9. Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
10. Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
11. Program pengembangan perumahan
12. Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
13. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
14. Program perlindungan jaminan sosial
15. Program pemberdayaan sosial
16. Program rehabilitasi sosial.

Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi, dan program disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Prioritas

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
Meningkatnya kondusivitas wilayah	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	Pemantapan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum
			Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya
			Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial
			Program penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan
	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	Peningkatan kualitas kesiapsiagaan bencana	Program penanggulangan bencana
		Penanggulangan Bencana yang terencana, terkoordinasi, terpadu dan akuntabel	Program penanganan bencana
			Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat dan berdemokrasi	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Penguatan pendidikan politik masyarakat	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik
	Meningkatnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kearifan lokal	Penguatan karakter yang berbasis pada nilai budaya dan kearifan lokal	Program pengembangan kebudayaan
			Program penelitian dan pengembangan daerah
	Meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan dengan memperhatikan hak-hak anak	Percepatan pengarusutamaan gender	Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
			Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
Meningkatnya kinerja perekonomian daerah	Meningkatnya kesempatan lapangan berusaha	Peningkatan kepastian investasi dan iklim usaha yang kondusif	Program pengembangan iklim penanaman modal
			Program penyelenggaraan penataan ruang
		Pengembangan agroindustri	Program pengelolaan perikanan budidaya
			Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
			Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian
			Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian
			Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
		Peningkatan kinerja sektor pariwisata	Program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata
			Program pemasaran pariwisata
		Peningkatan pendampingan dan pembinaan UKM	Program pengembangan UMKM
			Program pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
		Peningkatan manajemen koperasi	Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi
		Peningkatan kualitas dan aksesibilitas perdagangan	Program peningkatan sarana distribusi perdagangan
			Program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
	Meningkatnya kesempatan kerja	Penciptaan lapangan kerja	Program penempatan tenaga kerja

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
			Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja
		Peningkatan kesejahteraan pekerja	Program hubungan industrial
	Meningkatnya pemerataan pembangunan	Pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi lokal	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
	Meningkatnya stabilitas harga	Peningkatan antisipasi terhadap pergerakan harga komoditas pemicu inflasi dan tarikan permintaan	Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
	Meningkatnya daya saing daerah	Peningkatan daya saing industri kreatif	Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif
Meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang meliputi kualitas udara, kualitas air sungai, dan tutupan lahan	Pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan hidup	Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		Pengembangan penghijauan dan rehabilitasi fungsi kawasan rawan bencana, kawasan hutan rakyat, dan kawasan agropolitan	Program pengelolaan keanekaragaman hayati (KEHATI)
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian,	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
		pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah	
			Program penyelenggaraan pengawasan
			Program pengelolaan keuangan daerah
			Program pengelolaan pendapatan daerah
		Pembinaan dan peningkatan SDM aparatur	Program pengembangan sumber daya manusia
		Peningkatan pembinaan manajemen pemerintahan desa	Program administrasi pemerintahan desa
			Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
Meningkatnya kualitas layanan public	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Pengembangan sistem pelayanan yang cepat, mudah dan terjangkau	Program administrasi umum
			Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota
			Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
			Program informasi dan komunikasi publik

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
Meningkatnya cakupan pemenuhan kebutuhan dan layanan dasar yang berkualitas	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Peningkatan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat
		Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit	
		Peningkatan Upaya Promosi dan pemberdayaan Kesehatan	
	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan Pendidikan	Peningkatan akses dan kualitas pelayanan Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan
		Peningkatan pendidikan nonformal yang merata dan bermutu	Program pendidik dan tenaga kependidikan
		Peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan
	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan	Program penyelenggaraan jalan
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase
		Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Program
	Meningkatnya cakupan rumah layak huni	Pengembangan Prasarana Sarana Utilitas Umum	Program peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh
			Program pengembangan perumahan
			Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum
	Menurunnya jumlah PMKS	Pengintegrasian program penanggulangan kemiskinan	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah
		Peningkatan Keberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Program perlindungan jaminan sosial
			Program pemberdayaan sosial
			Program rehabilitasi sosial

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN

PEMBANGUNAN DAN PROGRAM

PERANGKAT DAERAH

7.1. Kerangka Pendanaan Pembangunan

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan pada bab sebelumnya. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Banjarnegara yang biasanya setiap tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 masih akan dirasakan kurang lebih sampai dengan tahun 2022. Setelah itu keuangan daerah diharapkan akan kembali pulih dengan cepat.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2023-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Banjarnegara tahun 2023- 2026 meliputi :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain- lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan perkembangan capaian pendapatan daerah 5 tahun kebelakang (2017-2022), selama belum terjadi pandemi covid 19 pendapatan mengalami kenaikan akan tetapi selama terjadinya pandemi covid 19 ini pendapatan daerah cenderung mengalami penurunan. Sehingga pendapatan daerah harus mempertimbangkan dari sisi pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer baik dari pemerintah pusat maupun dari provinsi. Khusus pendapatan asli daerah diperlukan strategi dan kebijakan umum pengelolaan sebagai berikut :

- a. Pendataan, pemutakhiran serta pemetaan potensi pendapatan;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber – sumber pendapatan asli daerah;
- c. Review peraturan-peraturan yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
- d. Pemanfaatan aset-aset pemerintah daerah yang dapat menjadi sumber pendapatan;
- e. Pengembangan BUMD serta peningkatan profesionalisme dan tata kelola BUMD.

Di samping itu dalam hal pembiayaan diperlukan inovasi-inovasi di antaranya melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP)/ *Corporated Social Responsibility* (CSR) ataupun Kerjasama Pemerinta dengan Badan Usaha (KPBU).

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang menjadi kewenangan daerah dalam hal ini Pemerinta Kabupaten Banjarnegara, berdasarkan Peraturan Pemeritah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak

Terduga dan Belanja Transfer. Adapun kerangka pendanaan belanja daerah di antaranya diarahkan untuk :

- a. Melaksanakan program prioritas sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
- b. Melaksanakan pemenuhan belanja daerah yang sifatnya wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum);
- c. Melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Dalam rangka pendanaan belanja daerah dan guna percepatan pencapaian target pembangunan daerah upaya-upaya yang dapat dilakukan di antaranya melalui pinjaman daerah.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan diperlukan dalam rangka penyiapan dana cadangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ataupun untuk penyertaan (investasi) daerah. Untuk penyertaan modal tersebut di antaranya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

7.2. Program Perangkat Daerah

Indikasi rencana program perangkat daerah Kabupaten Banjarnegara berisi program-program prioritas baik untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2023 sampai dengan 2026 maupun untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi PD dalam penyusunan Rencana Strategis PD.

Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan oleh PD untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Pada akhirnya, keseluruhan rangkaian perencanaan pembangunan daerah bermuara pada program prioritas yang selanjutnya harus diterjemahkan oleh tiap-tiap PD ke dalam kegiatan prioritas. Perencanaan program prioritas dalam dokumen RPD harus dirumuskan dengan seksama mengingat pentingnya makna program prioritas bagi rujukan utama dalam pelaksanaan perencanaan tiap tahun kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pagu indikatif merupakan ancangan maksimal atas rencana belanja yang akan dituangkan dalam APBD. Pagu indikatif dialokasikan ke tiap-tiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai tiap-tiap indikator yang telah ditetapkan. Selanjutnya, masing-masing pagu menjadi patokan maksimal bagi PD dalam menjabarkan pagu tersebut pada kegiatan prioritas selama 4 (empat) tahun.

TABEL KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2023 – 2026

No	URAIAN	2022 APBD	2023	2024	2025	2026
I	PENDAPATAN	2.104.392.063.000	2.240.984.247.351	2.331.568.731.277	2.432.631.683.790	2.545.754.104.443
1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	289.405.831.000	343.130.912.061	360.962.674.018	381.389.601.662	404.863.314.407
2	PENDAPATAN TRANSFER	1.777.921.369.000	1.789.559.669.729	1.862.312.391.698	1.942.948.416.567	2.032.597.124.476
3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	175.996.793.000	218.615.868.987	220.802.027.677	223.010.047.954	225.240.148.434
I	BELANJA	2.187.091.604.000	2.240.053.268.638	2.353.423.673.803	2.477.186.741.151	2.612.585.478.701
1	BELANJA OPERASI	1.476.823.609.000	1.506.391.618.176	1.599.601.251.659	1.702.520.988.156	1.816.367.178.740
2	BELANJA MODAL	281.616.490.000	300.771.209.868	303.778.921.967	306.816.711.186	309.884.878.298
3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.700.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
4	BELANJA TRANSFER	407.951.505.000	412.890.440.594	430.043.500.177	447.849.041.809	466.333.421.662
	TOTAL SURPLUS/DEFISIT	-82.699.541.000	-20.000.000.000	-60.000.000.000	-45.000.000.000	-33.750.000.000
III	PEMBIAYAAN	82.699.541.000	20.000.000.000	60.000.000.000	45.000.000.000	33.750.000.000
1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.849.541.000	50.000.000.000	70.000.000.000	55.000.000.000	43.750.000.000
2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.150.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	-	-	-	-

PROYEKSI PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022-2026

Kode	Uraian	Proyeksi				
		2022*)	2023	2024	2025	2026
	PENDAPATAN	2.104.392.063.000	2.240.984.247.351	2.331.568.731.277	2.432.631.683.790	2.545.754.104.443
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	289.405.831.000	343.130.912.061	360.962.674.018	381.389.601.662	404.863.314.407
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	68.953.500.000	68.672.258.760	74.558.470.890	81.258.917.166	88.899.565.275
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	27.541.475.000	33.537.242.016	40.244.690.419	48.293.628.503	57.952.354.204
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16.914.063.000	2.305.542.298	25.357.485.031	28.827.008.038	32.771.246.495
4.1.04	Lain-lain PAD Yang Sah	175.996.793.000	218.615.868.987	220.802.027.677	223.010.047.954	225.240.148.434
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.777.921.369.000	1.789.559.669.729	1.862.312.391.698	1.942.948.416.567	2.032.597.124.476
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.664.294.590.000	1.623.245.046.675	1.673.452.752.328	1.728.362.353.000	1.788.654.288.986
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.290.262.761.453	1.313.517.726.897	1.339.075.709.560	1.367.373.833.129	1.398.936.411.229
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil (DBH)	54.485.988.572	65.383.186.287	78.459.823.544	94.151.788.253	112.982.145.904
4.2.01.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)	904.921.126.110	913.970.337.371	923.110.040.745	932.341.141.152	941.664.552.564

4.2.01.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	330.855.646.771	334.164.203.239	337.505.845.271	340.880.903.724	344.289.712.761
4.2.01.01.04	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik					
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	17.371.327.340	17.545.040.613	17.720.491.020	17.897.695.930	18.076.672.889
4.2.01.05	Dana Desa	286.894.733.631	309.727.319.779	334.377.042.768	360.988.519.870	389.717.877.757
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	146.557.592.041	166.314.623.054	188.859.639.370	214.586.063.568	243.942.835.490
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	140.008.010.041	159.765.041.054	182.310.057.370	208.036.481.568	237.393.253.490
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.549.582.000	6.549.582.000	6.549.582.000	6.549.582.000	6.549.582.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	37.064.863.000	108.293.665.561	108.293.665.561	108.293.665.561	108.293.665.561
4.3.01	Pendapatan Hibah	37.064.863.000	108.293.665.561	108.293.665.561	108.293.665.561	108.293.665.561
	BELANJA	2.187.091.604.000	2.240.053.268.638	2.353.423.673.803	2.477.186.741.151	2.612.585.478.701
5.1	BELANJA OPERASI	1.476.823.609.000	1.506.391.618.176	1.599.601.251.659	1.702.520.988.156	1.816.367.178.740
5.1.01	Belanja Pegawai	874.621.116.098	843.954.403.707	858.043.082.534	872.366.952.824	886.929.940.781
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	474.136.265.416	578.494.522.001	652.526.049.733	736.031.594.746	830.223.572.968
5.1.05	Belanja Hibah	114.072.747.486	75.000.000.000	80.000.000.000	85.000.000.000	90.000.000.000

5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	13.993.480.000	8.942.692.468	9.032.119.392	9.122.440.586	9.213.664.992
5.2	BELANJA MODAL	281.616.490.000	300.771.209.868	303.778.921.967	306.816.711.186	309.884.878.298
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.100.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.644.425.909	42.340.922.384	42.764.331.608	43.191.974.924	43.623.894.673
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	135.996.606.261	143.489.528.556	144.964.423.842	146.454.068.080	147.958.608.761
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	98.743.141.700	105.459.357.850	106.513.951.428	107.579.090.942	108.654.881.852
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.132.316.130	5.481.401.078	5.536.215.089	5.591.577.240	5.647.493.012
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	20.700.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
5.3.01	Belanja Tak Terduga	20.700.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	407.951.505.000	412.890.440.594	430.043.500.177	447.849.041.809	466.333.421.662
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.197.690.400	18.136.625.994	35.289.685.577	53.095.227.209	71.579.607.062
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	394.753.814.600	394.753.814.600	394.753.814.600	394.753.814.600	394.753.814.600
	PEMBIAYAAN					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	98.849.541.000	50.000.000.000	70.000.000.000	55.000.000.000	43.750.000.000
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	98.849.541.000	50.000.000.000	50.000.000.000	55.000.000.000	43.750.000.000

6.1.02	Pencairan dana cadangan	0	0	20.000.000.000	0	0
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.150.000.000	30.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
6.1.01	Pembentukan dana cadangan	0	20.000.000.000	0	0	0
6.1.02	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	16.150.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	82.699.541.000	20.000.000.000	60.000.000.000	45.000.000.000	33.750.000.000
6.2	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0	0	0	0	0

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Tahun terakhir RPD		
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	1		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	73,77%	73,80%	127.470	73,85%	135.430	73,90%	144.120	73,92%	153.630	73,92%	153.630	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	81%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	97%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	2%	2,07	-	2,08	-	2,09	-	3,01	-	3,01	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	2%	1,87	-	1,97	-	2,07	-	2,17	-	2,17	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2%	1,91	-	2,01	-	2,05	-	2,11	-	2,11	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	2%	1,91	-	2,01	-	2,05	-	2,11	-	2,11	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV	79%	81,99	-	82,01	-	82,03	-	82,05	-	82,05	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	2%	3,20	-	3,23	-	3,25	-	3,27	-	3,27	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	60%	0,70	-	0,75	-	0,80	-	0,85	-	0,85	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	82%	0,86	-	0,88	-	0,89	-	0,90	-	0,90	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	PKBM terakreditasi	75%	0,80	-	0,85	-	0,90	-	1,00	-	1,00	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Prosentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	10%	0,20	130	0,30	130	0,40	130	0,50	130	0,50	130	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Guru tersertifikasi	58%	0,62	23.490	0,64	24.670	0,67	25.960	0,70	27.370	0,70	27.370	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	01	04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	4%	0,06	-	0,08	-	0,09	-	0,10	-	0,10	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
1	2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				-		-		-		-		-	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria sarana, prasarana, Alat Kesehatan sesuai standar peraturan perundang undangan yang berlaku	0,7	8000,00%	71.790	42,8%	75.420	48,6%	79.380	57,1%	83.710	57,1%	83.710	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang mengalami peningkatan IKS	NA	11%		14%	0	17%	0	20%	0	20%	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	71 %	73 %	0	75 %	0	77 %	0	79 %	0	79 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Rumah Sakit terakreditasi Paripurna	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan obat esensial	93,9%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ketersediaan Bahan Medis Babis Pakai (BMHP) esensial	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi	10%	30%	0	50%	0	80%	0	100%	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Desa/kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	6,8 %	7%	0	8%	0	9%	0	10%	0		0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat Kesehatan	45 %	55 %	0	60 %	0	65 %	0	70 %	0	70 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kesehatan kerja baik sektor formal maupun informal yang dibina	91,4 %	93,5 %	0	96%	0	98,5%	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase kesehatan olahraga masyarakat yang dibina	90,3 %	92,5 %	0	95%	0	97,5 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	91,4%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	87,1%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	97,1%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	99,1 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	79,1	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	49,1%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)			Tahun terakhir RPD	
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		K	Rp (Juta)
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi Gizi Buruk	0,07 %	<1 %	0	<1 %	0	<1 %	0	<1 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	56,25	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	35,17 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	31%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	65,2%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	51,9%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	96,2%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) mendapatkan pelayanan sesuai standar	100%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase penderita Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML) mendapatkan pelayanan sesuai standar	94,3%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	75%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase anak sekolah SD atau sederajat yang mendapatkan vaksin Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)	98%	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Masyarakat mendapat Vaksinasi Covid-19	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Desa atau Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Kurang dari 24 Jam	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate (non polio) < 15 tahun	4 Kasus	4 Kasus	0	4 Kasus	0	5 Kasus	0	5 Kasus	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Bencana dan Krisis Kesehatan yang ditangani paska penerapan tanggap darurat sesuai standar	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase calon jemaah haji mendapat pelayanan kesehatan haji sesuai standar	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas	70%	85%	0	90%	0	95%	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	11,56 %	11%	0	10,5 %	0	10%	0	9,5 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase ibu hamil anemia	7,6 %	7,2 %	0	6,8 %	0	6,4 %	0	6%	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan		
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	BOR (Bed Occupancy Rate)/ Pemanfaatan tempat tidur rawat inap	42,92%	60%	21.750	62%	22.850	64%	24.050	65%	25.360	65%	25.360	RSUD Hj Anna Lasmanah
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	LOS (Average Length of Stay/Av LOS)/Rata-rata hari perawatan pasien	3,3 Hari	3 Hari		3 Hari		3 Hari		3 Hari		3 Hari	RSUD Hj Anna Lasmanah	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	TOI (Turn Over Interval)/Rata-rata tempat tidur tidak digunakan	5,8 hari	3 Hari		3 hari		3 Hari		3 Hari		3 Hari	RSUD Hj Anna Lasmanah	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	BTO (Bed Turn Over)/Frekuensi pemakaian tempat tidur	42%	50%		55%		57%		57%		57%	RSUD Hj Anna Lasmanah	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	GDR (Gross Death Rate)/Angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien	29,70%	25%		25%		25%		25%		25%	RSUD Hj Anna Lasmanah	
1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	NDR (Net Death Rate)/Angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien	11,20%	15%		15%		15%		15%		15%	RSUD Hj Anna Lasmanah	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase terpenuhinya puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	54,3 %	70 %	200	75 %	210	78 %	220	80 %	230	80 %	230	Dinas Kesehatan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan		Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
							Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)			Tahun terakhir RPD	
							K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		K	Rp (Juta)
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase puskesmas yang memiliki dokter	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	0 %	0	Dinas Kesehatan	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Rumah Sakit yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan	
1	02	03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	Dinas Kesehatan	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai standar	100 %	100 %	260	100 %	270	100 %	280	100 %	290	100 %	290	Dinas Kesehatan	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memperoleh Sertifikat Laik syarat kesehatan	35 %	40 %	0	45 %	0	50 %	0	55 %	0	55 %	0	Dinas Kesehatan	
1	02	04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT	0,96	1		1		1		1					
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri	24,8 %	30 %	610	40 %	640	50 %	670	60 %	700	60 %	700	Dinas Kesehatan	
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga strata utama- paripurna tingkat kabupaten	89,3 %	90 %	0	92 %	0	93 %	0	95 %	0	95 %	0	Dinas Kesehatan	
1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) institusi pendidikan	88,6 %	90 %	0	91 %	0	93 %	0	95 %	0	95 %	0	Dinas Kesehatan	
1	3		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					-	-	-	-	-	-	-	-		
1	03	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase luas area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	74%	76%	-	76%	-	78%	-	80%	-	80%	-	Dinas PUPR	
1	03	03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase penduduk berakses air minum	95,2%	98,3%	4.550	100,0%	4.780	100,0%	5.030	100,0%	5.300	100,0%	5.300	Dinas PUPR / Dinas PKPLH	
1	03	05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Kepala Keluarga Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah	65,2%	66,05%	3.640	66,89%	3.820	67,31%	4.020	68,15%	4.230	68,15%	4.230	Dinas PUPR / Dinas PKPLH	
1	03	06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase jalan yang memiliki sistem drainase yang memadai	3,36%	3,36%	-	3,36%	-	3,36%	-	3,36%		3,36%		Dinas PUPR	
1	03	08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung negara asset daerah yang memenuhi standar teknis	1,36%	4,76%	15.440	8,16%	10.960	11,56%	16.530	14,96%	17.160	14,96%	17.160	Dinas PUPR	
1	03	10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Prosentase panjang jalan dalam kondisi baik	81,23%	80%	152.650	80,25%	156.830	80,50%	161.390	80,75%	166.380	80,75%	166.380	Dinas PUPR	
1	03	11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	prosentase tersedianya penyedia jasa kontruksi yang bersertifikat	20%	40%	180	60%	180	80%	180	100%	180	100%	180	Dinas PUPR	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase kegiatan pemenuhan kebutuhan penataan ruang	5%	20%	2.040	40%	2.140	60%	2.250	80%	2.370	80%	2.370	Dinas PUPR	
1	03	12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Prosentase Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan ruang	NA	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas PUPR	
1	4		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					-	-	-	-	-	-	-	-		
1	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penanganan rumah korban bencana	100%	100%	4.550	100%	4.780	100%	5.030	100%	5.300	100%	5.300	Dinas PKPLH	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase cakupan ketersediaan rumah layak huni	80%	82%	13.050	84%	13.710	86%	14.430	88%	15.210	90%	15.210	Dinas PKPLH	
1	04	03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	53,10%	56,49%	-	59,89%	-	63,29%	-	66,68%	-	66,68%	-	Dinas PKPLH	
1	04	04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	0%	27,67%	3.640	55,35%	3.820	83,03%	4.020	100%	4.230	100%	4.230	Dinas PKPLH	
1	04	05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Lingkungan Aman dan Sehat yang didukung PSU	0%	10%	2.380	20%	2.500	30%	2.630	40%	2.770	40%	2.770	Dinas PKPLH	
1	04	06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Jumlah Dokumen Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi dan Registrasi Bidang perumahan dan Kawasan permukiman yang tersusun	NA	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas PKPLH	
1	5		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					-	-	-	-	-	-	-	-		
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan gangguan trantibum linmas	100%	100%	220	100%	230	100%	240	100%	250	100%	250	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat (satlinmas)	2,8%	3%	-	9%	-	13%	-	17%	-	17%	-	Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Cakupan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Satuan Polisi Pamong Praja	
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara kabupaten/kota	100%	100%		100%		100%		100%		100%		Satuan Polisi Pamong Praja	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)			Tahun terakhir RPD	
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		K	Rp (Juta)
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penanganan pelanggaran perda/perkada	100%	100%		100%		10000%		100%		100%		Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase PPNS yang Aktif	28,5714286	35,71%		42,85%		50%		57%		57%		Satuan Polisi Pamong Praja
	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.	27%	35%	2.450	42%	2.570	49%	2.700	56%	2.840	56%	2.840	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase warga negara yang mendapatkan layanan kedaruratan bencana.	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	05	03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase warga negara yang mendapatkan layanan pasca bencana.	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	100%	3.480	100%	3.650	100%	3.840	100%	4.040	100%	4.040	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Persentase Cakupan Pelayanan Peyelamatan Non Kebakaran	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Persentase Kecamatan Memiliki Pos Damkar	15%	25%	-	25%	-	30%	-	30%	-	30%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1	05	04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON	Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) di desa/kelurahan	0%	21,58%	-	47,48%	-	73,38%	-	100%	-	100%	-	Satuan Polisi Pamong Praja
1	6		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				-		-		-		-		-	
1	06	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	12,65%	13,65%	1.500	14,17%	1.420	14,68%	1.490	15,19%	1.570	15,19%	1.570	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100 %	100 %	1.500	100 %	1.570	100 %	1.650	100 %	1.740	100 %	1.740	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	72,83%	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	26,35%	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	10,96%	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	05	PROGRAM PERLUNDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase keluarga miskin dan rentan yang diintervensi dengan program bantuan sosial	52,26%	53%	590	53,50%	610	54,00%	640	54,50%	670	54,50%	670	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	100 %	100 %	910	100 %	950	100 %	990	100 %	1.040	100 %	1.040	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
1	06	07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase taman makan pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik	100 %	100 %	220	100 %	230	100 %	240	100 %	250	100 %	250	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-		-		-		-		-	
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				-		-		-		-		-	
2	07	02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	72,62%	65.04%	30	65.04%	30	65.04%	30	65.04%	30	65.04%	30	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	6,10%	7,6%	130	7,6%	130	7,6%	130	7,6%	130	7,6%	130	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	6,10%	30%	-	7,6%	-	7,6%	-	7,6%	-	7,6%	-	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	6,10%	30%	-	7,6%	-	7,6%	-	7,6%	-	7,6%	-	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	29,23%	29,25%	500	29,30%	520	29,75%	540	30,00%	540	30,00%	540	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	07	05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan BPJS Ketenagakerjaan)	58,82%	63,12%	180	67%	180	72%	180	76%	180	76%	180	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLUNDUNGAN ANAK				-		-		-		-		-	
2	08	02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Anggaran responsif gender dalam APBD	1,32%	1,34%	130	1,37%	130	1,38%	130	1,39%	130	1,39%	130	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	03	PROGRAM PERLUNDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	40	100 %	40	100 %	40	100 %	40	100 %	40	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kelompok Perempuan Rentan yang Terbentuk	23,74%	27,34%	90	30,94%	90	34,53%	90	38,13%	90	38,13%	90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB	0%	7,91%	-	16,91%	-	30,94%	-	50,00%	-	50,00%	-	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan			Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Tahun terakhir RPD		
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
2	08	05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah	100 %	100 %	40	100 %	40	100 %	40	100 %	40	100 %	40	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	19,78%	26,98%	130	28,42%	130	29,86%	130	31,29	130	31,29%	130	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	08	07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100 %	100 %	90	100 %	90	100 %	90	100 %	90	100 %	90	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	09		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				-		-		-		-		-	
2	09	02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Prosentase Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	100%	100%	2.000	100%	2.100	100%	2.210	100%	2.330	100%	2.330	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
2	09	03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Prosentase tercukupinya kebutuhan pangan daerah	81%	81%	1.000	85%	1.050	90%	1.100	93%	1.160	2%	1.160	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
2	09	04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Prosentase penanganan kkerawanan pangan	100%	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	100%	150	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
2	09	05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	prosentase pelaksanaan pengawasan keamanan pangan	100%	100%	140	100%	140	100%	140	100%	140	100%	140	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan
2	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				-		-		-		-		-	
2	10	10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas tanah pemkab yang bersertifikat	65,88%	100 %	10	100 %	10	100 %	10	100 %	10	100 %	10	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
2	11		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				-		-		-		-		-	
2	11	02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen lingkungan hidup yang tersusun	50%	100%	260	100%	270	100%	280	100%	290	100%	290	Dinas PKPLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,25	70,25	90	70,5	90	70,75	90	71	90	71	90	Dinas PKPLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Luasan RTH yang Tertangani	17,20%	18%	450	18,50%	470	19%	490	19,50%	510	19,50%	510	Dinas PKPLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	100%	100%	70	100%	70	100%	70	100%	70	100%	70	Dinas PKPLH
2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup	40%	50%	400	60%	420	70%	440	80%	460	80%	460	Dinas PKPLH
2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat/ lembaga sasaran yang mendapatkan sosialisasi/ pembinaan untuk penghargaan lingkungan hidup	47,40%	50%	110	75%	110	90%	110	100%	110	100%	110	Dinas PKPLH
2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase jumlah aduan yang ditangani	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas PKPLH
2	11	11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani	33%	33,25%	1.820	33,50%	1.910	33,75%	2.010	34%	2.110	34%	2.110	Dinas PKPLH
2	12		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				-		-		-		-		-	
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)*	96,47%	99,3%	1.840	99,3%	1.930	99,3%	2.030	99,3%	2.140	99,3%	2.140	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)*	40,47%	41%	-	42%	-	43%	-	44%	-	44%	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan penerbitan akta kelahiran*	93,01%	97%	370	97%	380	97%	390	97%	410	97%	410	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Prosentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	100%	100%	130	100%	130	100%	130	100%	130	100%	130	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	12	05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Prosentase data kependudukan yang ditampilkan dalam profil kependudukan	100%	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				-		-		-		-		-	
2	13	02	PROGRAM PENATAAN DESA	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	28 %	30 %	130	32 %	130	34 %	130	36 %	130	36 %	130	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	3 %	4 %	90	5 %	90	6 %	90	7 %	90	7 %	90	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase pengentasan desa tertinggal	10 %	20 %	4.240	30 %	4.450	40 %	4.680	50 %	4.930	50 %	4.930	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	13	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa aktif	20 %	30 %	500	30 %	520	40 %	540	50 %	560	50 %	560	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				-		-		-		-		-	
2	14	02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Indek Penurunan angka kelahiran total (TFR)	2,2 Angka	2,3 Angka	70	2,4 Angka	70	2,5 Angka	70	2,6 Angka	70	2,6 Angka	70	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Indek Penurunan angka kelahiran total (TFR)	2,2 Angka	2,3 Angka	250	2,4 Angka	260	2,5 Angka	270	2,6 Angka	280	2,6 Angka	280	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase Penurunann Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-19 tahun (<20 tahun)	2,85 %	2,87 %	150	2,89 %	150	2,91 %	150	2,93 %	150	2,93 %	150	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Tahun terakhir RPD		
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			-	-	-	-	-	-	-	-			
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE PEMENUHAN SARPRAS JALAN DI JALAN KABUPATEN	30%	33%	5.450	34%	5.720	35%	6.020	36%	6.340	37%	6.340	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE CAKUPAN PELAYANAN PERPARKIRAN	73%	75%	-	76%	-	77%	-	78%	-	79%	-	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE PERTUMBUHAN JALUR TRAYEK	2,17%	2,17%	-	2,17%	-	2,17%	-	2,17%	-	2%	-	Dinas Perhubungan
2	15	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	PERSENTASE KALAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR	79%	80%	-	81%	-	82%	-	83%	-	84%	-	Dinas Perhubungan
2	16		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	16	02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	8,5 %	25 %	1.770	50 %	1.850	75 %	1.940	100 %	2.040	100 %	2.040	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan secara online dan terintegrasi	8,5 %	25 %	2.450	50 %	2.570	75 %	2.700	100 %	2.840	100 %	2.840	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	30 %	45 %	2.430	60 %	2.550	75 %	2.680	100 %	2.820	100 %	2.820	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	17		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	17	03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Prosentase Koperasi Aktif	47,00%	47,00%	60	47,50%	60	48,00%	60	48,50%	60	48,50%	60	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Koperasi yang bisa menilai kesehatannya	13,96%	15,00%	50	15,50%	50	16,00%	50	16,50%	50	16,50%	50	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Prosentase jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	7,12%	8,00%	60	8,50%	60	9,00%	60	9,50%	60	9,50%	60	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Prosentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	7,12%	800,00%	60	800,00%	60	800,00%	60	800,00%	60	800,00%	60	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	89,29%	89,48%	300	89,57%	310	89,66%	320	89,74%	330	89,74%	330	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Presentase Usaha Mikro dan Kecil	99,18%	99,19%	200	99,20%	210	99,21%	220	99,22%	230	99,22%	230	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	18		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	1,24%	1,05%	50	1,10%	50	1,15%	50	1,20%	50	1,20%	50	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1,24%	1,05%	-	1,10%	-	1,15%	-	1,20%	-	1,20%	-	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase kenaikan/penurunan PMDN	3,46%	2%	130	2,50%	130	3%	130	3,50%	130	3,50%	130	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase pelayanan perizinan yang diselesaikan	100%	100%	1.200	100%	1.260	100%	1.320	100%	1.390	100%	1.390	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase kegiatan usaha/ pelaku usaha yang dilakukan pengawasan/ pembinaan	65%	75%	80	80%	80	85%	80	90%	80	90%	80	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	19		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	19	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase wirausaha muda	30%	35%	450	38%	470	40%	490	42%	510	42%	510	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan olahraga	27%	30%	5.460	32%	5.730	34%	6.030	36%	6.350	36%	6.350	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Cakupan pembinaan atlet muda	28%	30%	-	32%	-	34%	-	36%	-	36%	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase jumlah kejuaraan yang meraih medali tingkat provinsi	15%	20%	-	23%	-	25%	-	28%	-	28%	-	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	19	04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah	20%	30%	80	40%	80	50%	80	60%	80	60%	80	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga
2	20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	20	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	100%	100%	70	100%	70	100%	70	100%	70	100%	70	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	21	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat keamanan informasi pemerintah	100 %	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	150	100 %	150	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	22		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	22	02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Prosentase kelompok seni yang melakukan registrasi	12,0%	15,0%	270	15,0%	280	15,0%	290	15,0%	300	15,0%	300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Tahun terakhir RPD		
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Prosentase Fasilitas Event Seni dan Budaya yang dilaksanakan	10,0%	10,0%	500	520	10,0%	540	10,0%	560	10,0%	560	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
2	22	05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Prosentase benda cagar budaya dipelihara	47,95%	50,0%	270	280	70,0%	290	80,0%	300	80,0%	300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	23		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	11,11%	3,17%	480	500	4,07%	520	4,27%	540	4,27%	540	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	23	02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Ketercukupan koleksi perpustakaan daerah	7,00%	7,29%	-	7,41%	-	7,54%	-	7,72%	-	7,72%	-	
			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan	3,80%	4,28%	-	4,99%	-	5,71%	-	6,41%	-	6,42%	-	
2	24		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2	24	02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Tata kelola kearsipan yang baik	100 %	100 %	370	380	100 %	390	100 %	410	100 %	410	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Ketersediaan arsip yang autentik, utuh, aman, dan terpercaya di lingkup daerah	4.55%	6,82%	70	70	6,82%	70	6,82%	70	6,82%	70	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2	24	04	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Pemanfaatan arsip tertutup yang hanya bisa diakses untuk kepentingan tertentu	0	100 %	70	70	100 %	70	100 %	70	100 %	70	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	25		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	prosentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya	100%	100%	1.000	1.010	100%	1.100	100%	1.200	100%	1.200	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	
3	25	04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Prosentase produksi perikanan tangkap	100%	100%	820	900	100%	910	100%	910	100%	910	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	
3	25	05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Prosentase Jumlah produksi ikan yang ditangkap	100%	100%	220	230	100%	240	100%	250	100%	250	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	220	230	100%	240	100%	250	100%	250	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	
3	25	06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Prosentase Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	220	230	100%	240	100%	250	100%	250	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	
3	26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Persentase Ketersediaan data koleksi museum	20%	20%	20	20	20%	20	20%	20	20%	20	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Prosentase pembangunan obyek wisata	17%	20%	1.500	1.570	20%	1.650	20%	1.740	20%	1.740	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase Peningkatan kunjungan wisata	14%	14%	1.300	1.360	14%	1.430	14%	1.500	14%	1.500	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Prosentase peningkatan lama tinggal	0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	27	04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Prosentase kegiatan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang terlaksana	NA	100%	1.500	1.570	100%	1.650	100%	1.740	100%	1.740	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	26	5	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Prosentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata	5%	10%	1.500	1.570	10%	1.650	10%	1.740	10%	1.740	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
3	27		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	27	02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Prosentase Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	98%	98%	3.030	3.340	98,50%	3.340	99%	3.520	99,50%	3.520	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	
3	27	03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Prosentase Penggunaan prasarana Pendukung Pertanian	93%	93%	12.000	12.100	94%	12.210	94,50%	12.330	95%	12.330	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	
3	27	04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	prosentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	92%	92%	260	270	93%	280	93,50%	290	94%	290	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	
						-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	27	05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULAN BENCANA PERTANIAN	Prosentase pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	90%	90%	400	420	92%	440	92,50%	460	93,00%	460	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	
3	27	07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kegiatan Penyuluhan Pertanian yang Terlaksana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan	
3	30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Prosentase Pasar dalam kondisi Baik	8%	12%	2.055	2.155	20%	2.265	24%	2.385	24%	2.385	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	30	03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase jumlah Pedagang kaki lima yang terbina	100%	100%	-	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	30	04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia	100%	100%	60	60	100%	60	100%	60	100%	60	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	30	05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Meningkatnya pelaksanaan pengembangan dan pelatihan ekspor dan import	15 UMKM	20 UMKM	50	50	30 UMKM%	50	40 UMKM	50	40 UMKM	50	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
3	30	06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	86,33	88%	90	90	92%	90	94%	90	96%	90	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Perangkat Daerah Penanggungjawab
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)		Tahun terakhir RPD		
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya pelaksanaan kebijakan dan kegiatan promosi untuk UMKM	1 kali	2 kali	300	3 kali	310	4 kali	320	5 kali	330	5 kali	330	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	30	07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Meningkatnya jaringan pemasaran pelaku usaha perdagangan	NA	50%	-	60%	-	70%	-	80%	-	90%	-	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				-		-		-		-		-	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Prosentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi	2,24	3,13%	220	0,81%	230	3,94%	240	4,40%	250	4,40%	250	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHAINDUSTRI KABUPATEN / KOTA	Prosentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi	0,13%	0,15%	-	0,20%	-	0.53%	-	0.66%	-	0.66%	-	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	31	04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah sistem informasi industri menengah	100%	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	100%	20	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
3	32		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				-		-		-		-		-	
3	32	03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase transmigran pendaftar yang diberangkatkan	95 Nilai	95 Nilai	200	95 Nilai	210	95 Nilai	220	95 Nilai	230	95 Nilai	230	Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4			UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				-		-		-		-		-	
4	1		SEKRETARIAT DAERAH				-		-		-		-		-	
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Prosentase Peningkatan nilai evaluasi kelembagaan pelayanan publik dan kinerja	100%	100%	21.000	100%	22.060	100%	23.220	100%	24.480	100%	24.480	Sekretariat Daerah
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Sekretariat Daerah
4	01	02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase pelaksanaan koordinasi, Fasilitasi dan movev bidang pemerintahan dan kesra	100%	100	3.620	100%	3.800	100%	3.990	100%	4.200	100%	4.200	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan movev bidang perekonomian	100%	100%	1.270	100%	1.330	100%	1.390	100%	1.460	100%	1.460	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase pelaksanaan koordinasi fasilitasi penyusunan pengendalian dan movev program pembangunan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Sekretariat Daerah
4	01	03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase kegiatan barang jasa melalui proses lelang secara elektronik	90%	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	Sekretariat Daerah
4	2		SEKRETARIAT DPRD													
4	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase capaian kinerja kegiatan Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten	97%	100 %	24.360	100 %	25.590	100 %	26.930	100 %	28.400	0 %	28.400	Sekretariat Dewan
4	02	02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase tersusun dan terintegrasinya Program-Program Kerja DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran dalam Dokumen Rencana Lima Tahunan (RPJM) maupun Dokumen Rencana Tahunan (RKPD)	94%	100%	13.050	100%	13.710	100%	14.430	100%	15.210	0 Ada/Tidak	15.210	Sekretariat Dewan
5			UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				-		-		-		-		-	
5	1		PERENCANAAN				-		-		-		-		-	
5	01	02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD/RPJMD/RKPD yang telah ditetapkan	100%	100%	1.010	100%	1.020	100%	1.030	100%	1.040	100%	1.040	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5	01	03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	>90 %	>90 %	1.210	>90 %	1.250	>90 %	1.290	>90 %	1.340	>90 %	1.340	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD	>90 %	>90 %		>90 %		>90 %		>90 %		>90 %		
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD	>90 %	>90 %		>90 %		>90 %		>90 %		>90 %		
				Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD	>90 %	>90 %		>90 %		>90 %		>90 %		>90 %		
5	2		KEUANGAN				-		-		-		-		-	
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	"- Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu "- Persentase serapan dana transfer daerah "- Persentase Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu "- Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	100 %	100 %	373.660	100 %	392.620	100 %	413.310	100 %	435.950	100 %	435.950	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kesuaian Program dalam APBD dg yang ada di RKPD	>90 %	>90 %	-	>90 %	-	>90 %	-	>90 %	-	>90 %	-	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah

Kode			Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal Tahun 2021	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat Daerah Penanggungjawab		
						Tahun-1 (2023)		Tahun-2 (2024)		Tahun-3 (2025)		Tahun-4 (2026)			Tahun terakhir RPD	
						K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)	K	Rp (Juta)		K	Rp (Juta)
5	02	03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu dan Persentase Luas Tanah Pemkab yang bersertifikat	100 %	100 %	2.070	100 %	2.170	100 %	2.280	100 %	2.400	100 %	2.400	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
5	02	04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah	14%	5%	2.940	5%	3.080	5%	3.240	5%	3.410	5%	3.410	Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
5	3		KEPEGAWAIAN				-		-		-		-		-	
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	68,02%	72%	1.250	76%	1.310	80%	1.370	84%	1.440	84%	1.440	Badan Kepegawaian
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	79,2%	82%	-	84%	-	86%	-	88%	-	88%	-	Badan Kepegawaian
5	03	02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi definitif	72,95%	76%	-	81%	-	85%	-	89%	-	89%	-	Badan Kepegawaian
5	4		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				-		-		-		-		-	
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	37,52%	40 %	3.220	50 %	3.380	60 %	3.550	70 %	3.740	70 %	3.740	Badan Kepegawaian
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	47,30%	50 %	-	60 %	-	70 %	-	80 %	-	80 %	-	Badan Kepegawaian
5	04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	10 Jam	10 Jam	-	10 Jam	-	10 Jam	-	10 Jam	-	10 Jam	-	Badan Kepegawaian
5	5		PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-		-		-		-		-	
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	20 %	25 %	450	30 %	470	35 %	490	40 %	510	40 %	510	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
5	05	02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.	20 %	25 %	310	30 %	320	35 %	330	40 %	340	40 %	340	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				-		-		-		-		-	
6	1		INSPEKTORAT DAERAH				-		-		-		-		-	
6	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Pensentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemerinksaan Internal dan Eksternal	88%	90%	300	91%	310	91%	320	92%	330	92%	330	Inspektorat
6	01	03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	2 level	3 level	200	3 level	210	3 level	220	3 level	230	3 level	230	Inspektorat
7			UNSUR KEWILAYAHAN				-		-		-		-		-	
7	1		KECAMATAN				-		-		-		-		-	
7	01	02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	100 %	100 %	1.820	100 %	1.910	100 %	2.010	100 %	2.110	100 %	2.110	Kecamatan
7	01	03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	100 %	100 %	8.230	100 %	8.640	100 %	9.090	100 %	9.580	100 %	9.580	Kecamatan
7	01	04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	100 %	100 %	1.730	100 %	1.810	100 %	1.900	100 %	2.000	100 %	2.000	Kecamatan
7	01	05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100 %	100 %	200	100 %	210	100 %	220	100 %	230	100 %	230	Kecamatan
7	01	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	1.170	100 %	1.220	100 %	1.280	100 %	1.340	100 %	1.340	Kecamatan
8			UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				-		-		-		-		-	
8	1		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				-		-		-		-		-	
8	01		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase ormas yang terdaftar dikesbangpol yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/ideologi pancasila	NA	25%		25%		25%		25%		25%		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	02	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Ormas (yang terdaftar dikesbang) yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila	NA	25%	50	25%	50	25%	50	25%	50	25%	50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	NA	25%	1.530	25%	1.600	25%	1.680	25%	1.770	25%	1.770	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan keberadaan ormas	20%	25%	12.180	50%	12.790	75%	13.460	100%	14.190	100%	14.190	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase orang yang mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	15%	25%	130	25%	130	25%	130	25%	130	25%	130	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	01	06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFIK SOSIAL	Persentase penanganan konflik	NA	25%	430	25%	450	25%	470	25%	490	25%	490	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
X							-		-		-		-		-	
X	XX						-		-		-		-		-	
X	XX	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	100 %	100 %	1.240.678	100 %	1.311.618	100 %	1.378.951	100 %	1.458.020	100 %	1.458.020	Semua OPD, termasuk gaji dan tunjangan

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAH DAERAH

Indikator adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Keberhasilan indikator tersebut, ditunjukkan dengan pencapaian target indikator pembangunan daerah setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPD dapat tercapai, diperlukan oleh masyarakat dalam rangka perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdapat 2 (dua) jenis indikator dalam RPJMD yaitu Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) bertujuan untuk memberi gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran daerah. Secara lengkap penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat dilihat pada Tabel 8.1. sebagai berikut:

Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Banjarnegara

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
A.	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Angka	73,20	73,70	74,20	74,70	75,20
2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,86	<5	<4,75	<4,5	<4,5
3	Indeks Gini	Angka	0,36	0,36	0,36	0,35	0,35
4	Indeks Ketimpangan Williamson	Angka	0,43	0,42	0,40	0,38	0,35
5	Laju Inflasi	%	2,18	3±1	3±1	3±1	3±1
6	Nilai SAKIP	Huruf	B	B	B	B	B
7	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Survey Kepuasan Masyarakat	Angka	83,56	84,34	85,00	85,34	86,00

NO	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL (2021)	TARGET TAHUN			
				2023	2024	2025	2026
9	Menurunnya Angka Kematian Neonatal	Per 1000 KH	9,45	8,5	8	7,5	7
10	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,28	74,48	74,68	74,88	75,08
11	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	287	210	190	170	150
12	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH	12,9	12,5	12,3	12,1	11,9
13	Prevalensi Stunting	%	22,7	19	18	17	16
14	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	11,63	11,65	11,66	11,67	11,69
15	Angka Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	6,75	6,80	6,85	6,90	7,01
16	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	%	80	82	84	86	88
17	Persentase penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial/ Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	%	-7,75	0,2	0,2	0,2	0,2
B.	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
18	Indeks kebudayaan	Angka	63,49	65	67	69	71
19	Persentase peningkatan nilai investasi	%	-66,44	1	1,5	2,5	4
20	Indeks Daya Saing Daerah	Angka	2,99	3,00	3,10	3,20	3,30
21	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	62,36	67,5	68,5	68,75	69
22	Indeks Kemahalan Konstruksi	Angka	93,14	92,50	92	91,50	91,00
C.	ASPEK PELAYANAN UMUM						
	LAYANAN URUSAN WAJIB DASAR						
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
23	Persentase penanganan konflik sosial	%	100	100	100	100	100
24	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	38,97	40	42	42	44
25	Persentase penggunaan hak pilih						
	- Pilkades	%	80,33	-	80,50	80,65	-
	- Pilgub	%	-	-	75	-	-
	- Pilbup	%	-	-	75	-	-
	- Pileg	%	-	-	75	-	-
	- Pilpres	%	-	-	75	-	-

Sedang dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja layanan umum diukur dengan indikator kinerja daerah pada tabel 8.2. sebagai berikut:

Tabel 8.2. Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kabupaten Banjarnegara

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	ASPEK PELAYANAN UMUM								
1	LAYANAN URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1.01	PENDIDIKAN								
1	Sekolah SD/MI kondisi bangunan baik	%	60	70	75	80	85	85	Dindikpora
2	Sekolah SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	82	86	88	89	90	90	Dindikpora
3	PKBM terakreditasi	%	75	80	85	90	100	100	Dindikpora
4	Persentase pemenuhan kebutuhan pengembangan kurikulum muatan lokal	%	10	20	30	40	50	50	Dindikpora
5	Guru tersertifikasi	%	58	62	64	67	70	70	Dindikpora
6	Ratio Guru/murid sekolah pendidikan dasar	%	4	6	8	9	10	10	Dindikpora
7	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	81,45	100	100	100	100	100	Dindikpora
8	Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	97,15	100	100	100	100	100	Dindikpora
9	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	1,87	2,07	2,08	2,09	3,01	3,01	Dindikpora
10	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	%	1,67	1,87	1,97	2,07	2,17	2,17	Dindikpora
11	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional	%	1,71	1,91	2,01	2,05	2,11	2,11	Dindikpora

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
12	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional	%	1,71	1,91	2,01	2,05	2,11	2,11	Dindikpora
13	Peningkatan Proporsi Jumlah Satuan PAUD yang Mendapatkan Minimal Akreditasi B	%	73,77	73,83	73,85	73,90	73,92	73,92	Dindikpora
14	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/DIV	%	79,38	81,99	82,01	82,03	82,05	82,05	Dindikpora
15	Rasio Pengawas dan Penilik PAUD	%	1,53	3,20	3,23	3,25	3,27	3,27	Dindikpora
1.02	KESEHATAN								
1	Persentase puskesmas yang memenuhi kriteria sarana, prasarana, Alat Kesehatan sesuai standar peraturan perundang undangan yang berlaku	%	70	80	85	90	100	100	Dinkes
2	Persentase Puskesmas yang mengalami peningkatan IKS	%	30	11	14	17	20	20	Dinkes
3	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Terakreditasi	%	71	73	75	77	79	79	Dinkes
4	Persentase Rumah Sakit terakreditasi Paripurna	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
5	Persentase ketersediaan obat esensial	%	93,9	100	100	100	100	100	Dinkes
6	Persentase ketersediaan Bahan Medis Babis Pakai (BMHP) esensial	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
7	Persentase alat kesehatan yang terkalibrasi	%	10	30	50	80	100	100	Dinkes
8	Persentase Desa/kelurahan	%	6,8	7	8	9	10	10	Dinkes

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)								
9	Persentase Tempat Fasilitas Umum (TFU) yang memenuhi syarat Kesehatan	%	45	55	60	65	70	70	Dinkes
10	Persentase kesehatan kerja baik sektor formal maupun informal yang dibina	%	91,4	93,5	96	98,5	100	100	Dinkes
11	Persentase kelompok olahraga masyarakat yang dibina	%	90,3	92,5	95	97,5	100	100	Dinkes
12	Persentase puskesmas mampu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	%	91,4	100	100	100	100	100	Dinkes
13	Persentase ibu hamil yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	87,1	100	100	100	100	100	Dinkes
14	Persentase Ibu bersalin yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	97,1	100	100	100	100	100	Dinkes
15	Persentase bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	99,1	100	100	100	100	100	Dinkes
16	Persentase balita yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	79,1	100	100	100	100	100	Dinkes
17	Persentase lansia yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	49,1	100	100	100	100	100	Dinkes
18	Prevalensi Gizi Buruk	%	0,07	<1	<1	<1	<1	<1	Dinkes
19	Persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	56,25	100	100	100	100	100	Dinkes
20	Persentase penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan	%	35,17	100	100	100	100	100	Dinkes

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	kesehatan sesuai standar								
21	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
22	Persentase orang usia 15 - 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)	%	31	100	100	100	100	100	Dinkes
23	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	65,2	100	100	100	100	100	Dinkes
24	Persentase orang terduga TB mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	51,9	100	100	100	100	100	Dinkes
25	Persentase orang yang resiko tertular HIV mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)	%	96,2	100	100	100	100	100	Dinkes
26	Persentase penderita Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik (P2PTVZ) mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
27	Persentase penderita Pencegahan Penyakit Menular Langsung (P2ML) mendapatkan pelayanan sesuai standar	%	94,3	100	100	100	100	100	Dinkes
28	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	75	100	100	100	100	100	Dinkes
29	Persentase anak sekolah SD atau sederajat yang mendapatkan vaksin Bulan	%	98	100	100	100	100	100	Dinkes

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	Imunisasi Anak Sekolah (BIAS)								
30	Cakupan Desa atau Kelurahan mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi Kurang dari 24 Jam	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
31	Acute Flaccid Paralysis (AFP) Rate (non polio) < 15 tahun	Kasus	4	4	4	4	5	5	Dinkes
32	Persentase Bencana dan Krisis Kesehatan yang ditangani paska penerapan tanggap darurat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
33	Persentase calon jemaah haji mendapat pelayanan Kesehatan haji sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
34	Persentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas	%	70	85	90	95	100	100	Dinkes
35	Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK)	%	11,56	11	10,5	10	9,5	9,5	Dinkes
36	Persentase ibu hamil anemia	%	7,6	7,2	6,8	6,4	6	6	Dinkes
37	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Dasar	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
38	Cakupan Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
39	BOR (Bed Occupancy Rate)/ Pemanfaatan tempat tidur rawat inap	%	42,92	60	62	64	65	65	RSUD Hj. Anna Lasmanah
40	LOS (Average Length of Stay/Av LOS)/Rata-rata hari perawatan pasien	Hari	3,3	3	3	3	3	3	RSUD Hj. Anna Lasmanah
41	TOI (Turn Over Interval)/Rata-	Hari	5,8	3	3	3	3	3	RSUD Hj. Anna

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	rata tempat tidur tidak digunakan								Lasmanah
42	BTO (Bed Turn Over)/Frekuensi pemakaian tempat tidur	Kali	42	50	55	57	57	57	RSUD Hj. Anna Lasmanah
43	GDR (Gross Death Rate)/Angka kematian untuk tiap-tiap 1000 pasien	‰	29,7	25	25	25	25	25	RSUD Hj. Anna Lasmanah
44	NDR (Net Death Rate)/Angka kematian setelah perawatan 48 jam per 1000 pasien	‰	11,2	15	15	15	15	15	RSUD Hj. Anna Lasmanah
45	Persentase terpenuhinya puskesmas dengan 9 (sembilan) jenis tenaga kesehatan sesuai standar	%	54,3	65	70	75	80	80	Dinkes
46	Persentase puskesmas yang memiliki dokter	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
47	Persentase Rumah Sakit yang memiliki dokter spesialis dasar dan spesialis lainnya	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
48	Persentase SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
49	Persentase sarana pelayanan kefarmasian yang melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	Dinkes
50	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memperoleh Sertifikat Laik syarat Kesehatan	%	35	40	45	50	55	55	Dinkes
51	Persentase Industri Pangan Rumah Tangga yang mendapat rekomendasi izin edar PIRT	%	96	100	100	100	100	100	Dinkes
52	Persentase desa/ kelurahan siaga aktif strata mandiri	%	24,8	30	40	50	60	60	Dinkes

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
53	Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) rumah tangga strata utama-paripurna tingkat kabupaten	%	89,3	90	92	93	95	95	Dinkes
54	Persentase capaian Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) institusi Pendidikan	%	88,6	90	91	93	95	95	Dinkes
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
1	Persentase luas area sawah yang teraliri jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	74	76	76	78	80	80	DPUPR
2	Persentase jalan yang memiliki sistem drainase yang memadai	%	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	3,36	DPUPR
3	Persentase bangunan gedung negara asset daerah yang memenuhi standar teknis	%	1,36	4,76	8,16	11,56	14,96	14,96	DPUPR
4	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik dan berkualitas	%	81,23	80	80,25	80,50	80,75	80,75	DPUPR
5	Persentase kegiatan pemenuhan kebutuhan penataan ruang	%	5	20	40	60	80	80	DPUPR
6	Persentase tersedianya penyedia jasa kontruksi yang bersertifikat	%	20	40	60	80	100	100	DPUPR
7	Persentase penduduk berakses air minum	%	95,22	98,30	100	100	100	100	DPKPLH
8	Persentase Kepala Keluarga Terlayani Pengelolaan Sistem Air Limbah	%	65,24	66,05	66,89	67,31	68,15	68,15	DPKPLH
1.04	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
1	Persentase penanganan rumah korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	DPKPLH
2	Persentase cakupan	%	80	82	84	86	88	88	DPKPLH

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	ketersediaan rumah layak huni								
3	Persentase penanganan kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	%	0	27,67	55,35	83,03	100	100	DPKPLH
4	Persentase Perbaikan rumah tidak layak huni di luar kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha	%	53,1	56,49	59,89	63,29	66,68	66,68	DPKPLH
5	Persentase Lingkungan Aman dan Sehat yang didukung PSU	%	0	10	20	30	40	40	DPKPLH
1.05	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	Persentase penanganan gangguan trantibum linmas	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
2	Cakupan pemberdayaan perlindungan masyarakat (satlinmas)	%	2,78	3,18	9,47	13,44	17,41	17,41	Satpol PP
3	Cakupan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
4	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
5	Persentase penanganan pelanggaran perda/perkada	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
6	Persentase PPNS yang Aktif	%	28,57	35,71	42,86	50	57,14	57,14	Satpol PP
7	Presentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,27	0,34	0,41	0,48	0,56	0,56	BPBD
8	Presentase warga negara yang mendapatkan layanan kedaruratan bencana	%	100	100	100	100	100	100	BPBD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
9	Presentase warga negara yang mendapatkan layanan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	BPBD
10	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
11	Persentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	Satpol PP
12	Persentase Kecamatan Memiliki Pos Damkar	%	15	25	25	30	30	30	Satpol PP
13	Persentase terbentuknya relawan pemadam kebakaran (Redkar) di desa/kelurahan	%	0	21,58	47,48	73,38	100	100	Satpol PP
1.06	SOSIAL								
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan pembinaan dan fasilitasi guna peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial	%	12,65	13,65	14,17	14,68	15,19	15,19	Dinsos PPPA
2	Persentase rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA
3	Persentase rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	%	72,83	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA
4	Persentase rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	%	26,35	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA
5	Persentase rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	%	10,96	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA
6	Persentase keluarga miskin dan	%	52,26	53	53,50	54,00	54,50	54,50	Dinsos PPPA

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	rentan yang diintervensi dengan program bantuan sosial								
7	Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA
8	Persentase taman makan pahlawan dan monumen yang terpelihara dengan baik	%	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA
2	LAYANAN URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2.01	TENAGA KERJA								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada rencana tenaga kerja	%	72,62	65,04	65,04	65,04	65,04	65,04	Disnaker PMPTSP
2	Persentase tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	6,1	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	Disnaker PMPTSP
3	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%	29,23	29,25	29,30	29,75	30,00	30,00	Disnaker PMPTSP
4	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan BPJS Ketenagakerjaan)	%	58,82	63,12	67	72	76	76	Disnaker PMPTSP
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
1	Persentase Anggaran responsif gender dalam APBD	%	1,32	1,34	1,37	1,38	1,39	1,39	Dinsos PPPA
2	Cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit	%	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	pelayanan terpadu								
3	Persentase Kelompok Perempuan Rentan yang Terbentuk	%	23,74	27,34	30,94	34,53	38,13	38,13	Dinsos PPPA
4	Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan peningkatan kapasitas GSIB	%	0	7,91	16,91	30,94	50,00	50,00	Dinsos PPPA
5	Persentase ketersediaan data berbasis gender di perangkat daerah	%	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA
6	Persentase Desa dan Kelurahan Layak Anak	%	19,78	26,98	28,42	29,86	31,29	31,29	Dinsos PPPA
7	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%	100	100	100	100	100	100	Dinsos PPPA
2.03	PANGAN								
1	Persentase infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	Dintankan KP
2	Persentase tercukupinya kebutuhan pangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	Dintankan KP
3	Persentase penanganan kerawanan pangan	%	100	100	100	100	100	100	Dintankan KP
4	Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan	%	100	85	85	85	85	85	Dintankan KP
2.04	PERTANAHAN								
1	Persentase luas tanah pemkab yang bersertifikat	%	65,88	100	100	100	100	100	BPPKAD
2.05	LINGKUNGAN HIDUP								
1	Persentase dokumen lingkungan	%	50	100	100	100	100	100	DPKPLH

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	hidup yang tersusun								
2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Angka	88,62	82,9	82,9	82,9	82,9	82,9	DPKPLH
3	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	47,50	56,9	58,53	58,75	58,85	58,85	DPKPLH
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	Angka	39,30	65,2	65,17	65,17	65,17	65,17	DPKPLH
5	Persentase Luasan RTH yang Tertangani	%	17,2	18	18,5	19	19,5	19,5	DPKPLH
6	Persentase ketaatan terhadap ijin lingkungan yang dikeluarkan	%	100	100	100	100	100	100	DPKPLH
7	Persentase masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pengendalian lingkungan hidup	%	40	50	60	70	80	80	DPKPLH
8	Persentase masyarakat/lembaga sasaran yang mendapatkan sosialisasi/pembinaan untuk penghargaan lingkungan hidup	%	47,4	50	75	90	100	100	DPKPLH
9	Persentase jumlah aduan lingkungan yang ditangani	%	100	100	100	100	100	100	DPKPLH
10	Persentase jumlah sampah yang tertangani	%	33	33,25	33,5	33,75	34	34	DPKPLH
2.06	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
1	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	96,47	99,3	99,3	99,3	99,3	99,3	Dindukcapil
2	Cakupan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	40,47	41	42	43	44	44	Dindukcapil
3	Cakupan penerbitan akta kelahiran	%	93,01	97	97	97	97	97	Dindukcapil
4	Persentase lembaga yang memanfaatkan informasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	Dindukcapil
5	Persentase data kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	Dindukcapil

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	yang ditampilkan dalam profil kependudukan								
2.07	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
1	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat	%	36,95	37,00	37,50	38,00	38,50	38,50	Dispermades PPKB
2	Jumlah kerjasama antar desa	Kerja sama	3	4	5	6	7	7	Dispermades PPKB
3	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	%	100	100	100	100	100	100	Dispermades PPKB
4	Jumlah BUMDes yang berkembang	Unit	5	6	7	8	9	9	Dispermades PPKB
5	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan masyarakat	%	40	45	50	55	60	60	Dispermades PPKB
2.08	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
1	Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	Dispermades PPKB
2	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	Kerja sama	2	4	6	8	10	10	Dispermades PPKB
3	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	76,09	76,59	77,09	77,59	78,09	78,09	Dispermades PPKB
4	Cakupan PUS yang ingin ber-KB	%	6,98	6,96	6,94	6,92	6,90	6,90	Dispermades

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	tidak terpenuhi (unmet need)								PPKB
5	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	%	32,08	32,58	33,08	33,58	34,08	34,08	Dispermades PPKB
6	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	%	31,15%	30,65%	30,15%	29,65%	29,15%	29,15%	Dispermades PPKB
7	Angka Kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	Per 1000 orang	22,66	22,36	22,06	21,76	21,46	21,46	Dispermades PPKB
2.09	PERHUBUNGAN								
1	Persentase pemenuhan sarpras jalan di jalan kabupaten	%	38,34	39	39,5	40	40,5	40,5	Dinhub
2	Persentase cakupan pelayanan perparkiran	%	80	82	84	86	88	88	Dinhub
3	Persentase pertumbuhan jalur trayek	%	2,17	1	1	1	1	4	Dinhub
4	Persentase kelayakan kendaraan bermotor	%	88,6	88,7	88,8	88,9	89	89	Dinhub
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
1	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	8,5	10	12,5	15	17,5	17,5	Dinkominfo
2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinkominfo	%	100	100	100	100	100	100	Dinkominfo
3	Persentase diseminasi informasi publik	%	100	100	100	100	100	100	Dinkominfo
2.11	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
1	Persentase Koperasi Aktif	%	47	47,5	47,74	47,98	48,21	48,21	Disperindagkop

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
									UKM
2	Persentase Koperasi yang bisa menilai kesehatannya	%	13,96	16,75	17,87	19	19,55	19,55	Disperindagkop UKM
3	Persentase jumlah koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	%	7,12	7,3	7,35	7,4	7,45	7,45	Disperindagkop UKM
4	Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	%	7,12	8	8,5	9	10	10	Disperindagkop UKM
5	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	89,29	89,48	89,57	89,66	89,74	89,74	Disperindagkop UKM
6	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	%	99,18	99,19	99,2	99,21	99,22	99,22	Disperindagkop UKM
2.12	PENANAMAN MODAL								
1	Persentase Peningkatan Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	%	1,24	1,05	1,10	1,15	1,20	1,20	Disnaker PMPTSP
2	Persentase Peningkatan Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	%	1,24	1,05	1,10	1,15	1,20	1,20	Disnaker PMPTSP
3	Persentase kenaikan/penurunan PMDN	%	3,468	2	2,5	3	3,5	3,5	Disnaker PMPTSP
4	Persentase pelayanan perizinan yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	Disnaker PMPTSP
5	Persentase kegiatan usaha/ pelaku usaha yang dilakukan pengawasan/pembinaan	%	65	75	80	85	90	90	Disnaker PMPTSP
2.13	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA								
1	Persentase wirausaha muda	%	30	35	38	40	42	42	Dindikpora
2	Cakupan pembinaan olahraga	%	27	30	32	34	36	36	Dindikpora
3	Cakupan pembinaan atlet muda	%	28	30	32	34	36	36	Dindikpora
4	Persentase jumlah kejuaraan yang meraih medali tingkat provinsi	%	15	20	23	25	28	28	Dindikpora

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
5	Cakupan kegiatan kepramukaan yang diselenggarakan di sekolah	%	20	30	40	50	60	60	Dindikpora
2.14	STATISTIK								
1	Persentase ketersediaan data statistik sektoral	%	100	100	100	100	100	100	Dinkominfo
2.15	PERSANDIAN								
1	Persentase Aplikasi yang diasesmen Indeks KAMI	%	NA	2,13	4,26	6,39	8,51	8,51	Dinkominfo
2.16	KEBUDAYAAN								
1	Persentase kelompok seni yang melakukan registrasi	%	12	15	15	15	15	15	Disparbud
2	Persentase Fasilitasi Event Seni dan Budaya yang dilaksanakan	%	10	10	10	10	10	10	Disparbud
3	Persentase benda cagar budaya dipelihara	%	47,95	50	60	70	80	80	Disparbud
2.17	PERPUSTAKAAN								
1	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	11,11	3,17	3,84	4,07	4,27	4,27	Disarpus
2	Ketercukupan koleksi perpustakaan daerah	%	7,00	7,29	7,41	7,54	7,72	7,72	Disarpus
3	Persentase perpustakaan berstandar nasional perpustakaan	%	3,8	4,28	4,99	5,71	6,42	6,42	Disarpus
2.18	KEARSIPAN								
1	Persentase tata kelola kearsipan yang baik	%	100	100	100	100	100	100	Disarpus
2	Persentase arsip yang terlindungi dan terselamatkan	%	32,33	6,81	6,81	9,09	9,09	31,8	Disarpus
3	Persentase penerbitan ijin penggunaan arsip yang bersifat tertutup	%	100	100	100	100	100	100	Disarpus
3	LAYANAN URUSAN PILIHAN								
3.01	KELAUTAN DAN PERIKANAN								

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
1	Persentase terpenuhinya fasilitas pengelolaan perikanan budidaya	%	100	100	100	100	100	100	Dintankan KP
2	Persentase produksi perikanan tangkap	%	100	100	100	100	100	100	Dintankan KP
3	Persentase pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran hasil.	%	100	100	100	100	100	100	Dintankan KP
4	Persentase pembinaan dan pengawasan sumber daya perikanan	%	100	100	100	100	100	100	Dintankan KP
3.02	PARIWISATA								
1	Persentase Ketersediaan data koleksi museum	%	20	20	20	20	20	80	Disparbud
2	Persentase pembangunan obyek wisata	%	17	20	20	20	20	80	Disparbud
3	Persentase Peningkatan kunjungan wisata	%	9,45	10	11	12	13	13	Disparbud
4	Persentase peningkatan lama tinggal	%	0,6	0,6	0,55	0,50	0,45	0,45	Disparbud
5	Persentase peningkatan kapasitas masyarakat dan pelaku wisata	%	0	5	10	15	20	20	Disparbud
3.03	PERTANIAN								
1	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian bidang hortikultura dan perkebunan	%	98	100	100	100	100	100	Dintankan KP
2	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana pertanian bidang tanaman pangan	%	98	100	100	100	100	100	Dintankan KP
3	Persentase Penyediaan dan	%	98	100	100	100	100	100	Dintankan KP

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	Pengembangan Sarana pertanian bidang peternakan								
4	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana Pertanian bidang hortikultura dan perkebunan	%	93	100	100	100	100	100	Dintankan KP
5	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana Pertanian bidang tanaman pangan	%	93	100	100	100	100	100	Dintankan KP
6	Persentase penyediaan dan pengembangan prasarana Pertanian bidang peternakan	%	93	100	100	100	100	100	Dintankan KP
7	Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	%	92	100	100	100	100	100	Dintankan KP
8	Persentase pengendalian Serangan Organisme Pengganggu tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan dan penganggulan bencana pertanian	%	90	100	100	100	100	100	Dintankan KP
9	Persentase pembinaan kelembagaan kelompok tani	%	66,72	100	100	100	100	100	Dintankan KP
3.04	PERDAGANGAN								
1	Persentase Pasar dalam kondisi baik	%	8	12	16	20	24	24	Disperindagkop UKM
2	Persentase jumlah pedagang kaki lima yang terbina	%	100	100	100	100	100	100	Disperindagkop UKM
3	Persentase jumlah komoditi barang kebutuhan pokok dan barang penting yang tersedia	%	100	100	100	100	100	100	Disperindagkop UKM

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
4	Persentase tingkat pertumbuhan nilai ekspor bersih perdagangan	%	4,6%	5	5	5	5	5	Disperindagkop UKM
5	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	86,33	88	90	92	94	94	Disperindagkop UKM
6	Persentase penyelenggaraan promosi perdagangan	%	100	100	100	100	100	100	Disperindagkop UKM
7	Persentase terjalannya kemitraan pelaku usaha yang diusulkan	%	50	50	50	50	50	50	Disperindagkop UKM
3.05	PERINDUSTRIAN								
1	Persentase meningkatnya kemampuan sumber daya manusia wirausaha dan tenaga kerja industri kecil menengah tentang IPTEK sistem produksi	%	2,24	3,13	0,81	3,94	4,4	4,4	Disperindagkop UKM
2	Persentase peningkatan kemampuan industri kecil menengah tentang penguasaan dan pemanfaatan alih teknologi	%	0.13	0,15	0.20	0.53	0.66	0.66	Disperindagkop UKM
3	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Nilai	95	95	95	95	95	95	Disperindagkop UKM
3.06	TRANSMIGRASI								
1	Persentase transmigran pendaftar yang diberangkatkan	%	0	7	7	7	7	7	Disnaker PMPTSP
4	LAYANAN PENDUKUNG URUSAN								
4.01	SEKRETARIAT DAERAH								
1	Persentase pengkoordinasian perumusan kebijakan bidang Pemerintahan dan	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	Kesejahteraan Rakyat								
2	Persentase pengkoordinasian kebijakan bidang perekonomian dan pembangunan	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
3	Persentase peningkatan nilai evaluasi kelembagaan, pelayanan publik dan Kinerja	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah
4.02	SEKRETARIAT DPRD								
1	Persentase capaian kinerja Program Administrasi Umum Sekretariat DPRD Kabupaten	%	96	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
2	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan pendalaman tugas DPRD dan Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
3	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan kegiatan Publikasi dan dokumentasi Dewan, Penyelenggaraan Humas, Penyusunan Program Kerja DPRD dan Fasilitasi Tugas DPRD	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
4	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pengawasan dan fungsi Anggaran	%	94,72	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD
5	Persentase capaian kinerja program dukungan pelaksanaan	%	87,5	100	100	100	100	100	Sekretariat DPRD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	tugas dan fungsi DPRD untuk melaksanakan Fungsi Pembentukan Perda								
5	LAYANAN PENUNJANG URUSAN								
5.01	PERENCANAAN								
1	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJPD/RPJMD/RKPD yang telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	Baperlitbang
2	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	>90	>90	>90	>90	>90	>90	Baperlitbang
3	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia ke dalam RKPD	%	>90	>90	>90	>90	>90	>90	Baperlitbang
4	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Perekonomian dan SDA ke dalam RKPD	%	>90	>90	>90	>90	>90	>90	Baperlitbang
5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ke dalam RKPD	%	>90	>90	>90	>90	>90	>90	Baperlitbang
5.02	KEUANGAN								
1	Persentase Penerbitan SP2D yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	BPPKAD
2	Persentase serapan dana transfer daerah	%	100	100	100	100	100	100	BPPKAD
3	Persentase Penyusunan laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	BPPKAD
4	Persentase Penyusunan Penganggaran yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	BPPKAD
5	Kesesuaian Program dalam	%	90	>90	>90	>90	>90	>90	BPPKAD

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	APBD dengan yang ada di RKPD								
6	Persentase Penyusunan Laporan BMD yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	BPPKAD
7	Persentase Pertumbuhan Pajak daerah	%	14	5	5	5	5	5	BPPKAD
5.03	KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
1	Persentase jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	%	68,02	72	76	80	84	84	BKD
2	Persentase jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah yang terisi secara definitif	%	79,2	82	84	86	88	88	BKD
3	Persentase jabatan administrasi pada instansi pemerintah yang terisi definitif	%	72,95	76	81	85	89	89	BKD
4	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	37,52	40	50	60	70	70	BKD
5	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	47,30	50	60	70	80	80	BKD
6	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Jam	10	10	10	10	10	10	BKD
5.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
1	Persentase pemanfaatan hasil kelitbang	%	20	25	30	35	40	40	Baperlitbang
2	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	20	25	30	35	40	40	Baperlitbang
6	LAYANAN PENGAWASAN URUSAN								
6.01	INSPEKTORAT DAERAH								
1	Persentase Penyelesaian Tindak	%	88	90	91	91	92	92	Inspektorat

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	Lanjut Hasil Pemerinkasaan Internal dan Eksternal								
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah	Level	2	3	3	3	3	3	Inspektorat
7	LAYANAN UNSUR KEWILAYAHAN								
7.01	KECAMATAN								
1	Persentase penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	%	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
2	Persentase pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
3	Persentase penyelenggaraan koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum	%	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
4	Persentase Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	%	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
5	Persentase pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	%	100	100	100	100	100	100	Kecamatan
8	LAYANAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM								
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
1	Persentase Ormas (yang terdaftar dikesbang) yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan/Idiologi Pancasila	%	NA	25	25	25	25	25	Bakesbangpol
2	Persentase Masyarakat yang mendapatkan pendidikan politik	%	NA	25	25	25	25	25	Bakesbangpol
3	Persentase Cakupan ormas yang diberi Surat Keterangan keberadaan ormas	%	20	25	50	75	100	100	Bakesbangpol
4	Persentase orang yang	%	15	25	25	25	25	25	Bakesbangpol

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL (2021)	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD	OPD
				2023	2024	2025	2026		
	mendapatkan pembinaan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)								
5	Persentase penanganan konflik	%	NA	25	25	25	25	25	Bakesbangpol
9	DILAKSANAKAN OLEH SEMUA URUSAN								
1	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	Seluruh OPD

BAB IX

PENUTUP

9.1. Pedoman Transisi

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 disusun dengan memperhatikan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJPD kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025, hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, isu-isu strategis yang berkembang, kebijakan nasional, dan mengacu pada regulasi yang berlaku. RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 merupakan pedoman, landasan dan rujukan dalam penyusunan Renstra PD, yang selanjutnya pada setiap tahun selama periode RPD Tahun 2023-2026 akan dijabarkan menjadi RKPD dan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Pedoman transisi yang disusun secara terpadu dalam RPD 2017-2022 ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan daerah dan mengisi kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah selama RPJMD periode selanjutnya belum tersusun. Program prioritas daerah tahun transisi mengacu pada tujuan, sasaran, maupun program prioritas tahun terakhir pada RPD ini yaitu pada tahun 2026, dengan penyesuaian target capaian sesuai capaian terakhir tahun sebelumnya. Pedoman ini perlu disusun untuk membantu, Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada ataupun Penjabat Bupati yang ditugaskan mengisi kekosongan sebelum pelaksanaan Pilkada dalam menyusun RKPD maupun APBD.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 yang telah disusun ini hendaknya dapat dilaksanakan oleh segenap pemangku kepentingan, baik unsur pemerintah maupun unsur non pemerintah, secara konsisten, jujur, transparan, partisipatif, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, perlu kiranya untuk merumuskan beberapa

kaidah terkait dengan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026 dalam langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) berkewajiban untuk melaksanakan program-program RPD dengan sebaik-baiknya.
2. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara, berkewajiban untuk menyusun Renstra PD dengan berpedoman pada RPJMD yang nantinya akan menjadi pedoman dalam menyusun Renja PD.
3. Seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berkewajiban menjamin konsistensi antara dokumen perencanaan Pusat, Provinsi Jawa Tengah, dan Kabupaten Banjarnegara.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPD, Baperlitbang Kabupaten Banjarnegara berkewajiban untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjabaran RPD ke dalam RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 sampai tahun 2026.
5. Substansi RPD digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Plh. BUPATI BANJARNEGARA
WAKIL BUPATI,

ttd

SYAMSUDIN